



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA
PENDUKUNG PERTANIAN DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT
DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKOTAAN (P2KP)**

SKRIPSI



**ELA AFRIYA NINGSIH
04115030**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA
PENDUKUNG PERTANIAN DAN KETERLIBATAN
MASYARAKAT DALAM PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKOTAAN (P2KP)**

**(Kasus : di Desa Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli
Serdang Sumatera Utara)**

OLEH :

**ELA AFRIYA NINGSIH
04115030**

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA
PENDUKUNG PERTANIAN DAN KETERLIBATAN
MASYARAKAT DALAM PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKOTAAN (P2KP)**

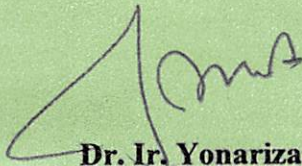
**(Kasus : di Desa Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli
Serdang Sumatera Utara)**

OLEH :

ELA AFRIYA NINGSIH
04115030

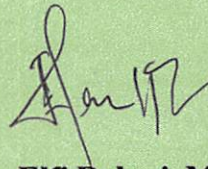
MENYETUJUI :

Dosen Pembimbing I



Dr. Ir. Yonariza, MSc
NIP. 196505051991031003

Dosen Pembimbing II



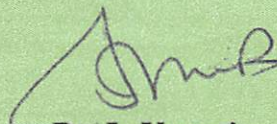
Dra. Elfi Rahmi, MSi
NIP. 19690309 199903 2001

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



Prof. Ir. H. Ardi, MSc
NIP. 195312161980031004

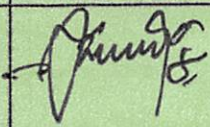
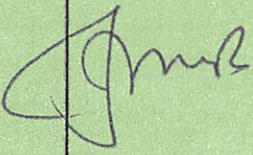



**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian Universitas
Andalas**



Dr. Ir. Yonariza, MSc
NIP. 196505051991031003



Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada tanggal 21 Desember 2010

No	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1	Dr. Ir. Faidil Tanjung, MSi		Ketua
2	Dr. Ir. Yonariza, MSc		Sekretaris
3	Ir. Dwi Evaliza, MS		Anggota
4	Ferdinal Ashful, SP.MSi		Anggota
5	Syofyan Fairuzi, STP.MSi		Anggota





*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai dari segala sesuatu urusanmu
Kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain.
Dan hanya kepada tuhan mu lah hendaknya kamu berharap.
(Q. Al-Nasyirah: 6-8)*

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai Ibu' dan papa, terimakasih atas setiap do'a, kasih sayang, pengorbanan, dan amanah yang diberikan selama ini. Tiada yang pantas dapat ku berikan untuk membalas semua itu, selain hatiku yang tulus untuk mu.

Untuk Mba' ku Sri Wahyuni Masli. SHi , Mas ku Gatot. SE, adik – adikku Handoko calon Sarjana Teknik Sipil, makasih ya atas pengertian, bantuan, dan semangat yang diberikan. dan Ragil terus semangat dek, SMUN 1 di depan mata, kejar terus, Gapai cita-cita mu dek, pasti bisa!! Yang penting jangan lupa belajar, dan berdo'a.

Buat sahabat ku terbaik

Yuni. SP, Rina. SP, Silvia. SP, Ivo. SP, Sita. SP, Rini. SP, Ria. SP, Eka. SP, Yani. SP, Suhaimi, Veno, Yuliharmen, dan Zahara tetap semangat ya kawan kalian pasti bisa... Adik-adikku Ii. SH, Ii cengkeh, Rika, Siska, Yunda, Ami, Sabrina, Arif, Madan, Bancin, Selamat, Arpan, Husen, Aza, Mukhlis, Fahmi dan seluruh keluarga besar Forsilammsu (Forum Silaturahmi Mahasiswa Muslim Sumatera Utara). Buat Keluarga besar Nenek di Tunggang, Keluarga besar Zahidah 4, keluarga besar SSC, keluarga besar MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa) UNAND. Dan keluarga besar di Nagari Sibarambang Kec. X Koto di ateh. Terimakasih atas dukungannya, dan terimakasih untuk semuaa.....

Alhamdulillahirabbil'alamin, semua perjuangan terlaksana atas persetujuan-
Mu Ya Allah.....

BIODATA

Penulis dilahirkan di Medan, pada Tanggal 18 April 1986 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Masikum dan Ibu Linda Roslina. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dijalani di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 066667 Kiwi (1992-1998). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di (SLTPN 29) Medan Tembung (1998-2001). Dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh di SMA Swasta Teladan Medan Tembung, dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun 2004 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.

Padang, April 2011

E A N

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan yang berjudul **“Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian Dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Studi Kasus: ”Di Desa Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara”**. Dari mata kuliah pembangunan pertanian, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai bulan Juni 2010 di Desa Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ir. Yonariza, MSc dan Ibu Dra. Elfi Rahmi, MSi selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi petunjuk, pengarahan dan saran dari tahap awal penyusunan proposal ini sampai penyusunan skripsi selesai. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, seluruh dosen, dan karyawan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Penghormatan dan Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberikan semangat, dorongan serta doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak kepala Desa Tanjung Rejo beserta perangkatnya, BKM Bina Sejahtera dan para Responden yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pertanian khususnya.

Padang, April 2011

Penulis

E A N

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
 II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Pembangunan Pertanian.....	7
2.2. Konsep Pembangunan Prasarana Pendukung Desa	9
2.3. Pemberdayaan Masyarakat.....	11
2.4. Konsep Partisipasi Masyarakat	15
2.5. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)	18
2.6. Penelitian Terdahulu	22
 III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.2. Metode Penelitian.....	24
3.3. Metode Pengambilan Sampel.....	24
3.4. Metode Pengumpulan Data	25
3.5. Variabel yang Diamati	26
3.6. Analisa Data	28
3.7. Defenisi Operasional	30
 IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	31
4.1.1. Letak Georagfis	31
4.1.2. Jumlah Penduduk	32
4.1.3. Mata Pencaharian Penduduk	32
4.1.4. Tingkat Pendidikan	33
4.1.5. Sarana dan Prasarana.....	34
4.1.6. Identitas Sampel	35
4.2. Profil P2KP	37
4.3. Struktur Organisasi BKM.....	38
4.4. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian	39
4.4.1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan.....	40
4.4.2. Kegiatan Pembangunan Jembatan	44
4.4.3. Kegiatan Pembangunan Drainase	48

4.5. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan.....	52
4.5.1. Tahap Perencanaan	52
4.5.2. Tahap Pelaksanaan.....	58
4.6. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan.....	62
4.6.1. Tahap Perencanaan	62
4.6.2. Tahap Pelaksanaan.....	68
4.7. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Drainase	72
4.7.1. Tahap Perencanaan	72
4.7.2. Tahap Pelaksanaan	78
4.8. Manfaat yang dirasakan Masyarakat Setelah Tejadinya Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian	83
4.8.1. Manfaat Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan	83
4.8.2. Manfaat Kegiatan Pembangunan Jembatan.....	85
4.8.3. Manfaat Kegiatan Pembangunan Drainase.....	86
V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
Tabel 1. Responden penelitian pada pelaksanaan Kegiatan P2KP Dalam Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian	25
Tabel 2. Rincian Jumlah Key Informant	26
Tabel 3. Penggunaan Lahan di Desa Tanjung Rejo	31
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Rejo	32
Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Desa Tanjung Rejo	33
Tabel 6. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tanjung Rejo	34
Tabel 7. Sarana dan Prasarana di Desa Tanjung Rejo.....	34
Tabel 8. Identitas Masyarakat Sampel	36
Tabel 9. Identitas Proyek P2KP Dalam Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian	40
Tabel 10. Tahapan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan.....	44
Tabel 11. Tahapan Kegiatan Pembangunan Jembatan.....	48
Tabel 12. Tahapan Kegiatan Pembangunan Drainase.....	52
Tabel 13. Kehadiran Masyarakat yang Ikut Dalam Musyawarah Pembuatan Proposal Usulan Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	54
Tabel 14. Frekuensi Kehadiran Masyarakat yang Ikut Dalam Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	55
Tabel 15. Frekuensi Kehadiran Masyarakat yang Ikut Dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	57
Tabel 16. Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembersihan Jalan	59
Tabel 17. Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Pelaksanaan KegiatanPengerasan Jalan Dengan Sirtu	60
Tabel 18. Hasil Skor Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan.....	61
Tabel 19. Frekuensi Kehadiran Masyarakat yang Ikut Dalam Musyawarah Pembuatan Proposal Usulan Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	64
Tabel 20. Frekuensi Kehadiran Masyarakat yang Ikut Dalam Musyawarah Penyusunan Pengadaan Bahan dan Alat Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	66
Tabel 21. Frekuensi Kehadiran Masyarakat yang Ikut Dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	67
Tabel 22. Frekuensi Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengorekan Pondasi	69

Tabel 23. Frekuensi akaehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengecoran Pondasi	70
Tabel 24. Hasil Skor Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan	71
Tabel 25. Frekuensi Kehadiran Masyarakat yang Ikut Dalam Musyawarah Pembuatan Proposal Usulan Pada Kegiatan Pembangunan Drainase Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	74
Tabel 26. Frekuensi Kehadiran Masyarakat yang Ikut Dalam Musyawarah Penyusunan Pengadaan Bahan dan Alat Pada Kegiatan Pembangunan Drainase Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	76
Tabel 27. Frekuensi Kehadiran Masyarakat yang Ikut Dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pembangunan Drainase Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	77
Tabel 28. Frekuensi Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penggalian Tanah.....	79
Tabel 29. Frekuensi Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemasangan Batu bata	80
Tabel 30. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelesteran	81
Tabel 31. Hasil Skor Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Drainase	81

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 1 : Struktur Organisasi BKM.....	38
Gambar 2 : Jembatan sebelum dibangun.....	98
Gambar 3 : Pembangunan Jembatan tahap I	98
Gambar 4 : Pembangunan Jembatan tahap II	98
Gambar 5 : Pembangunan Jembatan tahap III.....	98
Gambar 6 : Jembatan sebelum dibangun.....	99
Gambar 7 : Gotong Royong Pembangunan Drainase tahap I	99
Gambar 8 : Gotong Royong Pembangunan Drainase tahap II	99
Gambar 9 : Drainase setelah dibangun.....	99
Gambar 10 : Peta Geografis Desa Tanjung Rejo	129

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1 : Matrik Data Set Penelitian	93
2 : Alokasi Dana BLM di Kecamatan Percut Sei Tuan.....	96
3 : Jumlah KK Miskin di Kecamatan Percut Sei Tuan 2008.....	97
4 : Gambar Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian.....	98
5 : Daftar Nama Masyarakat yang Terlibat dalam Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan.....	100
6 : Daftar Nama Masyarakat yang Terlibat dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan	101
7 : Daftar Nama Masyarakat yang Terlibat dalam Kegiatan Pembangunan Drainase.....	102
8 : Daftar Nama BKM Bina Sejahtera.....	103
9 : Sarana Pertanian	104
10 : Tingkat Kehadiran Masyarakat dalam Musyawarah Pembuatan Proposal Usulan Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan.....	105
11 : Tingkat Kehadiran Masyarakat dalam Musyawarah Penyusunan Pengadaan Bahan dan Alat Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan	106
12 : Tingkat Kehadiran Masyarakat dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan	107
13 : Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat dalam Kegiatan Pembersihan Jalan Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan	108
14 : Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat dalam Kegiatan Pengerasan Jalan Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan	109
15 : Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat dalam Kegiatan Pembuatan Proposal Usulan Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan	110
16 : Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat dalam Penyusunan Pengadaan Bahan dan Alat Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan	112
17 : Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan	114
18 : Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat dalam Kegiatan Pengorekan Pondasi Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan	116
19 : Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat	

dalam Kegiatan Pengecoran Pondasi Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan	118
20 : Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat dalam Musyawarah Pembuatan Proposal Usulan Pada Kegiatan Pembangunan Drainase	120
21 : Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pem- bangunan Drainase	121
22 : Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat dalam Kegiatan Penyusunan Pengadaan Bahan dan Alat Pada Ke- giatan Pembangunan Drainase	122
23 : Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat dalam Kegiatan Penggalian Tanah.....	123
24 : Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat dalam Kegiatan Pemasangan Batu Bata.....	124
25 : Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat dalam Kegiatan Pelesteran	125
26 : Bagan Alir Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian	126
27 : Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu	127

**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA
PENDUKUNG PERTANIAN DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT
DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKOTAAN (P2KP) (Kasus : di Desa Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan
Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan prasarana pendukung pertanian pada tahun 2007, (2) Mengukur dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian, (3) Mengetahui manfaat apa yang dirasakan masyarakat setelah terjadinya pembangunan prasarana pendukung pertanian di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian dilaksanakan di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Sedang. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi kasus dengan teknik pengambilan sampel secara sengaja (purposive)

Dari hasil penelitian diketahui, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian ini belum seluruhnya berjalan lancar sebagaimana mestinya. Bila dilihat dari segi prosesnya dalam melakukan musyawarah pada setiap jenis kegiatan sudah berjalan dengan baik. Bila dilihat dari stakeholder tidak semua yang diharapkan ikut terlibat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Dan bila dilihat dari segi waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Sedangkan pada proses pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan yang dilakukan termasuk dalam pembuatan proposal usulan dan laporan pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan yang diharapkan. Keterlibatan masyarakat pada kegiatan peningkatan kualitas jalan dan kegiatan pembangunan jembatan termasuk kategori sedang yaitu dengan persentase 63,12% dan 52,82%. Pada kegiatan pembangunan drainase keterlibatan masyarakat termasuk kategori tinggi dengan persentase 76,38%. Manfaat yang dirasakan masyarakat setelah terjadinya pembangunan prasarana pendukung pertanian, seperti peningkatan kualitas jalan adalah untuk mempermudah mengangkut hasil pertanian masyarakat, terjadinya peningkatan sarana transportasi, dan terjadinya percepatan waktu. Manfaat pembangunan jembatan adalah sebagai penghubung antara jalan satu dengan jalan yang lainnya, mempermudah transportasi masuk ke lahan pertanian, dan juga terjadinya percepatan waktu. Sedangkan manfaat pada pembangunan drainase adalah mencegah terjadinya banjir dan memperlancar saluran air.

Saran yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu Dengan terlaksananya program pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian tersebut dengan baik, maka diharapkan agar P2KP dapat melanjutkan program tersebut dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang fokus pada kegiatan pembangunan fisik.

**PARTICIPATION IN AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT IN TANJUNG REJO VILLAGE KECAMATAN
PERCUT SUNGAI TUAN, DELI SERDANG DISTRICT, NORTH
SUMATRA**

ABSTRACT

This research objectives are (1) to describe implementation of agricultural infrastructure development in 2007, (2) to measure people participation in the programme , and, (3) to assess the benefit of the programme to local people.

The programme is actually not fully implemented yet. Some implemented activities were not well implemented. Programme meetings have been organized well. The programme's schedule and place were agreed by all stakeholders. However, some stakeholders did not actively participate in program implementation. So, the planning and reporting were not satisfied. Participation level of local people in road improvement and bridge construction is medium with the score 63,12% and 52,82% respectively. For drainage construction, tehirs participation is high, with score 76,38%. The benefits of the program for the people are reduction in transportation cost, especially for their farming activities, and avoidance flood.

Based on above findings, it is suggested that programme implementation has to be improve especially construction project.

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting dan berpotensi besar dalam menunjang pembangunan bangsa. Sebagai negara agraris, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduknya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Maka, demi kelangsungan pembangunan nasional, sektor pertanian Indonesia perlu ditumbuhkan (Dillon, 2004).

Salah satu persoalan penting yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam proses pembangunan adalah masalah kemiskinan. Secara struktural kemiskinan disebabkan karena masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam kepemilikan modal. Masyarakat miskin sering dihadapkan pada kendala kekurangan modal pada kegiatan ekonomi mereka, secara khusus pada masyarakat petani (Sumodiningrat, 1997).

Dalam kerangka pengembangan ekonomi nasional terlihat bahwa peran sektor pertanian strategis dan memiliki potensi yang besar. Namun, peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta karena manajemen pembangunan pertanian belum mampu menjawab berbagai permasalahan aktual dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam pemberdayaan masyarakat pertanian tidak saja memerlukan pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial budaya (*socio cultural*) yang mampu merangsang perubahan sikap perilaku (Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, 2004).

Untuk mendukung proses perubahan tersebut maka peran pemerintah yang dapat dilakukan adalah melalui, (1) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas (2) Fasilitasi dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan di wilayah (3) Fasilitasi agar terciptanya iklim yang

kondusif bagi perkembangan kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat (4) Merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha (5) Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan pertanian (Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, 2004).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat di Desa Tanjung Rejo adalah melakukan pelaksanaan pembangunan prasarana pendukung pertanian untuk peningkatan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani adalah melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Pola pembangunan ini dilakukan guna mengatasi masalah utama ditingkat pertanian yaitu akses jalan yang tidak lancar, kurang maksimalnya irigasi, rendahnya penguasaan teknologi, serta lemahnya sumber daya manusia dan kelembagaan petani.

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ini merupakan kegiatan memberdayakan masyarakat miskin dan masyarakat tani yang menitikberatkan pada peran serta seluruh anggota masyarakat dan pihak-pihak terkait. Dengan upaya untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat dimasa mendatang (Pedum P2KP, 2005).

Pelaksanaan program erat kaitannya dalam konteks penyuluhan, dimana dapat memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya, dan juga sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usul atau saran penyempurnaan untuk program yang baru (Mardikanto, 2009).

Keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan prasarana untuk meningkatkan produksi pertanian terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ini tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat. Kunci utama dari partisipasi masyarakat adalah pembentukan kerja sama yang berlandaskan pada kepercayaan dan keterbukaan antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Agar terciptanya partisipasi, ada tiga unsur penting

yaitu terbukanya kesempatan bagi masyarakat yang berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, serta adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.

1.2 Perumusan Masalah

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) adalah program yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 1999 (Pedum P2KP, 2005). Program ini masuk ke desa dikarenakan adanya penentuan lokasi yang langsung ditetapkan oleh pusat yaitu Bappenas Jakarta. Dengan demikian Bappenas menetapkan Desa Tanjung Rejo sebagai salah satu lokasi yang mendapat dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari P2KP di Kecamatan Percut Sei Tuan (Lampiran 2). Beberapa alasan Desa Tanjung Rejo dipilih sebagai lokasi yang mendapat dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari P2KP yaitu; 1) Jumlah penduduk di Desa Tanjung Rejo padat hampir seperti di daerah perkotaan, 2) Desa Tanjung Rejo sudah mengarah kemodernisasian, 3) Prasarana jalan penghubung antara desa dengan kota sudah mendukung, 4) Desa Tanjung Rejo terletak di daerah pinggiran kota.

Menurut Pedum P2KP (2005), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ini merupakan sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program P2KP di Desa Tanjung Rejo Kabupaten Deli Serdang ini telah di mulai pada Tahun 2006. Program ini memiliki tiga kegiatan yaitu: (1) Kegiatan di bidang fisik (lingkungan) (2) Kegiatan di bidang sosial (3) Kegiatan di bidang ekonomi.

Adapun kegiatan dari kegiatan bidang fisik (lingkungan) adalah kegiatan pembangunan jalan guna untuk memperlancar akses transportasi, pembuatan jembatan guna untuk mempermudah akses jalan dalam mengangkut hasil-hasil pertanian di Desa Tanjung Rejo, dan pembuatan drainase guna untuk mengeluarkan air dari lahan pertanian tersebut, agar air tidak tergenang dan tidak terjadi banjir.

Kegiatan bidang sosial adalah kegiatan yang memberikan peningkatan mutu sumber daya manusia, dan pemberian santunan pada masyarakat miskin atau jompo. Pemberian santunan ini berupa pemberian sembako kepada masyarakat miskin. Kegiatan ini dilakukan guna membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin di Desa Tanjung Rejo.

Kemudian kegiatan pada bidang ekonomi adalah berupa kegiatan pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pinjaman tersebut diberikan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh kelompok. Kemudian Pinjaman tersebut diberikan guna untuk membantu modal masyarakat bagi usaha mereka. Sedangkan sasaran program pembangunan prasarana ini adalah masyarakat.

Kabupaten Deli Serdang adalah daerah yang terletak pada wilayah pengembangan Pantai Timur Sumatera Utara dengan iklim yang bervariasi. Kemudian daerah ini merupakan sebagai salah satu kabupaten yang memiliki peluang investasi yang cukup menjanjikan dengan sumber daya alamnya yang besar. Beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang terletak di bagian dataran pantai, dataran rendah, dan dataran pegunungan (Anonim, 2009).

Kecamatan Percut Sei Tuan adalah salah satu daerah yang terletak dibagian dataran pantai yang terdiri dari 20 Desa (Anonim, 2009). Desa Tanjung Rejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan mata pencaharian penduduknya mayoritas sebagai petani sawah, dan petani nelayan. Dan merupakan desa dengan jumlah penduduk miskin lebih banyak dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Percut Sei Tuan (Lampiran 3). Dengan demikian, karena masih banyaknya penduduk yang miskin juga kurang baiknya akses terhadap jalan dan jembatan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, serta pembangunan drainase yang ada di desa tersebut juga kurang baik, maka keberadaan P2KP sangat diperlukan masyarakat Desa Tanjung Rejo. Tujuan keberadaan P2KP di Desa Tanjung Rejo adalah untuk memfasilitasi dan mendanai pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian, demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan.

Pembangunan prasarana pendukung pertanian merupakan pembangunan fisik lingkungan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam penyiapan prasarana pendukung pertanian bagi masyarakat miskin pada suatu desa sasaran untuk menjawab kebutuhannya serta sebagai prasarana untuk membuka akses bagi masyarakat miskin (Petunjuk dan Teknis P2KP,2005).

Berdasarkan hasil kunjungan awal, pelaksanaan kegiatan (P2KP) dalam pembangunan prasarana pendukung pertanian di Desa Tanjung Rejo ini adalah mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dengan melibatkan stakeholder yang berwenang seperti Dinas Pekerjaan Umum, BKM, Perangkat Desa, dan Masyarakat, masing-masing stakeholder memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian tersebut memiliki kerja sama untuk mendorong terlaksananya program ini.

Berdasarkan informasi yang di dapat pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sudah terlaksana pada tahap pembuatan jembatan, pembuatan drainase, dan pembuatan jalan dengan sirtu, dan ini hanya dilakukan pada beberapa tempat saja yang ada di desa tersebut. Pelaksanaan program lingkungan (fisik) ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan yang telah berjalan. Dari uraian di atas maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana mengukur dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Perkotaan (P2KP) di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

3. Manfaat apa yang dirasakan masyarakat setelah terjadinya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) tersebut di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian dalam P2KP.
2. Mengukur dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian.
3. Mengetahui manfaat apa yang dirasakan masyarakat setelah terjadinya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan :

1. Dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna bagi pihak pemerintah terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sudah ada.
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu program bantuan kepada masyarakat.
3. Dapat berguna bagi mahasiswa/peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi.
4. Dapat menjadi bahan pengembangan wawasan.

11. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Pertanian

Masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian di negara-negara yang sedang berkembang pada abad ke-21 cukup berat. Untuk memecahkan masalah itu, diperlukan suatu perubahan yang mendasar terhadap paradigma pembangunan pertanian yang selama ini dianut oleh pemerintah negara-negara tersebut dalam membangun sektor pertanian mereka (Soetrisno, 2003).

Pembangunan pertanian di Indonesia apabila ditelusuri dari waktu ke waktu mengalami berbagai pasang surut. Bidang pertanian sebagai dasar perekonomian kerakyatan yang ada pada awalnya sangat diandalkan dalam menopang sendi-sendi pembangunan bangsa, pada akhirnya mengalami berbagai gejolak permasalahan. Penyebabnya adalah berbagai kebijakan yang justru menciptakan keadaan yang tidak menguntungkan bagi para petani. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan diharapkan dapat mengatasi segala persoalan pertanian malah bermuara pada permasalahan yang sangat kompleks. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya memberatkan para petani yang mayoritas pelaku di bidang pertanian. Upaya-upaya yang ditempuh dalam mensejahterakan kehidupan para petani dianggap belum berhasil. Karena dalam mengambil keputusan, pemerintah kurang berpihak kepada kaum petani dan cenderung merugikan petani (Dillon, 2004).

Pembangunan pertanian yang dilaksanakan adalah pembangunan pertanian yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan beberapa elemen seperti peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas ekonomi pedesaan, pelaksanaan reformasi agraria, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan petani serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa dengan kota (Yudhoyono, 2006).

Terdapat 5 syarat pokok yang diperlukan untuk menggerakkan dan membangun pertanian yaitu (Mosher, 1987):

1. Adanya pasar untuk hasil usaha tani.
2. Teknologi yang senantiasa berkembang.
3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal.

4. Adanya perangsang produksi bagi petani.
5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontiniu.

Di samping lima syarat mutlak, ada lima syarat lagi yang adanya tidak mutlak tetapi kalau ada (dapat diadakan) benar-benar akan sangat memperlancar pembangunan pertanian. Yang termasuk sarana pelancar tersebut adalah pendidikan pembangunan, kredit produksi, kegiatan gotong royong petani, perbaikan dan perluasan tanah pertanian serta perencanaan nasional pembangunan pertanian. Syarat-syarat tersebut di atas dapat dikelompokkan kepada dua hal yaitu: (1) Merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan iklim yang merangsang; (2) Merupakan sarana-sarana fisik dan sosial yang merupakan alat (*means*) untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian:

1) Perangsang pembangunan pertanian

- ❖ Adanya rencana pembangunan yang memberi prioritas pada pembangunan pertanian.
- ❖ Adanya kebijakan-kebijakan khusus seperti kebijakan harga minimum (*floor price*), subsidi harga pupuk, kegiatan penyuluhan yang intensif, perlombaan dengan hadiah-hadiah yang menarik pada petani teladan, pendidikan pembangunan pada petani-petani di desa baik mengenai keterampilan lainnya yang membantu menciptakan iklim yang menggiatkan usaha pembangunan.

2) Faktor-faktor fisik dan sosial

- ❖ Tersedianya secara lokal kebutuhan akan sarana pertanian seperti bibit unggul, pupuk dan obat-obatan.
- ❖ Adanya lembaga perbankan yang siap melayani dan meminjamkan kredit dengan persyaratan yang tidak berat.
- ❖ Pengembangan usaha koperasi melalui peningkatan mutu pengurus koperasi yang ada dan pendidikan kader-kader baru, membantu dan membina sistem pembukuan dan lain-lain.

Mubyarto (1989), mengemukakan bahwa tidak semua model pembangunan pertanian bisa diimplementasikan oleh negara-negara yang sedang berkembang di dalam membangun pertaniannya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi

kas dari negara yang bersangkutan seperti sosial-ekonomi, politik, teknologi dan kebudayaan yang tidak memungkinkan penerapan model pembangunan pertanian dari negara luar tersebut secara keseluruhan. Namun, setidaknya (*seperti Indonesia*) bisa belajar dari Taiwan tentang “cara-cara mengatur organisasi pertaniannya”, dari Jepang dalam “merangsang kerja petani”, dari Tailand dalam “pembangunan jalan-jalan oleh negara dan pengembangan hortikultura” dan dari India dalam “kegiatan-kegiatan penelitiannya”.

2.2 Pembangunan Prasarana Pendukung Desa

Konsep pembangunan “dari bawah” saat ini bukan merupakan suatu hal yang baru. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi pada segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan perencanaan tertentu. Di Indonesia pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan rencana tertentu, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan masyarakat. Proses pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual dan materil (Soekanto, 2004).

Pembangunan tidak hanya dilihat sebagai suatu proses yang menghasilkan suatu hasil tertentu, tetapi juga mengedepankan bagaimana aliran proses itu mempertimbangkan kaidah-kaidah ilmiah sehingga arahnya dapat diperkirakan. Itu sebabnya seluruh faktor, seperti fisik lingkungan, sosial dan ekonomi harus dapat dikenali untuk dapat dioptimumkan mengantarkan perubahan seperti yang direncanakan. Perencanaan merupakan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praktik-praktik yang dilandasi teori dalam perspektif kepentingan orang banyak (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Untuk berlangsungnya pembangunan diperlukan syarat dan kemauan untuk dapat memanfaatkan setiap kesempatan bagi keperluan pembangunan. Masyarakat dituntut harus aktif dalam memecahkan masalah serta bersikap terbuka bagi pikiran-pikiran dan usaha baru. Disamping itu diperlukan adanya kelompok-kelompok yang kreatif. Selanjutnya diperlukan adanya ketersediaan modal yang cukup (Soekanto, 2004).

Pembangunan adalah suatu perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan pada norma-norma tertentu. Perubahan ini direncanakan dengan potensi alam, manusia, dan sosial budaya. Adapun hakekat pembangunan adalah proses mederenisasi yang menghantarkan masyarakat dan negara ke arah kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan pada dasarnya ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut; (1) Merupakan suatu proses perubahan terus menerus yang melibatkan seluruh masyarakat (2) Proses pembangunan erat kaitannya dengan IPTEK dan (3) Pembangunan mempunyai tujuan menghantarkan manusia dan masyarakat ke arah yang lebih baik dan layak (Chambers, 1982).

Istilah pembangunan desa berdasarkan Kertas Kerja Bank Dunia Tentang Pembangunan Pedesaan (1975) yaitu suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi kelompok masyarakat tertentu dan warga desa yang miskin. Strategi ini mengandung pemerataan manfaat pembangunan kepada golongan termiskin diantara mereka yang mencari kehidupan di daerah pedesaan. Kelompok ini mencakup para petani kecil, petani penyewa dan yang tidak memiliki tanah (Chambers, 1982).

Program pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal dilaksanakan dengan tujuan yaitu (Sumodiningrat, 1997) :

1. Meningkatkan akses pemasaran dan mengurangi isolasi wilayah
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. Menciptakan lapangan kerja di desa terutama pada saat musim kemarau
4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan desa dan masyarakat
5. Meningkatkan keterampilan masyarakat desa dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana.

Sasaran pembangunan perdesaan pada tahun 2008 adalah terciptanya perluasan kesempatan kerja di perdesaan terutama lapangan kerja baru di bidang kegiatan agribisnis *off-farm* dan industri serta jasa berskala kecil dan menengah. Sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan dibangunnya prasarana transportasi akan mempengaruhi

aksesibilitas penduduk yang selanjutnya akan membuka kesempatan kerja di wilayah tersebut (Purwantini dan Rivai, 2008).

Dengan adanya pembangunan prasarana transportasi berdampak pada mobilitas masyarakat meningkat, waktu tempuh dan biaya transportasi ke beberapa fasilitas (perekonomian, pemerintahan, kesehatan dan pendidikan) menurun. Kesempatan kerja semakin banyak dengan adanya bangunan jalan P2D. Pemasaran hasil pertanian maupun hasil industri semakin mudah. Dampak terhadap pendapatan rata-rata rumah tangga meningkat baik secara absolut maupun riil. Secara tidak langsung jalan P2D berdampak positif terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan dengan adanya bangunan sarana transportasi (P2D) rata-rata masyarakat sasaran relatif lebih sejahtera dibanding sebelumnya (Purwantini dan Rivai, 2008).

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya sebuah strategi pembangunan sekarang telah diterima bahkan telah berkembang dewasa ini. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang semakin besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi (Kartasasmita, 1996).

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini tidak mampu untuk melepaskan dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan diri dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1996).

Istilah “pemberdayaan” diadopsi dari istilah *empowerment* yaitu sebuah konsep yang lahir dari sebagian perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat. Menurut Pranarka *cit* Sutrisno (2003) proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu, (1) Kecenderungan primer yaitu pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya, (2) Kecenderungan sekunder yaitu pemberdayaan yang menekankan

pada proses menstimulasi, mendorong atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat, dalam kerangka pembangunan upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa sisi pandang yaitu :

- (1) Menciptakan suasana atau iklim usaha yang memungkinkan masyarakat berkembang
- (2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui pemberian bantuan, pelatihan, pembangunan sarana fisik dan sosial
- (3) Melindungi melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah berlangsungnya persaingan yang tidak seimbang namun diupayakan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan (Soemodiningrat, 1997).

Menurut Sumodiningrat (1997) *cit* Osesi (2007), pemberdayaan adalah upaya mengembangkan potensi setiap masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan dalam konteks pembangunan pertanian bertujuan untuk menuju pertanian yang tangguh. Pertanian yang tangguh menurut Kasryono *cit* Soekartawi (2003), adalah pertanian yang secara dinamis dan ulet mampu secara optimal memanfaatkan sumberdaya tenaga kerja dan teknologi yang ada pada lingkungan fisik sosial dimana tempatnya berpijak dan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani dalam arti luas.

Dalam konteks pembangunan, pembangunan masyarakat dengan berbasis kepada pemberdayaan dan pendekatan partisipatif menjadi urgen untuk di implementasikan. Pembangunan masyarakat diarahkan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sebagai upaya mempercepat peningkatan perkembangan masyarakat (Suparjan, 2003).

Suparjan (2003) menyatakan bahwa paradigma baru pembangunan mengandung beberapa element strategis yaitu; a) Pemberdayaan ekonomi rakyat untuk menciptakan partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan. Jika tidak dilakukan pemberdayaan ekonomi rakyat, maka prestasi apapun yang dicapai oleh kalangan pelaku besar, maka pembangunan ekonomi menjadi rapuh, karena tidak

didukung oleh pilar-pilar yang kokoh. Dengan pemberdayaan ekonomi rakyat maka partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan akan menjadi suatu kekuatan yang tak perlu di mobilisasi, b) Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi. Strategi ini menjadi mutlak dilakukan dalam menghadapi persaingan keras di alam globalisasi dan era perdagangan bebas, c) Penciptaan pemerintahan yang bersih dan efisien, d) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mendorong secara efektif untuk menghapus kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, e) Memasukkan tolak ukur moral dan spiritual dalam mengukur keberhasilan pembangunan baik ditingkat mikro maupun makro.

Asumsi yang dibangun dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat ini adalah melihat komunitas sebagai suatu unit kerja. Kegiatan didasarkan pada prakarsa lokal, sumber-sumber lokal dan kepemimpinan lokal. Pendek kata pembangunan masyarakat berarti menaruh kepercayaan kepada kemampuan yang ada padanya. Kondisi ini akan menciptakan daya gerak dalam diri masyarakat sehingga secara terus menerus akan bergerak membangun dirinya secara mandiri. Adanya kemandirian dari masyarakat berarti mengurangi ketergantungan mereka dengan pihak luar (Suparjan, 2003).

Esensi yang terkandung dalam pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya tidak sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, namun lebih dari itu pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membentuk kemandirian mereka, sehingga dapat mengatasi permasalahannya sendiri (Suparjan, 2003).

Menurut Sutrisno (2003), karakteristik pemberdayaan masyarakat merupakan suatu gerakan yang diarahkan kepada 2 komponen yaitu penggerak dan masyarakat yang digerakkan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan kelembagaannya. Disamping itu pemberdayaan masyarakat berorientasi kepada membangun masyarakat bercirikan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Konsep pemberdayaan menjadi basis utama dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan mereka untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Konsep utama yang terkandung dalam

pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya (Suparjan, 2003).

Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pemberdayaan masyarakat adalah; (1) Pengembangan organisasi kelompok-kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat, (2) Pengembangan jaringan strategis antar kelompok masyarakat yang terbentuk, (3) Kemampuan kelompok masyarakat dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi pasar, permodalan, teknologi, manajemen, (4) Jaminan atas hak-hak masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, (5) Pengembangan kemampuan teknis dan manajerial kelompok masyarakat sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik; (6) Mampu terpenuhinya kebutuhan hidup dan meningkatnya kesejahteraan hidup mereka serta mampu menjamin kelestarian daya dukung lingkungan bagi pembangunan (Karsidi, 2003).

Proses pemberdayaan pada dasarnya tidak sekedar mengubah masyarakat dari objek menjadi subjek, akan tetapi didalamnya juga menyiratkan perubahan dari sisi pemerintah. Peran pemerintah harus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu mengantisipasi masa depan. Dalam konteks ini peran aparat pemerintah harus lebih diarahkan sebagai alat pelayanan kepada pemerintah. Selain itu aparat pemerintah harus lebih sebagai tokoh pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibandingkan sebagai sebuah kantor unit birokrasi (Suparjan, 2003).

Suparjan (2003) juga menambahkan konsep pemberdayaan sebenarnya merupakan proses belajar yang menekankan orientasi pada proses serta keterlibatan masyarakat. Hasil yang diharapkan proses pemberdayaan adalah tumbuhnya kompetensi masyarakat. Kompetensi tanggung jawab memiliki arti bahwa tanggung jawab perkembangan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri. Sementara terkait dengan kompetensi kapasitas, terkait dengan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan diri.

Upaya pemberdayaan masyarakat petani ini tidak sama atau tidak hanya berupa tindakan memberi bantuan finansial semata-mata. Praktek pemberdayaan rakyat adalah lebih berupa tindakan konkret yang dapat meningkatkan kemampuan (kualitas) sumberdaya manusia. Selain itu praktek pemberdayaan rakyat adalah merupakan upaya membuka pengertian atau kesadaran yang lebih luas tentang hak dan kewajiban rakyat sebagai warga negara yang merdeka (Suparno, 1994 *cit* Osesi, 2007).

2.4 Konsep Partisipasi Masyarakat

Syahyuti *cit* Supadi (2008) mengemukakan, partisipasi diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, karena pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada proses sosial. Tiga aspek masyarakat yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan harus diintegrasikan di mana individu dan lembaga saling berperan agar terjadi perubahan. Dalam konteks pembangunan, partisipasi telah diterima sebagai alat yang esensial.

Secara sederhana, partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan dalam sesuatu yang ditawarkan. Tindakan masyarakat untuk berpartisipasi tidak lepas dari kemampuan diri serta perhitungan untung rugi. Dalam keadaan sewajarnya, masyarakat tidak akan melakukan hal-hal di luar kemampuannya atau yang merugikan dirinya. Kemampuan petani berkaitan dengan situasi lingkungan serta keadaan yang melekat pada dirinya (Supadi, 2008).

Pengertian partisipasi menurut Robert Chambers adalah partisipasi dalam arti bahwa masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan proses. Menurut Pretty *et al*, partisipasi adalah proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya. Pengertian partisipasi (*participation*) adalah pengambilan bagian, pengikutsertaan. Dengan demikian, pengertian partisipasi adalah pengambilan bagian/pengikutsertaan atau masyarakat terlibat langsung dalam setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) sampai pada *monitoring* dan evaluasi (*controlling*) selanjutnya disingkat dengan POAC (Daniel, 2006).

Menurut Adjid *cit* Supadi (2007), partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat (sebagai individu yang berada dalam suatu kelompok tani) dalam proses pengelolaan usahatani dengan menggunakan teknologi anjuran secara sukarela dan sadar untuk mewujudkan kepentingan atau rencana bersama. Atau partisipasi adalah manifestasi dari perilaku seseorang atau sekelompok masyarakat dalam mewujudkan peranannya sesuai dengan harapan dari masyarakat yang melakukan tindakan sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat secara sukarela dan sadar sehingga menimbulkan kemandirian usaha pada diri petani.

Menurut Hawkins (1999), partisipasi masyarakat di dalam perencanaan, penerapan, dan pengevaluasian program penyuluhan memang diperlukan karena memiliki informasi yang dapat meningkatkan mutu program-program tersebut, karena partisipasi tersebut meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja sama dan menambah kesempatan untuk pengambilan keputusan kolektif. Partisipasi itu juga meningkatkan kekuatan masyarakat untuk mempengaruhi nasib mereka sendiri. Keputusan-keputusan yang jelas harus menjadi tujuan petani dan wakil-wakilnya.

Selanjutnya Hawkins (1999) menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa masyarakat dianjurkan berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan program penyuluhan antara lain :

1. Mereka memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang berhasil, termasuk tujuan, situasi, pengetahuan serta pengalaman mereka dengan teknologi dan penyuluhan, serta struktur sosial masyarakat mereka
2. Mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dalam program penyuluhan jika ikut bertanggung jawab di dalamnya
3. Masyarakat yang demokratis secara umum menerima bahwa rakyat yang terlibat berhak berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan yang ingin mereka capai
4. Banyak permasalahan pembangunan pertanian yang tidak mungkin lagi dipecahkan dengan pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam pengambilan keputusan kolektif sangat dibutuhkan.

Pendekatan partisipatif memberikan keuntungan, antara lain; orang-orang akan lebih energik, lebih komit, dan lebih bertanggung jawab bila mereka mengontrol lingkungan sendiri dibanding hal itu dilakukan oleh suatu “kewenangan” dari luar. Komitmen dan tanggung jawab dalam berpartisipasi adalah (1) Masyarakat lebih punya komitmen terhadap anggotanya daripada sistem pelayanan terhadap kliennya, (2) Masyarakat lebih mengerti masalah-masalahnya daripada para profesional pelayanan, (3) Masyarakat lebih fleksibel dan kreatif daripada birokrasi besar, (4) Masyarakat lebih mudah daripada profesional pelayanan, (5) Masyarakat lebih efektif menguatkan standar sikap/perilaku daripada birokrasi atau para profesional pelayanan, (6) Lembaga-lembaga dan para profesional menawarkan pelayanan, masyarakat menawarkan kepedulian, (7) Sistem pelayanan berfokus pada apa yang kurang, masyarakat berfokus pada kapasitas (Daniel, 2006).

Selanjutnya Daniel (2006) menjelaskan, partisipasi bukanlah proses alami, tetapi melalui proses pembelajaran sosialisasi. Ada beberapa bentuk partisipasi, antara lain :

- ❖ Inisiatif/spontan yaitu masyarakat secara spontan melakukan aksi bersama. Ini adalah bentuk partisipasi paling alami. Bentuk partisipasi spontan ini sering terjadi karena termotivasi oleh suatu keadaan yang tiba-tiba, seperti bencana atau krisis.
- ❖ Fasilitasi yaitu suatu partisipasi masyarakat disengaja, yang dirancang dan didorong sebagai proses belajar dan berbuat oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah bersama.
- ❖ Induksi yaitu masyarakat dibujuk berpartisipasi melalui propaganda atau mempengaruhi melalui emosi dan patriotisme.
- ❖ Koptasi yaitu masyarakat dimotivasi untuk berpartisipasi untuk keuntungan-keuntungan materi dan pribadi yang telah disediakan untuk mereka.
- ❖ Dipaksa yaitu masyarakat berpartisipasi di bawah tekanan atau sanksi-sanksi yang dapat diberikan penguasa.

Bentuk partisipasi yang diharapkan adalah inisiatif/spontanitas, namun sering tidak terjadi, sehingga diperlukan upaya dari luar. Memilih proses dipaksa, induksi, koptasi, hasilnya akan relatif bersifat sementara. Dan partisipasi tidak akan banyak bermanfaat bagi masyarakat yang paling baik adalah melalui fasilitasi. Dengan fasilitasi, masyarakat diposisikan sebagai dirinya sendiri, sehingga dia termotivasi untuk berpartisipasi dan berbuat sebaiknya untuk keuntungan dirinya (Daniel, 2006).

2.5 Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu.

Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pekerjaan Umum, telah melakukan berbagai upaya penanganan masalah kemiskinan di perkotaan. Salah satu diantaranya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan sejak Tahun 1999. Program ini merupakan sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program P2KP sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*sosial capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Dalam Pedum P2KP (2005), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) memiliki tujuan yaitu:

1. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi

- pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya.
2. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (Modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat yaitu BKM.
 3. Mengedepankan peran pemerintah kota/kabupaten agar mereka mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.

Pada dasarnya, kelompok sasaran P2KP mencakup empat sasaran utama, yaitu; 1) Masyarakat, 2) Pemerintah daerah, 3) Kelompok peduli setempat, 4) Para pihak terkait /stakeholders (Pedum P2KP, 2005).

Menurut Pedum P2KP (2005), lokasi sasaran P2KP yaitu berdasarkan seleksi pemilihan yang dilakukan dengan menggunakan data dasar yang sama, seperti Kelompok Desa (Pokdes) 2003 yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik selaku instansi yang berwenang dibidang statistik (UU No. 16 Tahun 1997).

Dari hasil pelaksanaannya, tampak perkembangan yang positif, khususnya dalam hal terwujudnya kelembagaan masyarakat lokal yang mandiri, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan ini dipercaya sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan sebagai pemeduli terhadap kemiskinan di komunitasnya. Membangun kelembagaan masyarakat yang mengakar perlu dilakukan, agar setelah masa program P2KP berakhir, upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat (Pedum P2KP, 2005).

Meskipun demikian, dari hasil evaluasi pelaksanaan P2KP maupun kajian refleksi kritis yang dilakukan secara intensif serta masukan-masukan dari berbagai pihak, disadari bahwa masih terdapat berbagai hal yang belum diakomodasi dalam konsep dan strategi pelaksanaan P2KP yang ada saat ini, sehingga memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut. Penyempurnaan tersebut ditekankan pada keyakinan dasar P2KP bahwa persoalan kemiskinan sebenarnya hanya dapat ditanggulangi oleh masyarakat sendiri yang mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Sehingga cukup jelas bahwa faktor kapasitas dan kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah menempati posisi yang sangat strategis dalam penyiapan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan maupun pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman (Pedum P2KP, 2005).

Guna mendukung peningkatan kapasitas dan kesiapan masyarakat tersebut, strategi pelaksanaan P2KP dititikberatkan pada proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat serta pemerintah daerah agar mampu melaksanakan dan melakukan proses transformasi sosial dari masyarakat miskin/tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya, dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri dan akhirnya dari masyarakat mandiri mampu menuju tatanan masyarakat madani (*civil society*) (Pedum P2KP, 2005).

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu, infrastruktur, sosial, dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Rangkaian proses pemberdayaan ini dilakukan melalui komponen program sebagai berikut :

- 1) Komponen pengembangan masyarakat, mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendorong rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat, dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator

terutama pada saat awal pemberdayaan, dan relawan masyarakat adalah utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

- 2) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), komponen BLM adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.
- 3) Peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal. Komponen peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan yang terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.
- 4) Bantuan pengelolaan dan pengembangan program. Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program (Pedum P2KP, 2005).

Dengan demikian desain Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) distrukturisasi sedemikian rupa untuk menjamin partisipasi dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan tingkat lokal berdasarkan alokasi sumberdaya yang tersedia, sehingga P2KP dengan partisipasi atau keterlibatan memiliki kaitan yang sangat erat. Pelaksanaan kegiatan P2KP oleh masyarakat sebaiknya dilakukan dengan padat karya, yang menekankan mekanisme gotong royong serta kontribusi keswadayaan masyarakat dalam pendanaan, barang, tanah, tenaga serta kontribusi keswadayaan lainnya. Dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatan P2KP masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan sendiri, karena dalam pelaksanaan kegiatan P2KP tersebut diperlukan adanya gotong-royong yang lebih

dikenal dengan partisipasi masyarakat, yaitu suatu kesadaran yang timbul dari dalam diri setiap individu. Sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana akan terlaksana baik sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan berdasarkan Petunjuk dan Teknis P2KP (Pedum P2KP, 2005).

2.6 Rujukan Penelitian Terdahulu

Desi Anita, (2005) yang berjudul "Peran Serta Masyarakat Melalui Sistem BPLM Dalam Pembangunan Agribisnis di Pedesaan". Tujuan penelitian ini untuk melihat pelaksanaan program BPLM dan melihat peran serta anggota kelompok penerima BPLM terhadap dana BPLM. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan program BPLM di Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun untuk penyaluran dana ke kelompok masyarakat sedikit terlambat dari waktu yang telah ditentukan karena adanya administrasi yang memerlukan waktu untuk penyelesaiannya sebelum diajukan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Peran serta anggota kelompok tani penerima dana BPLM terhadap program BPLM termasuk kategori tinggi dengan persentase 89,75% dimana sebanyak 89,75% sejumlah 80 orang anggota kelompok berperan sangat tinggi terhadap program. Hal ini disebabkan sosialisasi, kegiatan seleksi serta penyaluran dan pencairan dana dilaksanakan oleh tim teknis dan dinas terkait sehingga anggota kelompok menerima apa yang sudah menjadi ketentuan dalam kegiatan tersebut.

Syahrial, (2008) yang berjudul "Efektifitas Modal Dana Bergulir Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang". Tujuan penelitian ini untuk melihat efektifitas pinjaman modal dana bergulir dan sistem pengelolaannya dalam mengatasi persoalan kemiskinan pada dua kelurahan di Kota Padang. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kegiatan P2KP dalam pemberian modal dana bergulir dan sistem pengelolaannya dalam mengatasi persoalan kemiskinan sudah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Namun efektifitas pinjaman modal dana secara bergulir belum mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin di dua kelurahan yang diteliti. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pinjaman modal dana bergulir tidak sesuai dengan usulan atau kebutuhan anggota kelompok, karena sangat terkesan pinjaman modal

dana bergulir hanya mengejar banyak KK miskin yang meminjam, penyamarataan dan penyeragaman jumlah pinjaman, yakni Rp 500.000,- per KK, yang digunakan sebagai tambahan modal usaha.

Dari beberapa penelitian terdahulu maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah; 1) Melihat bagaimana peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusinya terhadap proses pengimplementasian dari program pemberdayaan tersebut, 2) Melihat manfaat dari program-program pemberdayaan masyarakat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan memberikan kemandirian kepada masyarakat agar pendapatannya meningkat dan hidupnya menjadi lebih sejahtera.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan P2KP terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana pendukung pertanian yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan penelitian terdahulu fokus dalam mendeskripsikan proses pengimplementasian dana bergulir dalam memberikan pinjaman kepada anggota kelompok masyarakat dalam menambah modal usaha.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Pemilihan Desa Tanjung Rejo sebagai tempat penelitian adalah karena desa tersebut merupakan salah satu desa penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) paling banyak dibandingkan dengan Desa Cinta Damai (Lampiran 2). Desa Tanjung Rejo ini merupakan desa yang paling banyak penduduk miskinnya dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Percut Sei Tuan (Lampiran 3).

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan terhitung semenjak bulan April-Juni 2010.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*), yaitu penelitian tentang suatu objek penelitian yang berkenaan dengan suatu fakta yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Nazir, 2003). Studi kasus ditujukan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Kasus pada penelitian ini adalah mengenai kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian dan keterlibatan masyarakat dalam P2KP di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Populasi adalah total semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung maupun pengukuran, kuantitatif ataupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas (Sudjana, 1982). Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian dan keterlibatan masyarakat dalam P2KP di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang berjumlah 670 orang.

Dari jumlah populasi diatas, maka teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive, yaitu orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1. Responden Penelitian Pada Pelaksanaan Kegiatan P2KP Dalam Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian

No	Nama Kegiatan P2KP Dalam Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian	Jumlah Masyarakat sasaran	Jumlah Responden dari populasi
1	Kegiatan Pembangunan Jalan	160	16
2	Kegiatan Pembangunan Jembatan	390	39
3	Kegiatan Pembangunan Drainase	120	12
Total		670	67

Sumber : Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan P2KP, 2007.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Daniel (2003), menjelaskan bahwa pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data (primer) untuk keperluan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dicapai, maka dibutuhkan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung secara mendalam dengan ketua BKM, ketua panitia KSM, Kepala Desa Tanjung Rejo, dan masyarakat yang disertai dengan pengisian daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah disiapkan sebelumnya.

Data primer yang dikumpulkan adalah :

- Identitas masyarakat yang menginformasikan tentang umur, pendidikan, jenis kelamin, dan mata pencaharian.
- Identitas pengurus BKM yang mencakup umur, pendidikan, jenis kelamin, dan jabatan.
- Mengukur keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian. Informasi yang akan dicari adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian seperti: pembuatan proposal usulan kegiatan,

musyawarah penyusunan rencana pengadaan bahan dan alat, pengambilan keputusan, pembersihan jalan, pengerasan jalan dengan sirtu, pengorekan pondasi, pengecoran pondasi, penggalian tanah, pemasangan batu bata, dan plesteran.

- d. Mengetahui manfaat apa yang dirasakan masyarakat setelah terjadinya pembangunan prasarana pendukung pertanian tersebut. Informasi yang akan dicari adalah dilihat dari kemudahan masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian mereka, terjadinya peningkatan sarana transportasi, percepatan waktu yang dirasakan masyarakat, sebagai penghubung jalan, mencegah terjadinya banjir, dan memperlancar saluran air. Untuk lebih jelasnya jumlah *key informan* yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Jumlah Key Informan Dalam Penelitian

No.	Key informan	Jumlah (Orang)	Jabatan
1.	BKM	1	Ketua BKM
2.	Panitia KSM	1	Ketua KSM
3.	Aparat Desa	1	Lurah Desa Tanjung Rejo
Jumlah		3	

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian yaitu, dari Kantor Camat Percut Sei Tuan, Kantor Kepala Desa Tanjung Rejo, Kantor BKM Tanjung Rejo, Badan Pusat Statistik, dan Dokumen-dokumen yang terkait dengan program P2KP, dan Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian di Desa Tanjung Rejo, serta studi kepustakaan.

3.5 Variabel Yang Diamati

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan prasarana pendukung pertanian pada Tahun 2007, maka variabel yang diamati adalah :

1. Jenis kegiatan yang dilaksanakan
2. Stakeholder yang ikut melaksanakan kegiatan
3. Waktu pelaksanaan kegiatan

4. Lokasi pelaksanaan kegiatan

5. Proses pelaksanaan kegiatan

3.5.2 Mengukur dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian, maka variabel yang diamati antara lain :

3.5.2.1 Perencanaan :

1. Kegiatan peningkatan kualitas jalan :

- a. Pembuatan proposal usulan
- b. Musyawarah menyusun rencana pengadaan bahan dan alat
- c. Pengambilan keputusan

2. Kegiatan pembangunan jembatan :

- a. Pembuatan proposal usulan
- b. Musyawarah menyusun rencana pengadaan bahan dan alat
- c. Pengambilan keputusan

3. Kegiatan pembangunan drainase:

- a. Pembuatan proposal usulan
- b. Musyawarah menyusun rencana pengadaan bahan dan alat
- c. Pengambilan keputusan

3.5.2.2 Pelaksanaan kegiatan :

1. Kegiatan peningkatan jalan :

- a. Pembersihan jalan
- b. Pengerasan jalan dengan sirtu

2. Kegiatan pembangunan jembatan :

- a. Pengorekan pondasi
- b. Pengecoran pondasi

3. Kegiatan pembangunan drainase :

- a. Penggalian tanah
- b. Pemasangan batu bata
- c. Pelesteran

3.5.3 Mengetahui Manfaat apa yang dirasakan masyarakat setelah terjadinya pembangunan prasarana pendukung pertanian di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, maka variabel yang diamati antara lain :

1. Kegiatan peningkatan kualitas jalan :
 - a. Mempermudah mengangkut hasil pertanian
 - b. Peningkatan sarana transportasi
 - c. Percepatan waktu
2. Kegiatan pembangunan jembatan :
 - a. Menjadi penghubung jalan
 - b. Mempermudah transportasi masuk ke lahan pertanian.
 - c. Percepatan Waktu
3. Kegiatan pembangunan drainase :
 - a. Mencegah terjadinya banjir
 - b. Memperlancar saluran air

Untuk lebih jelasnya mengenai variabel yang diamati dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada lampiran 1, mengenai matriks data set penelitian.

3.6 Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, dan deskriptif kuantitatif. Karena dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, akan diperoleh gambaran secara jelas dan spesifik mengenai pelaksanaan program pembangunan prasarana pendukung pertanian. Sedangkan analisa secara deskriptif kuantitatif adalah dengan menggunakan metode skor untuk mengukur dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian.

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan prasarana pendukung pertanian di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dengan jelas jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, stakeholder yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian, waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan

prasarana pendukung pertanian, alasan dilakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana pendukung pertanian, serta cara pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian itu sendiri.

2. Mengukur dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Maka analisa dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metoda skor. Skor dibuat berdasarkan panduan penskoran yang telah ditentukan untuk mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian di Desa Tanjung Rejo, dengan cara perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Tingkat Keterlibatan} = \frac{\text{Total skor yang diperoleh}}{\text{Total skor yang diharapkan}} \times 100 \%$$

Dari jumlah skor yang didapat, maka tingkat keterlibatan masyarakat yang diperoleh ditentukan berdasarkan kategori sebagai berikut:

- Tingkat keterlibatan tinggi, jika nilai yang diperoleh : 66-100 %
 - Tingkat keterlibatan sedang, jika nilai yang diperoleh : 33-65 %
 - Tingkat keterlibatan rendah, jika nilai yang diperoleh : 0-32 %
3. Mengetahui manfaat apa yang dirasakan masyarakat setelah terjadinya pembangunan prasarana pendukung pertanian tersebut di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Maka analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan manfaat yang dirasakan masyarakat Desa Tanjung Rejo, berdasarkan jenis kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian yang telah dilaksanakan.

3.7 Defenisi Operasional

- 1) Pembangunan prasarana pendukung pertanian dalam kegiatan P2KP adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat di suatu desa, sehingga pembangunan tersebut mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- 2) Prasarana pendukung pertanian adalah merupakan suatu fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pertanian, sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani.
- 3) Pelaksanaan pembangunan prasarana pendukung pertanian adalah aktualisasi dan rencana yang telah disusun untuk memperoleh usaha, memperbaiki, dan meningkatkan fungsi serta kemampuan prasarana pendukung pertanian.
- 4) Sosialisasi program P2KP adalah merupakan penyebaran informasi tentang kegiatan Tridaya P2KP, yaitu fisik, sosial, dan ekonomi. yang akan diberikan kepada masyarakat atau sasaran.
- 5) Pelaksanaan P2KP adalah persiapan program mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan program yang akan dilaksanakan masyarakat atau sasaran.
- 6) Prasarana pembangunan kegiatan pendukung pertanian merupakan tiga kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian yang dilakukan oleh Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), yaitu kegiatan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan drainase.
- 7) Keterlibatan masyarakat adalah keterlibatan semua pihak (ketua BKM, ketua KSM, dan masyarakat yang ikut dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan, jembatan, dan drainase. Seperti keterlibatan semua pihak dalam, persiapan alat-alat yaitu cangkul, skop, benang, timba, kereta sorong, meteran, dan jetor. Dan keterlibatan semua pihak dalam penyediaan bahan seperti : semen, pasir, kerikil, besi, tepas paku, kawat besi, broti, kayu, dan batu bata.
- 8) Manfaat adalah merupakan hasil dari suatu kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian yang dapat dimanfaatkan, dirasakan atau dinikmati hasilnya oleh masyarakat Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan kebutuhan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Letak Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Luas wilayah Desa Tanjung Rejo yaitu 3086 Ha. Desa Tanjung Rejo ini terletak 10 Km dari Ibu Kota Kecamatan Percut Sei Tuan dan jarak Desa Tanjung Rejo ke Ibu Kota 50 Km dari Ibukota Kotamadya. Secara administrasi batas wilayah Desa Tanjung Rejo adalah:

- a) Sebelah Utara : Selat Malaka
- b) Sebelah Selatan : PTPN Saentis
- c) Sebelah Barat : Desa Tanjung Selamat
- d) Sebelah Timur : Desa Percut

Secara topografi, Desa Tanjung Rejo terletak di daerah dataran rendah, dengan ketinggian 0,5 m dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata per Tahun 200 mm dengan suhu rata-rata 33° C.

Dari 3086 Ha luas wilayah Desa Tanjung Rejo dipergunakan untuk pemukiman, perkantoran, sekolah, tempat peribadatan, kuburan, jalan, sawah, perkebunan, hutan sekunder, hutan bakau, lapangan sepak bola, tambak. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Desa Tanjung Rejo menurut penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penggunaan Lahan di Desa Tanjung Rejo Tahun 2008.

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	461,1	14,85
2.	Perkantoran	0,1	0,003
3.	Sekolah	1	0,03
4.	Tempat peribadatan	0,5	0,02
5.	Kuburan	21	0,68
6.	Jalan	14	0,45
7.	Sawah	1650	53,14
8.	Perkebunan	200	6,44
9.	Hutan	303,2	9,77
10.	Lapangan sepak bola	4	0,13
11.	Tambak	450	14,49
Jumlah		3104,9	100,00

Sumber : Profil Kelurahan/Desa Tanjung Rejo, 2007.

4.1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2008 adalah sebanyak 8713 jiwa dan tersebar menurut beberapa kelompok umur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel. 4 Jumlah penduduk Desa Tanjung Rejo Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2007

No.	Golongan umur	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 - 12 bulan	130	105	235
2.	13 bulan – 4 tahun	281	230	511
3.	5 – 6 tahun	275	239	514
4.	7 – 12 tahun	400	370	770
5.	13 – 15 tahun	444	390	834
6.	16 – 18 tahun	475	439	914
7.	19 – 25 tahun	500	470	970
8.	26 – 35 tahun	599	598	1197
9.	36 – 45 tahun	464	420	884
10.	46 – 50 tahun	350	380	730
11.	51 – 60 tahun	370	250	620
12.	61 – 75 tahun	200	184	384
13.	Lebih dari 76 tahun	76	74	150
	Jumlah	4564	4149	8713

Sumber : Profil Kelurahan/Desa Tanjung Rejo, 2007.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Tanjung Rejo pada Tahun 2007 tercatat 8713 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh, hanya berselisih 415 jiwa. Jumlah penduduk perempuan di Desa Tanjung Rejo adalah 4149 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki adalah 4564 jiwa pada Tahun 2007. Dari Tabel 4, terlihat penduduk dengan umur yang paling banyak berada pada kelompok umur 26 - 35 tahun yaitu sebanyak 1197 jiwa.

4.1.3 Mata Pencarian Penduduk

Aspek kehidupan lain di bidang sosial ekonomi masyarakat adalah struktur mata pencarian. Struktur mata pencarian penduduk merupakan gambaran berbagai jenis sumber kehidupan statu masyarakat sesuai profesi yang mereka lakukan sehari-hari. Diantara jenis mata pencarian tersebut adalah

pegawai kelurahan, guru, ABRI, mantri kesehatan, bidan, dokter, pensiunan, petani, pedagang, tukang, angkutan, buruh tani, industri. Pada Tabel 5 dapat dilihat komposisi penduduk menurut mata pencaharian penduduk di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Tanjung Rejo Tahun 2007

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pegawai Kelurahan	6	0,1
2.	Guru	170	2,76
3.	ABRI	9	0,15
4.	Mantri Kesehatan	4	0,07
5.	Bidan	3	0,05
6.	Dokter	2	0,03
7.	Pensiunan	7	0,11
8.	Petani	5501	89,22
9.	Pedagang	87	1,41
10.	Tukang	74	1,20
11.	Angkutan	38	0,62
12.	Buruh tani	120	1,96
13.	Industri	145	2,35
	Jumlah	6166	100,00

Sumber : Profil Kelurahan/Desa Tanjung Rejo, 2007.

Berdasarkan Tabel 5, mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Rejo pada umumnya beragam. Peringkat tertinggi bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 5501 orang (89,22%), dan yang lainnya dibawah 2 %.

4.1.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan indikator menentukan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi pada masa sekarang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin mudah menjalankan suatu pembangunan terutama pembangunan pertanian. Pada Tabel 6 berikut, ditunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan/Desa Tanjung Rejo Tahun 2007

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Tidak tamat SD	-	-
2.	Tamat SD	2010	34,82
3.	Tamat SLTP	2218	38,43
4.	Tamat SLTA	1517	26,28
5.	Tamat Perguruan Tinggi	27	0,47
	Jumlah	5772	100

Sumber : Profil Kelurahan/Desa Tanjung Rejo, 2007.

Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Desa Tanjung Rejo adalah tingkatan tamatan SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan penduduk yang tertinggi adalah tamat SLTP (38,43 %), tamat SD (34,82 %), tamat SLTA (26,28 %) dan tamatan perguruan tinggi sebanyak (0,47%).

4.1.5 Sarana dan Prasarana

Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ini memiliki sarana dan prasarana yang meliputi sarana kesehatan, pendidikan, ibadah, keamanan, prasarana olah raga. Sarana yang lengkap sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun berada. Sarana yang lengkap dapat membuka keterisolan suatu daerah. Dibidang ekonomi sarana yang lengkap juga sangat dibutuhkan, agar roda perekonomian masyarakat berjalan dengan lancar dan tercapainya kesejahteraan masyarakat maka diperlukan sarana dan prasarana. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa Tanjung Rejo dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sarana dan Prasarana yang Terdapat Di Desa Tanjung Rejo

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan
1.	Kesehatan	1	Puskesmas 1 unit.
2.	Pendidikan	5	Taman Kanak-Kanak (TK) 1 buah, Sekolah Dasar (SD) 3 buah, dan Sekolah menengah pertama 1 unit.
3.	Ibadah	19	Mesjid 3 unit, Mushallah 13 unit, Gereja 3 unit.
4.	Keamanan	13	Poskamling 13 unit.
5.	Olah Raga	6	Lapangan sepak bola 2 unit, Lapangan bola volley 4 unit
	Jumlah	43	

Sumber : Profil Desa Tanjung Rejo, 2007.

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa pada sarana kesehatan terdapat 1 unit puskesmas. Dalam operasional sarana kesehatan ini dilakukan oleh tenaga medis yang terdiri dari 2 orang dokter, 3 orang bidan desa, dan 4 orang mantri. Sarana pendidikan yang ada di Desa Tanjung Rejo terdiri dari 1 buah Taman Kanak-kanak (TK), dan 3 buah Sekolah Dasar (SD).

Tersedianya sarana pendidikan dari TK sampai SD menandakan adanya partisipasi pemerintah Desa Tanjung Rejo dalam menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Disamping itu sarana pendidikan yang lengkap juga mempermudah anak-anak Desa Tanjung Rejo dalam menuntut ilmu. Hal ini juga dapat meringankan perekonomian masyarakat Desa Tanjung Rejo karena tidak lagi mengeluarkan biaya transportasi yang besar untuk anak-anak mereka sekolah karena jarak tempuh ke sekolah tidak begitu jauh.

Tersedianya sarana ibadah merupakan suatu keharusan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing, dan sebagai wadah untuk bertemu dan saling mempererat tali silaturahmi. Sarana ibadah terdapat sebanyak 19 unit yaitu 3 buah mesjid, 13 mushallah, 3 buah gereja.

Sarana keamanan merupakan cara untuk menjaga kondisi Desa Tanjung Rejo agar terjaga dari perbuatan jahat yang tidak diinginkan masyarakat. Di Desa Tanjung Rejo keamanan desa selalu dijaga pada setiap malam oleh masyarakat dengan cara setiap anggota masyarakat bergiliran untuk menjalankan tugasnya yang sudah disepakati bersama untuk ronda di pos kamling yang sudah ada, yaitu 13 buah.

Dari sarana olah raga yang terdapat di Desa Tanjung Rejo terlihat motivasi masyarakat dalam berolah raga. Masyarakat Desa Tanjung Rejo terutama pemudanya sering mengikuti pertandingan- pertandingan olah raga. Sarana yang tersedia juga terawat dengan baik, yang dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Sarana olah raga terdapat sebanyak 6 unit yaitu terdiri dari 2 buah lapangan sepak bola, dan 4 buah lapangan bola volley.

4.1.6 Identitas Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tanjung Rejo. Karakteristik sampel dilihat dari umur (tahun), jenis kelamin, tingkat pendidikan.

Untuk lebih jelasnya gambaran karakteristik responden dalam penelitian ini terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Identitas Masyarakat Sampel

No.	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Umur masyarakat (tahun):		
	a. 25 – 35	24	35,82
	b. 36 – 46	27	40,29
	c. 47 – 57	16	23,88
2.	Jenis Kelamin:		
	a. Perempuan	6	8,95
	b. Laki-Laki	61	91,04
3.	Tingkat Pendidikan:		
	a. SD	18	26,86
	b. SLTP	17	25,37
	c. SLTA	24	35,82
	d. PT	8	11,94

Masyarakat merupakan sebagai penggerak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian tersebut dan sebagai penentu dalam mencapai suatu keberhasilan. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki keterampilan dan kemandirian sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat, juga peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas usaha pertaniannya.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa umur masyarakat yang paling banyak di Desa Tanjung Rejo dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian adalah berkisar 36- 46 tahun yaitu sekitar 27 orang (40,29%) dari keseluruhan sampel penelitian. Sebanyak 24 orang (35,82 %) yang berumur 25 – 35 tahun, selebihnya sebanyak 16 orang (23,88 %) yang berumur 47 – 57 tahun. Umur masyarakat akan mempengaruhi kemampuan fisik dan cara berpikir, karena masyarakat yang lebih muda akan memiliki tenaga yang lebih kuat dan lebih cepat bergerak dalam melakukan aktivitasnya. Sedangkan masyarakat yang berumur lebih tua biasanya akan berpikir lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan.

Tingkat pendidikan biasanya akan lebih mudah untuk mempengaruhi seseorang, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan

semakin mudah dan kritis dalam menerima informasi dan menanggapi permasalahan yang dihadapi. Dari hasil penelitian terlihat bahwa rata-rata masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Pada Tabel 8 terlihat bahwa sebanyak 17 orang masyarakat sampel memiliki pendidikan terakhir setingkat SLTP, yaitu sebesar (25,37%) dari keseluruhan sampel penelitian. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTA sebanyak 24 orang (35,82%), dan pendidikan tingkat SD yaitu sebanyak 18 orang (26,86%). Untuk masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi hanya 8 orang yaitu sebesar (11,94%).

4.2 Profil P2KP

Program Penanggulangan Kemiskinan perkotaan (P2KP) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Pemerintah menjadikan P2KP ini adalah sebagai salah satu program yang diharapkan mampu mengatasi segala persoalan-persoalan yang mengakibatkan kemiskinan di perkotaan. Salah satu contoh, P2KP ini telah dilaksanakan di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tahun 2007-2008. Kegiatan pelaksanaan pembangunan prasarana pendukung pertanian yang dilaksanakan oleh Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ini adalah merupakan suatu kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti kegiatan dalam aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan dalam ketiga aspek tersebut merupakan sebagai acuan dalam mengendalikan pencapaian tujuan kegiatan dari P2KP. Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ini disusun oleh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

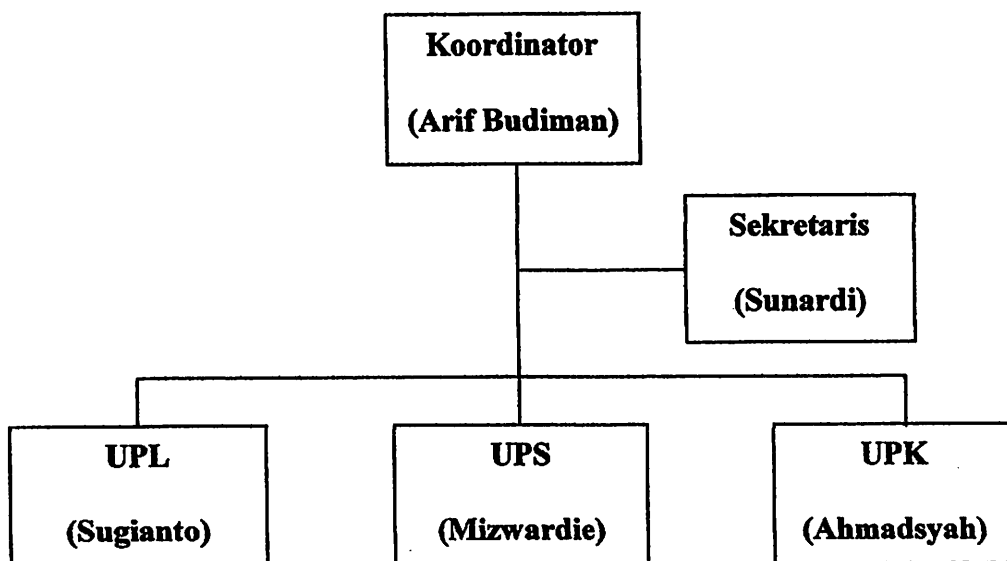
Di Desa Tanjung Rejo kegiatan P2KP mulai dilaksanakan pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008. Awal masuk P2KP ke Desa ini yaitu pada Tahun 2006, kemudian mulai disosialisasikan pada Tahun 2006 dan diikuti dengan berbagai kegiatan yang bersifat membangun kemandirian masyarakat serta membantu meringankan beban hidup masyarakat Desa Tanjung Rejo. Masuknya

P2KP ke Desa Tanjung Rejo ini yaitu dikarenakan kondisi wilayah Desa Tanjung Rejo tersebut mempunyai jumlah penduduk yang hampir padat seperti daerah perkotaan, dan masyarakatnya juga telah mengarah pada kemoderenisasian.

4.3 Struktur Organisasi BKM Di Desa Tanjung Rejo

Program P2KP dikelola oleh suatu organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM adalah suatu organisasi yang bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat dan membantu masyarakat dalam membangun untuk mewujudkan kemandirian serta kebutuhan masyarakat. BKM terdiri dari beberapa penanggungjawab yang tergabung dalam suatu organisasi. Anggota BKM dipilih oleh seluruh utusan-utusan warga setempat dengan kriteria, kualitas, dan sifat kemanusiaan. Mekanisme pemilihan dilakukan tanpa kampanye, tanpa pencalonan serta secara tertulis dan rahasia.

Utusan masyarakat untuk anggota BKM ini ditentukan sebanyak 2 % dari jumlah seluruh penduduk desa. Masa pengabdian BKM di Desa Tanjung Rejo adalah 2 tahun. Sejauh ini pergantian anggota BKM atau pengurus BKM di Desa Tanjung Rejo telah dilakukan 1 kali pergantian anggota BKM yaitu pada jabatan sekretaris. Adapun jabatan-jabatan dalam struktur organisasi BKM Tanjung Rejo terlihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Struktur organisasi BKM Bina Sejahtera
Sumber: BKM Tanjung Rejo, 2007.

Dilihat dari struktur organisasinya sub bidang fungsional BKM memiliki beberapa bagian yang terdiri dari koordinator BKM, sekretaris BKM, unit Pengelola Lingkungan (UPL), unit Pengelola Sosial (UPS), unit Pengelola Keuangan (UPK).

BKM Bina Sejahtera berkedudukan di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. BKM ini didirikan pada hari Rabu tanggal 15 November 2006 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. BKM ini adalah perkumpulan yang merupakan lembaga pimpinan milik semua warga desa yang berazaskan pancasila dengan landasan dan dasar filosofis lembaga ini yaitu memberdayakan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan.

Kegiatan BKM mencakup kegiatan di bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan pemukiman. BKM terdiri dari 9 orang. Kemudian BKM memiliki sekretariat yang biasanya digunakan sebagai pelaksana teknis harian yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pada pelaksanaan kegiatannya BKM Bina Sejahtera wajib membentuk unit pengelola, seperti: Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Keuangan (UPK), selain itu dari kesekretaratan BKM Bina Sejahtera selama ini adalah menyusun agenda rapat, membuat dan menyebarkan surat undangan, bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat, memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM ataupun pihak lain yang berkepentingan, mencatat administrasi keuangan operasional BKM Bina Sejahtera dan mencatat pengelolaan BLM, dan melaporkan administrasi keuangan kepada BKM Bina Sejahtera secara berkala. Semua kegiatan ini ditetapkan oleh BKM Bina Sejahtera sendiri.

4.4 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian di Desa Tanjung Rejo Tahun 2007

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan sebagai gerakan bersama yang membangun kemandirian dan pembangunan berkelanjutan yang diyakini, akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku individu ke arah yang lebih baik. Rancangan P2KP distrukturisasi sedemikian rupa untuk menjamin partisipasi dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama

berdasarkan sumber daya manusia yang ada. P2KP hanya akan efektif bila dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah daerah dan di dukung oleh kelompok peduli setempat, sehingga peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan P2KP sangat penting dalam menjamin keberlanjutan penanggulangan kemiskinan di Desa Tanjung Rejo.

Kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian yang diajukan oleh masyarakat merupakan kegiatan yang dijalankan selama Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008. Kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian tersebut meliputi kegiatan peningkatan kualitas jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan drainase. Berikut akan dijelaskan apa saja kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian di Desa Tanjung Rejo. Berikut Tabel 9 identitas proyek P2KP dalam pembangunan prasarana pendukung pertanian.

Tabel 9. Identitas Proyek P2KP Dalam Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian

No	Nama Proyek	Lokasi	Volume	Biaya BLM	Biaya swadaya	Jumlah pemanfaat
1.	Pembangunan peningkatan kualitas jalan	Dusun Satu	P = ± 1.200 m L = ± 2,22 m Ketebalan = 15 cm V = 400 m ²	Rp 1.800.000	Rp 300.000	160 orang
2.	Pembangunan Jembatan	Dusun Tujuh	P = ± 4 m L = 3 m Ketebalan = 17 cm V = 200 m ³	Rp 4.825.000	Rp 1.000.000	390 orang
3.	Pembangunan Drainase	Dusun Tiga	P = ± 150 m L = 0,4 m T = 0,6 m	Rp 7.700.000	Rp 1.345.000	120 orang

4.4.1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan

Kegiatan peningkatan kualitas jalan yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo meliputi kegiatan pembersihan jalan, dan pengerasan jalan dengan sirtu. *Stakeholder* yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas jalan adalah kepala desa beserta perangkatnya, anggota BKM Tanjung Rejo, fasilitator serta masyarakat. Adapun tugas dari BKM, kepala desa, dan fasilitator yaitu memberikan pengarahan, memantau pelaksanaan kegiatan, mengetahui, serta menandatangani proposal usulan kegiatan, dan juga terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas jalan tersebut. Program ini didukung oleh pemerintah yang memberikan fasilitas dan bantuan dana yang bersumber dari

pinjaman Bank Dunia, APBN Provinsi, dan APBD Kabupaten. Dalam kegiatan pembangunan peningkatan kualitas jalan ini, dana bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yaitu Rp 1.800.000, dan dana swadaya yaitu berjumlah Rp 300.000. Berbagai kegiatan P2KP yang dilaksanakan yaitu ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di Desa Tanjung Rejo.

Penentuan lokasi kegiatan peningkatan kualitas jalan dilakukan oleh tim verifikasi. Proses seleksi dilakukan dengan cara survey lapangan dan wawancara langsung dengan masyarakat berdasarkan proposal usulan yang telah diajukan masyarakat terlebih dahulu tentang kendala-kendala yang dihadapi masyarakat selama ini. Setelah syarat-syarat yang diajukan masyarakat terpenuhi serta kondisi lapangan yang memungkinkan untuk dilakukan peningkatan jalan, maka tim verifikasi menetapkan kegiatan peningkatan kualitas jalan dilakukan di Dusun Satu. Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembuatan proposal usulan pada tanggal 6 Maret 2007, selanjutnya kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2007. Untuk tahap perencanaan kegiatan ini berlangsung selama tiga bulan, sedangkan untuk tahap pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama dua minggu. Jadwal pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas jalan ini telah berdasarkan kesepakatan antara kepala desa beserta perangkatnya, anggota BKM, fasilitator, dan masyarakat. Hal ini merupakan rangkaian sosialisasi demi kelancaran dan keberhasilan dari program. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas jalan ini dilakukan pada pukul 09.00 WIB dan berakhir sampai pukul 17.00 WIB.

Sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas jalan, masyarakat melakukan musyawarah penyusunan dan penulisan usulan kegiatan desa yang telah ditetapkan bersama. Dalam proses ini ada beberapa tahap musyawarah yang harus dilakukan masyarakat, seperti musyawarah dalam pembuatan proposal usulan kegiatan, musyawarah dalam penyusunan pengadaan bahan dan alat, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Musyawarah ini dilakukan oleh kepala desa beserta perangkatnya, anggota BKM, Fasilitator kelurahan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dan masyarakat.

Pada *tahap awal* musyawarah yang dilakukan adalah musyawarah antar desa. Musyawarah ini dilaksanakan di Kantor Camat Percut Sei Tuan dan dihadiri oleh perwakilan dari setiap desa, seperti camat dan staf yang terkait, kepala desa, wakil RT, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, fasilitator kelurahan, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). Musyawarah dipandu oleh fasilitator kecamatan, dalam musyawarah akan dibahas tentang proposal usulan kegiatan yang diajukan masyarakat, berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat, seperti masyarakat sulit membawa hasil pertanian mereka ke pasar, belum adanya angkutan umum, dan kondisi jalan yang sulit dilewati karena masih tanah, dan berlubang. Dalam pertemuan ini, musyawarah yang dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tukar pendapat. Kemudian alat yang digunakan dalam musyawarah yaitu berupa kertas koran, peta desa, daftar hadir, alat tulis, dan lain-lain. Jadwal musyawarah berdasarkan kesepakatan antara masyarakat, fasilitator kelurahan, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

Pada *tahap kedua* musyawarah diadakan di Balai Desa Tanjung Rejo. Musyawarah ini dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, anggota BKM, dan masyarakat. Agenda musyawarah ini yang akan dibahas hampir sama dengan musyawarah tahap awal yang diadakan di Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan. Jadwal musyawarah berdasarkan kesepakatan dari masyarakat sendiri, kadang-kadang musyawarah diadakan diluar rencana yang sudah disepakati sebelumnya. Sedangkan pada *tahap ketiga*, musyawarah yang dibahas yaitu mengesahkan usulan kegiatan-kegiatan yang diajukan masyarakat sebelumnya pada tahap awal. Musyawarah ini diadakan di Kantor Camat Percut Sei Tuan, dan dihadiri oleh perwakilan dari setiap desa, seperti camat dan staf yang terkait, kepala desa, wakil RT, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, fasilitator kelurahan, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

Tujuan dari pembuatan proposal usulan kegiatan ini yaitu agar usulan kegiatan yang telah disepakati dan diputuskan bersama pada musyawarah yang diadakan di Desa Tanjung Rejo, tercatat secara sistematis sehingga mudah untuk diperiksa kelayakannya oleh tim verifikasi. Tim verifikasi yang terdiri dari Unit Pelaksana Lingkungan (UPL), Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), dan

fasilitator kelurahan melakukan verifikasi, yaitu memeriksa dan menilai kebenaran/ kelayakan dari proposal usulan kegiatan yang telah dibuat, sehingga dapat dipastikan kelayakan.

Kemudian, tim verifikasi membuat kesimpulan berupa rekomendasi akhir, yaitu membuat di berita acara bahwa kegiatan tersebut layak dilakukan, yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa, dan RT. Namun, apabila proposal usulan kegiatan tersebut belum sempurna, maka melalui UPL proposal usulan kegiatan yang sudah diverifikasi dikembalikan agar dilakukan penyempurnaan, setelah disempurnakan, maka UPL menyampaikan proposal usulan kegiatan tersebut kepada fasilitator kelurahan yang akan melakukan verifikasi kembali.

Langkah selanjutnya tim verifikasi menyusun jadwal dan melakukan kunjungan lapangan ke Desa Tanjung Rejo. Pemeriksaan lapangan ini dilakukan dengan metode atau cara observasi/ pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat. Selesai melakukan wawancara dengan masyarakat dan pengamatan langsung, tim verifikasi melakukan dialog tentang kebutuhan masyarakat seperti tidak adanya angkutan umum, sehingga masyarakat sulit membawa hasil-hasil pertanian mereka, dan kondisi jalan yang masih tanah dan berlubang.

Kegiatan peningkatan kualitas jalan, yang dilakukan adalah pembersihan jalan dan pengerasan jalan dengan sirtu. Kegiatan pembersihan jalan dilakukan masyarakat selama 1 minggu, yang meliputi pembersihan jalan dari sampah dan rumput-rumput yang tumbuh dipinggir jalan. Sedangkan untuk kegiatan pengerasan jalan juga dilakukan selama 1 minggu. Dengan beberapa tahap kegiatan yang mereka lakukan, yaitu mengukur jalan yang akan dikeraskan setelah itu melakukan pengerasan jalan dengan sirtu. Bahan perkerasan sirtu terdiri dari campuran pasir batu atau campuran antara kerikil dengan pasir.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas jalan ini dilakukan oleh masyarakat dan dipantau oleh fasilitator kelurahan, PJOK, kepala desa, dan anggota BKM. Volume pekerjaan jalan ini dengan panjang ± 1.200 m, lebar 2,22 m, ketebalan 15 cm, volume 400 m³. Untuk lebih jelasnya tentang tahap-tahap yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pembangunan peningkatan kualitas jalan, dapat dilihat pada Tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10. Tahapan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan

No	Tahap musyawarah	Peserta	Waktu	Tempat	Agenda	Tujuan
1.	Musyawarah antar desa	Camat, beserta staf yang terkait, Kepala desa, Wakil RT, LSM, perwakilan masyarakat, Fasilitator, dan PJOK	10.00 Wib	Kantor Camat Percut Sei Tuan	Sosialisasi kegiatan P2KP	Agar masyarakat mengerti dan mau membuat proposal usulan
2.	Musyawarah desa	Kepala desa beserta perangkatnya, BKM, dan Masyarakat	20.00 Wib	Balai Desa Tanjung Rejo	Sosialisasi dan rancangan pembuatan proposal usulan kegiatan	Agar masyarakat mengerti, mau, dan ikut berpartisipasi dalam membuat proposal usulan
3.	Musyawarah antar desa	Camat, beserta staf yang terkait, Kepala desa, Wakil RT, LSM, Masyarakat, Fasilitator, dan PJOK	10.00 Wib	Kantor Camat Percut Sei Tuan	Mengesahkan usulan kegiatan-kegiatan yang diajukan masyarakat	Untuk membantu dan meringankan kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat
4.	Verifikasi	UPL, KMW, Fasilitator desa.	10.00 Wib	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Satu • Dusun Tujuh • Dusun Tiga 	Melakukan pengamatan langsung	Agar dapat ditetapkan layak atau tidak kegiatan tersebut dilakukan

4.4.2. Kegiatan Pembangunan Jembatan

Kegiatan pembangunan jembatan meliputi pengorekan pondasi, dan pengecoran pondasi. *Stakeholder* yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan adalah kepala desa beserta perangkatnya, anggota BKM Tanjung Rejo, fasilitator serta masyarakat. Adapun tugas dari BKM, kepala desa, dan fasilitator yaitu memberikan pengarahan, memantau pelaksanaan kegiatan, mengetahui, serta menandatangani proposal usulan kegiatan, dan juga terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan tersebut. Program ini didukung oleh pemerintah yang memberikan fasilitas dan bantuan dana yang

bersumber dari pinjaman Bank Dunia, APBN Provinsi, dan APBD Kabupaten. Dalam kegiatan pembangunan jembatan ini, dana bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yaitu Rp 4.825.000, dan dana swadaya yaitu berjumlah Rp 1.000.000. Berbagai kegiatan P2KP yang dilaksanakan yaitu ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di Desa Tanjung Rejo.

Penentuan lokasi kegiatan pembangunan jembatan dilakukan oleh tim verifikasi. Proses seleksi dilakukan dengan cara survey lapangan dan wawancara langsung dengan masyarakat berdasarkan proposal usulan yang telah diajukan masyarakat terlebih dahulu tentang kendala-kendala yang dihadapi masyarakat selama ini. Setelah syarat-syarat yang diajukan masyarakat terpenuhi serta kondisi lapangan yang memungkinkan untuk dibangun, maka tim verifikasi menetapkan kegiatan pembangunan jembatan dilakukan di Dusun Tujuh. Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembuatan proposal usulan pada tanggal 20 Juni 2007, selanjutnya kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2007. Untuk tahap perencanaan kegiatan ini berlangsung selama tiga bulan, sedangkan untuk tahap pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama dua minggu. Jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan ini telah berdasarkan kesepakatan antara kepala desa beserta perangkatnya, anggota BKM, fasilitator, dan masyarakat. Hal ini merupakan rangkaian sosialisasi demi kelancaran dan keberhasilan dari program. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan ini dilakukan pada pukul 09.00 WIB dan berakhir sampai pukul 17.00 WIB.

Sebelum dilakukan pembangunan jembatan, masyarakat menyusun dan menulis usulan kegiatan desa yang telah ditetapkan bersama. Dalam proses ini ada beberapa tahap musyawarah yang dilakukan masyarakat, seperti musyawarah dalam pembuatan proposal usulan kegiatan, musyawarah dalam penyusunan pengadaan bahan dan alat, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Musyawarah ini dilakukan oleh kepala desa beserta perangkatnya, anggota BKM, fasilitator kelurahan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dan masyarakat.

Pada *tahap awal* musyawarah yang dilakukan adalah musyawarah antar desa. musyawarah ini dilaksanakan di Kantor Camat Percut Sei Tuan dan dihadiri

oleh perwakilan dari setiap desa, seperti camat dan staf yang terkait, kepala desa, wakil RT, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, fasilitator kecamatan, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). Musyawarah dipandu oleh fasilitator kelurahan, dalam musyawarah dibahas tentang proposal usulan kegiatan yang diajukan masyarakat, berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat, seperti kondisi jembatan yang sulit dilewati, karena kondisinya yang kecil, dan tidak kuat, sehingga tidak ada angkutan umum yang melewatinya, dan membuat masyarakat kesulitan membawa hasil pertanian mereka. Dalam pertemuan ini, Musyawarah yang dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tukar pendapat. Kemudian alat yang digunakan dalam musyawarah yaitu berupa kertas koran, peta desa, daftar hadir, alat tulis, dan lain-lain. Jadwal musyawarah berdasarkan kesepakatan antara masyarakat, fasilitator kelurahan, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

Pada *tahap kedua* musyawarah yang diadakan masyarakat selanjutnya yaitu di Balai Desa Tanjung Rejo. Musyawarah musyawarah ini hanya dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, anggota BKM, dan masyarakat. Dalam ini yang akan dibahas hampir sama dengan musyawarah tahap awal yang diadakan di Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan. Jadwal musyawarah berdasarkan kesepakatan dari masyarakat sendiri, kadang-kadang musyawarah diadakan diluar rencana yang sudah disepakati sebelumnya. Sedangkan pada *tahap ketiga*, musyawarah yang akan dibahas yaitu mengesahkan usulan kegiatan-kegiatan yang diajukan masyarakat sebelumnya pada tahap awal. Musyawarah ini diadakan di Kantor Camat Percut Sei Tuan, dan dihadiri oleh perwakilan dari setiap desa, seperti camat dan staf yang terkait, kepala desa, wakil RT, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, fasilitator kelurahan, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

Tujuan dari pembuatan proposal usulan kegiatan ini yaitu agar usulan kegiatan yang telah disepakati dan diputuskan bersama pada musyawarah yang diadakan di desa, tercatat secara sistematis sehingga mudah untuk diperiksa kelayakannya oleh tim verifikasi. Tim verifikasi yang terdiri dari Unit Pelaksana Lingkungan (UPL), Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), dan fasilitator

kelurahan melakukan verifikasi, yaitu memeriksa dan menilai kebenaran/kelayakan dari proposal usulan kegiatan yang telah dibuat.

Kemudian, tim verifikasi membuat kesimpulan berupa rekomendasi akhir, yaitu membuat di berita acara bahwa kegiatan tersebut layak dilakukan, yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa, dan RT. Namun, apabila proposal usulan kegiatan tersebut belum sempurna, maka proposal usulan kegiatan yang sudah diverifikasi dikembalikan melalui UPL agar dilakukan penyempurnaan, setelah disempurnakan, maka UPL menyampaikan proposal usulan kegiatan tersebut kepada fasilitator kelurahan yang akan melakukan verifikasi kembali.

Langkah selanjutnya tim verifikasi menyusun jadwal dan melakukan kunjungan lapangan ke Desa Tanjung Rejo. Pemeriksaan lapangan ini dilakukan dengan metode atau cara observasi/ pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat. Selesai melakukan wawancara dengan masyarakat dan pengamatan langsung, tim verifikasi melakukan dialog tentang kebutuhan masyarakat seperti kondisi jembatan yang sulit dilewati, karena kondisinya yang kecil, dan tidak kuat, sehingga tidak ada angkutan umum yang melewatinya, dan membuat masyarakat kesulitan membawa hasil pertanian mereka.

Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan, dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang dilakukan masyarakat yaitu mulai dari pengorekan pondasi, sampai pada pengecoran pondasi. Kegiatan pengorekan pondasi ini dilakukan masyarakat selama 1 minggu. Sedangkan untuk kegiatan pengecoran pondasi juga dilakukan selama 1 minggu. Adapun bahan yang digunakan untuk pengecoran pondasi yaitu pasir, semen, dan batu.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan ini dilakukan oleh masyarakat dan dipantau oleh fasilitator kelurahan, PJOK, kepala desa, dan anggota BKM. Volume pekerjaan pembangunan jembatan ini dilakukan dengan panjang \pm 4 m, lebar 3 m, ketebalan 17 cm, volume 200 m³.

Untuk lebih jelasnya tentang tahap-tahap yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pembangunan jembatan, dapat dilihat pada Tabel 11 dibawah ini.

Tabel 11. Tahapan Kegiatan Pembangunan Jembatan

No	Tahap musyawarah	Peserta	Waktu	Tempat	Agenda	Tujuan
1.	Musyawarah antar desa	Camat, beserta staf yang terkait, Kepala desa, Wakil RT, LSM, perwakilan masyarakat, Fasilitator, dan PJOK	10.00 Wib	Kantor Camat Percut Sei Tuan	Sosialisasi kegiatan P2KP	Agar masyarakat mengerti dan mau membuat proposal usulan
2.	Musyawarah desa	Kepala desa beserta perangkatnya, BKM, dan Masyarakat	20.00 Wib	Balai Desa Tanjung Rejo	Sosialisasi dan rancangan pembuatan proposal usulan kegiatan	Agar masyarakat mengerti, mau, dan ikut berpartisipasi dalam membuat proposal usulan
3.	Musyawarah antar desa	Camat, beserta staf yang terkait, Kepala desa, Wakil RT, LSM, Masyarakat, Fasilitator, dan PJOK	10.00 Wib	Kantor Camat Percut Sei Tuan	Mengesahkan usulan kegiatan-kegiatan yang diajukan masyarakat	Untuk membantu dan meringankan kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat
4.	Verifikasi	UPL, KMW, Fasilitator desa.	10.00 Wib	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Satu • Dusun Tujuh • Dusun Tiga 	Melakukan pengamatan langsung	Agar dapat ditetapkan layak atau tidak kegiatan tersebut dilakukan

4.4.3 Kegiatan Pembangunan Drainase

Kegiatan pembangunan drainase yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo meliputi kegiatan penggalian tanah, pemasangan batu bata, dan plesteran. *Stakeholder* yang terlibat pada pelaksanaan pembangunan drainase adalah kepala desa beserta perangkatnya, anggota BKM Tanjung Rejo, fasilitator serta masyarakat. Adapun tugas dari BKM, kepala desa, dan fasilitator yaitu memberikan pengarahan, memantau pelaksanaan kegiatan, mengetahui, serta menandatangani proposal usulan kegiatan, dan juga terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase tersebut. Kegiatan ini didukung oleh

pemerintah yang memberikan fasilitas dan bantuan dana yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia, APBN Provinsi, dan APBD Kabupaten. Dalam kegiatan pembangunan drainase ini, dana bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yaitu sebanyak Rp 7.700.000, sedangkan dana swadaya berjumlah Rp 1.345.000. Berbagai kegiatan P2KP yang dilaksanakan yaitu ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di Desa Tanjung Rejo.

Penentuan lokasi kegiatan pembangunan drainase dilakukan oleh tim verifikasi. Proses seleksi dilakukan dengan cara survey lapangan dan wawancara langsung dengan masyarakat berdasarkan proposal usulan yang telah diajukan masyarakat terlebih dahulu tentang kendala-kendala yang dihadapi masyarakat selama ini. Setelah syarat-syarat yang diajukan masyarakat terpenuhi serta kondisi lapangan yang memungkinkan untuk dibangun, maka tim verifikasi menetapkan kegiatan pembangunan drainase dilakukan di Dusun Tiga. Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembuatan proposal usulan pada tanggal 26 Juli 2007, selanjutnya kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 18 November 2007. Untuk tahap perencanaan kegiatan ini berlangsung selama tiga bulan, sedangkan untuk tahap pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama tiga minggu. Jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase ini telah berdasarkan kesepakatan antara kepala desa beserta perangkatnya, anggota BKM, fasilitator, dan masyarakat. Hal ini merupakan rangkaian sosialisasi demi kelancaran dan keberhasilan dari program. Pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase ini dilakukan pada pukul 09.00 WIB dan berakhir sampai pukul 17.00 WIB.

Sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase, masyarakat melakukan musyawarah penyusunan dan penulisan usulan kegiatan desa yang telah ditetapkan bersama. Dalam proses ini ada beberapa tahap musyawarah yang harus dilakukan masyarakat, seperti musyawarah dalam pembuatan proposal usulan kegiatan, musyawarah dalam penyusunan pengadaan bahan dan alat, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Musyawarah ini dilakukan oleh kepala desa beserta perangkatnya, anggota BKM, fasilitator kelurahan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dan masyarakat.

Pada *tahap awal* musyawarah yang dilakukan adalah musyawarah antar desa. Musyawarah ini dilaksanakan di Kantor Camat Percut Sei Tuan dan dihadiri

oleh perwakilan dari setiap desa, seperti camat dan staf yang terkait, kepala desa, wakil RT, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, fasilitator kecamatan, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). Musyawarah dipandu oleh fasilitator kelurahan, dalam Musyawarah akan dibahas tentang proposal usulan kegiatan yang diajukan masyarakat, berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat, seperti sering terjadi banjir, disebabkan saluran air yang tidak lancar. Dalam pertemuan ini, musyawarah yang dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tukar pendapat. Kemudian alat yang digunakan dalam musyawarah yaitu berupa kertas koran, peta desa, daftar hadir, alat tulis, dan lain-lain. Jadwal musyawarah berdasarkan kesepakatan antara masyarakat, fasilitator kelurahan, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

Pada *tahap kedua* musyawarah yang akan diadakan masyarakat selanjutnya yaitu di Balai Desa Tanjung Rejo. Musyawarah ini hanya dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, anggota BKM, dan masyarakat. Dalam musyawarah ini yang akan dibahas hampir sama dengan musyawarah tahap awal yang diadakan di Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan. Jadwal musyawarah berdasarkan kesepakatan dari masyarakat sendiri, kadang-kadang musyawarah diadakan diluar rencana yang sudah disepakati sebelumnya. Sedangkan pada *tahap ketiga*, musyawarah yang akan dibahas yaitu mengesahkan usulan kegiatan-kegiatan yang diajukan masyarakat sebelumnya pada tahap awal. Musyawarah ini diadakan di Kantor Camat Percut Sei Tuan, dan dihadiri oleh perwakilan dari setiap desa, seperti camat dan staf yang terkait, kepala desa, wakil RT, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, fasilitator kelurahan, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

Tujuan dari pembuatan proposal usulan kegiatan ini yaitu agar usulan kegiatan yang telah disepakati dan diputuskan bersama pada musyawarah yang diadakan di desa, tercatat secara sistematis sehingga mudah untuk diperiksa kelayakannya oleh tim verifikasi. Tim verifikasi yang terdiri dari Unit Pelaksana Lingkungan (UPL), Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), dan fasilitator kelurahan melakukan verifikasi, yaitu memeriksa dan menilai kebenaran/kelayakan dari proposal usulan kegiatan yang telah dibuat.

Kemudian, tim verifikasi membuat kesimpulan berupa rekomendasi akhir, yaitu membuat di berita acara bahwa kegiatan tersebut layak dilakukan, yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa, dan RT. Namun, apabila proposal usulan kegiatan tersebut belum sempurna, maka proposal usulan kegiatan yang sudah diverifikasi dikembalikan melalui UPL agar dilakukan penyempurnaan, setelah disempurnakan, maka UPL menyampaikan proposal usulan kegiatan tersebut kepada fasilitator kelurahan yang akan melakukan verifikasi kembali.

Langkah selanjutnya tim verifikasi menyusun jadwal dan melakukan kunjungan lapangan ke Desa Tanjung Rejo. Pemeriksaan lapangan ini dilakukan dengan metode atau cara observasi/ pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat. Selesai melakukan wawancara dengan masyarakat dan pengamatan langsung, tim verifikasi melakukan dialog tentang kebutuhan masyarakat seperti kondisi saluran air di desa mereka tidak lancar, sehingga sering terjadi banjir.

Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase, dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang dilakukan masyarakat yaitu mulai dari penggalian tanah, pemasangan batu bata, sampai pada pelesteran. Kegiatan pengorekan penggalian tanah ini dilakukan masyarakat selama 1 minggu, kegiatan pemasangan batu bata dilakukan selama 1 minggu. Dan untuk kegiatan pelesteran juga dilakukan selama 1 minggu.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase ini dilakukan oleh masyarakat dan dipantau oleh fasilitator kelurahan, PJOK, kepala desa, dan anggota BKM. Volume pekerjaan pembangunan drainase dilakukan dengan panjang ± 150 m, lebar 0,4 m, tinggi 0,6 m.

Untuk lebih jelasnya tentang tahap-tahap yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pembangunan drainase, dapat dilihat pada Tabel 12 dibawah ini.

Tabel 12. Tahapan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Drainase

No	Tahap musyawarah	Peserta	Waktu	Tempat	Agenda	Tujuan
1.	Musyawarah antar desa	Camat, beserta staf yang terkait, Kepala desa, Wakil RT, LSM, perwakilan masyarakat, Fasilitator, dan PJOK	10.00 Wib	Kantor Camat Percut Sei Tuan	Sosialisasi kegiatan P2KP	Agar masyarakat mengerti dan mau membuat proposal usulan
2.	Musyawarah desa	Kepala desa beserta perangkatnya, BKM, dan Masyarakat	20.00 Wib	Balai Desa Tanjung Rejo	Sosialisasi dan rancangan pembuatan proposal usulan kegiatan	Agar masyarakat mengerti, mau, dan ikut berpartisipasi dalam membuat proposal usulan
3.	Musyawarah antar desa	Camat, beserta staf yang terkait, Kepala desa, Wakil RT, LSM, Masyarakat, Fasilitator, dan PJOK	10.00 Wib	Kantor Camat Percut Sei Tuan	Mengesahkan usulan kegiatan-kegiatan yang diajukan masyarakat	Untuk membantu dan meringankan kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat
4.	Verifikasi	UPL, KMW, Fasilitator desa.	10.00 Wib	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Satu • Dusun Tujuh • Dusun Tiga 	Melakukan pengamatan langsung	Agar dapat ditetapkan layak atau tidak kegiatan tersebut dilakukan

4.5 Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan

a. Tahap Perencanaan

Kegiatan - kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan sebagai berikut :

1. Terlibat Dalam Pembuatan Proposal Usulan

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki (Mardikanto, 2009).

Dengan adanya perencanaan peningkatan kualitas jalan, maka akan memberikan kerangka acuan kerja yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat dan stakeholder yang terlibat untuk mengambil suatu keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya pembangunan yang diinginkan. Penyusunan proposal usulan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan peningkatan kualitas jalan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan peningkatan kualitas jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan key informant, Tujuan dari pembuatan proposal usulan kegiatan ini yaitu sebagai petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan, dan untuk memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan P2KP.

Dalam musyawarah pembuatan proposal usulan kegiatan, pihak yang terlibat adalah ketua BKM, fasilitator kelurahan, kepala desa beserta perangkatnya, dan masyarakat. Hal tersebut, merupakan bentuk keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan peningkatan kualitas jalan. Menurut Ban dan Hawkins (1999) partisipasi pihak-pihak yang terlibat dalam program pembangunan sering dipandang sebagai jalan meraih sukses.

Musyawarah pembuatan proposal usulan dilakukan oleh anggota masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat seperti BKM, fasilitator kelurahan, dan kepala desa. Musyawarah tersebut dilakukan di Balai Desa Tanjung Rejo. Untuk dapat memutuskan suatu tindakan yang akan dilakukan maka dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah semua anggota musyawarah diharapkan kehadirannya. Bagi setiap anggota musyawarah yang tidak hadir tidak diberikan sanksi, namun mereka akan diberi teguran untuk menghadiri musyawarah selanjutnya. Musyawarah diadakan wajibnya 1 x dalam seminggu. Berarti dalam satu bulan musyawarah dilakukan 4 kali, namun kadang-kadang musyawarah dalam satu minggu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Hal ini disebabkan minggu sebelumnya musyawarah tidak terlaksana karena jumlah anggota musyawarah tidak mencukupi untuk dilaksanakannya musyawarah.

Dalam musyawarah akan dibahas tentang pembuatan proposal usulan kegiatan yang meliputi : teknis jalan yang akan disirtu, perencanaan pengadaan bahan dan alat, penyusunan struktur organisasi, pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, dan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam

membawa hasil-hasil pertanian mereka, serta angkutan umum yang tidak masuk ke Desa Tanjung Rejo. Untuk mengetahui lebih jelas frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat dalam musyawarah pembuatan proposal usulan kegiatan peningkatan kualitas jalan dapat dilihat pada Tabel 13 dibawah ini.

Tabel 13. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Dalam Musyawarah Pembuatan Proposal Usulan Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	-	2	3	5
2.	Tukang	2	-	1	3
3.	Guru	1	-	-	1
4.	Pegawai kelurahan	1	1	-	2
5.	Buruh tani	2	2	-	4
6.	ABRI	1	-	-	1
	Jumlah	7	5	4	16

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel 13, dapat dilihat bahwa frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut dalam musyawarah pembuatan proposal usulan kegiatan menurut jenis pekerjaan untuk kategori selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah seperti : Petani 5 orang, Tukang 3 orang, Guru 1 orang, Pegawai kelurahan 2 orang, Buruh tani 4 orang, dan ABRI 1 orang. Jadi dari hasil skala likert yang ditabulasikan di atas dapat disimpulkan bahwa petani memiliki jumlah paling banyak yang mengikuti musyawarah pembuatan proposal usulan kegiatan peningkatan kualitas jalan.

Dari Tabel 13 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 7 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat tinggi. Frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 5 orang dengan kategori rendah. Dan frekuensi kehadiran masyarakat yang tidak pernah terlibat adalah 4 orang dengan kategori rendah.

2. Terlibat Dalam Penyusunan Pengadaan Bahan dan Alat

Pengadaan yang dimaksudkan disini adalah Pembelian bahan bangunan atau sewa peralatan konstruksi untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka

pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitas jalan, termasuk juga tenaga kerja ahli bila pekerjaan mengalami kesulitan. Sedangkan tujuan penyusunan rencana pengadaan bahan dan alat ini adalah untuk mendorong adanya proses transparansi dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan yang terkait dengan pengadaan bahan dan alat.

Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari tahap-tahap penyusunan pengadaan bahan dan alat, seperti menentukan jenis bahan dan alat yang diperlukan, menentukan biaya pengadaan setiap jenis bahan dan sewa alat, menentukan nama dan alamat jelas dari toko yang direncanakan, dan menentukan jadwal pelaksanaan dari setiap item pengadaan bahan dan alat. Musyawarah penyusunan pengadaan bahan dan alat dilakukan oleh anggota masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat seperti BKM, fasilitator kelurahan, dan kepala desa. Musyawarah tersebut dilakukan di Balai Desa Tanjung Rejo. Untuk dapat memutuskan suatu tindakan yang akan dilakukan maka diadakan musyawarah. Dalam musyawarah semua anggota musyawarah diharapkan kehadirannya. Bagi setiap anggota musyawarah yang tidak hadir tidak diberikan sanksi, namun mereka akan diberi teguran untuk menghadiri musyawarah selanjutnya. Musyawarah diadakan wajibnya 1 x dalam seminggu. Berarti dalam satu bulan musyawarah dilakukan 4 kali, namun kadang-kadang musyawarah dalam satu minggu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Hal ini disebabkan minggu sebelumnya musyawarah tidak terlaksana karena jumlah anggota musyawarah tidak mencukupi untuk dilaksanakannya musyawarah.

Untuk mengetahui lebih jelas frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat dalam musyawarah pengadaan bahan dan alat pada kegiatan peningkatan kualitas jalan dapat dilihat pada Tabel 14 dibawah ini.

Tabel 14. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Dalam Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	1	2	2	5
2.	Tukang	1	1	1	3
3.	Guru	1	-	-	1
4.	Pegawai kelurahan	1	-	1	2
5.	Buruh tani	1	-	3	4
6.	ABRI	-	1	-	1
	Jumlah	5	4	7	16

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel 14, dapat dilihat bahwa frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut dalam musyawarah pengadaan bahan dan alat menurut jenis pekerjaan untuk kategori selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah sama dengan frekuensi kehadiran masyarakat dalam musyawarah pembuatan proposal usulan kegiatan seperti : Petani 5 orang, Tukang 3 orang, Guru 1 orang, Pegawai kelurahan 2 orang, Buruh tani 4 orang, dan ABRI 1 orang. Jadi dari hasil skala likert yang ditabulasikan di atas dapat disimpulkan bahwa petani memiliki jumlah paling banyak yang mengikuti musyawarah pembuatan proposal usulan kegiatan peningkatan kualitas jalan.

Dari Tabel 14 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 5 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat rendah. Sedangkan frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 4 orang dengan kategori rendah. Frekuensi kehadiran masyarakat yang tidak pernah sebanyak 7 orang dengan kategori sedang.

3. Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan

Musyawarah dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh anggota masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat seperti BKM, fasilitator kelurahan, dan kepala desa. Musyawarah tersebut dilakukan di Balai Desa Tanjung Rejo. Keputusan merupakan suatu keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah yang dilakukan masyarakat. Untuk dapat memutuskan suatu tindakan atau keputusan akhir yang akan diambil maka dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah semua anggota musyawarah diharapkan kehadirannya. Bagi setiap anggota musyawarah yang tidak hadir tidak diberikan sanksi, namun mereka akan diberi teguran untuk menghadiri musyawarah selanjutnya. Musyawarah diadakan wajibnya 1 x dalam seminggu. Berarti dalam satu bulan musyawarah dilakukan 4 kali, namun kadang-kadang musyawarah dalam satu minggu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Hal ini disebabkan minggu sebelumnya musyawarah tidak terlaksana karena jumlah anggota musyawarah tidak mencukupi untuk dilaksanakannya musyawarah.

Dalam musyawarah akan dibahas tentang hasil survey yang dilakukan sebelumnya, selanjutnya disepakati bersama melalui musyawarah dimana Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, setiap anggota harus memiliki pendapat dan ide masing-masing. Jika dalam musyawarah telah

sepakat sesuai dengan suara terbanyak, maka akan dijalankan sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan bersama.

Dalam musyawarah dihadiri oleh seluruh masyarakat selaku penerima manfaat kegiatan dengan tujuan untuk menyepakati rencana yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan peningkatan kualitas jalan, sekaligus mensosialisasikannya kepada semua masyarakat. Selain tujuan tersebut, melalui musyawarah ini juga diharapkan dapat mendorong terbangunnya komitmen awal masyarakat yang lebih kuat dan transparansi dalam melakukan kegiatan tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat dalam musyawarah pengambilan keputusan pada kegiatan peningkatan kualitas jalan dapat dilihat pada Tabel 15 dibawah ini.

Tabel 15. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	3	2	-	5
2.	Tukang	2	1	-	3
3.	Guru	1	-	-	1
4.	Pegawai kelurahan	1	-	1	2
5.	Buruh tani	1	1	2	4
6.	ABRI	1	-	-	1
	Jumlah	9	4	3	16

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel 15, dapat dilihat bahwa frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut dalam musyawarah pengambilan keputusan menurut jenis pekerjaan untuk kategori selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah seperti : Petani 5 orang, Tukang 3 orang, Guru 1 orang, Pegawai kelurahan 2 orang, buruh tani 4 orang, dan ABRI 1 orang. Jadi dari hasil skala likert yang ditabulasikan di atas dapat disimpulkan juga bahwa petani memiliki jumlah paling banyak yang mengikuti musyawarah pengambilan keputusan pada peningkatan kualitas jalan.

Dari Tabel 15 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 9 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat tinggi. Sedangkan frekuensi kehadiran

masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 4 orang dengan kategori rendah. Frekuensi kehadiran masyarakat yang tidak pernah sebanyak 3 orang dengan kategori rendah.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan - kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan peningkatan kualitas jalan sebagai berikut :

1. Terlibat Dalam Kegiatan Pembersihan Jalan

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan peningkatan kualitas jalan, tahap awal yang dilakukan masyarakat yaitu pembersihan jalan. Kegiatan pembersihan jalan dilakukan masyarakat dengan menyapu dan membersihkan jalan dari sampah dan memotong rumput-rumput yang tumbuh dipinggir jalan, kemudian membakarnya. Jadwal kerja dilakukan masyarakat setiap hari secara bergantian, dimana setiap anggota masyarakat mendapat kesempatan 1x dalam seminggu. Namun kadang-kadang pelaksanaan diadakan diluar rencana atau jadwal, hal ini dikarenakan adanya kesibukan dari masyarakat yang terdiri dari Petani, Tukang, Guru, Pegawai kelurahan, Buruh tani, dan ABRI, sehingga mereka ikut dalam pelaksanaan kegiatan ketika mereka memiliki waktu luang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* dilapangan, masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembersihan jalan berjumlah 16 orang. Dari 16 orang tersebut mereka memiliki kriteria yang ditetapkan oleh BKM sendiri yaitu bersedia membantu dengan suka rela, dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk mengetahui frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembersihan jalan pada kegiatan pembangunan peningkatan kualitas jalan dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembersihan Jalan

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	2	1	2	5
2.	Tukang	3	-	-	3
3.	Guru	1	-	-	1
4.	Pegawai kelurahan	1	-	1	2
5.	Buruh tani	4	-	-	4
6.	ABRI	-	1	-	1
	Jumlah	11	2	3	16

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel 16, dapat dilihat bahwa frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembersihan jalan, seperti kategori selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah seperti : Petani 5 orang, Tukang 3 orang, Guru 1 orang, Pegawai kelurahan 2 orang, Buruh tani 4 orang, dan ABRI 1 orang. Jadi dari hasil skala likert yang ditabulasikan di atas dapat disimpulkan bahwa petani juga yang memiliki jumlah paling banyak yang mengikuti kegiatan pembersihan jalan.

Dari Tabel 16 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 11 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat tinggi. Sedangkan frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 2 orang dengan kategori rendah. Frekuensi kehadiran masyarakat yang tidak pernah sebanyak 3 orang dengan kategori rendah.

2. Terlibat Dalam Kegiatan Pengerasan Jalan Dengan Sirtu.

Tahap awal yang dilakukan dalam pelaksanaan pengerasan jalan dengan sirtu yaitu mengukur jalan yang akan disirtu dengan menggunakan pita ukur, pemasangan patok kedalam tanah dengan kedalaman 50 cm dan 50 cm berada di atas tanah, setelah itu dilakukan pengerasan jalan dengan sirtu, yang mana bahan perkerasan sirtu terdiri dari campuran pasir batu atau campuran antara kerikil dengan pasir. Jadwal kerja dilakukan masyarakat setiap hari selama 1 minggu. Kendala yang dihadapi masyarakat yaitu masalah alat untuk melakukan pengerasan jalan, dengan kondisi tersebut maka tukang yang melakukan pengerasan jalan tersebut. Untuk mengetahui frekuensi kehadiran masyarakat

yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengerasan jalan dengan sirtu pada kegiatan pembangunan peningkatan kualitas jalan dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengerasan Jalan dengan Sirtu

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	3	3	-	6
2.	Tukang	3	-	-	3
3.	Guru	1	-	-	1
4.	Pegawai kelurahan	-	1	1	2
5.	Buruh tani	1	1	1	3
6.	ABRI	-	1	-	1
	Jumlah	8	6	2	16

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel 17, dapat dilihat bahwa frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut dalam kegiatan pengerasan jalan dengan sirtu menurut jenis pekerjaan untuk kategori selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah seperti : Petani 6 orang, Tukang 3 orang, Guru 1 orang, Pegawai kelurahan 2 orang, Buruh tani 3 orang, dan ABRI 1 orang. Jadi dari hasil skala likert yang ditabulasikan di atas dapat disimpulkan bahwa petani memiliki jumlah paling banyak yang mengikuti kegiatan pengerasan jalan dengan sirtu.

Dari Tabel 17 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 8 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat sedang. Sedangkan frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 6 orang dengan kategori sedang. Frekuensi kehadiran masyarakat yang tidak pernah sebanyak 2 orang dengan kategori rendah.

Untuk mengetahui lebih jelasnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan peningkatan kualitas jalan dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Hasil Skor Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan

No.	Kegiatan	Jumlah Responden	Nilai skor	Nilai yang diperoleh
1.	Pembangunan peningkatan Jalan A. Tahap perencanaan: a. Terlibat dalam rapat pembuatan proposal usulan kegiatan - Selalu mengikuti (3-4x dalam sebulan) 7 2 14 - Kadang-kadang (1-2x dalam sebulan) 5 1 5 - Tidak pernah terlibat 4 0 0 b. Terlibat dalam musyawarah penyusunan pengadaan bahan dan alat - Selalu mengikuti (3-4x dalam sebulan) 5 2 10 - Kadang-kadang (1-2x dalam sebulan) 4 1 4 - Tidak pernah terlibat 7 0 0 c. Terlibat dalam pengambilan keputusan - Selalu mengikuti (3-4x dalam sebulan) 9 2 18 - Kadang-kadang (1-2x dalam sebulan) 4 1 4 - Tidak pernah terlibat 3 0 0			
2	B. Tahap pelaksanaan: a. Terlibat dalam kegiatan pembersihan jalan - Selalu mengikuti (4 – 6 kali) 11 2 22			

	- Kadang-kadang (1 – 3 kali)	2	1	2
	- Tidak pernah terlibat	3	0	0
	b. Terlibat dalam pengerasan jalan dengan sirtu			
	- Selalu mengikuti (4 – 6 kali)	8	2	16
	- Kadang-kadang (1 – 3 kali)	6	1	6
	- Tidak pernah terlibat	2	0	0
	Jumlah skor			101
	Jumlah skor yang diharapkan			160
	Persentase skor			63,12 %

Dari Tabel 18, dapat dilihat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan peningkatan kualitas jalan, yang meliputi kegiatan pembuatan proposal usulan, musyawarah penyusunan pengadaan bahan dan alat, pengambilan keputusan. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi pembersihan jalan, pengerasan jalan dengan sirtu adalah 63,12 %. Jadi dapat disimpulkan dari hasil skor bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitas jalan termasuk sedang. Hal ini disebabkan karena jumlah masyarakat yang terlibat cukup banyak dibandingkan jumlah masyarakat yang tidak terlibat.

4.6 Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan

a. Tahap Perencanaan

Kegiatan - kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan jembatan sebagai berikut :

1. Terlibat Dalam Pembuatan Proposal Usulan

Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki (Mardikanto, 2009).

Dengan adanya suatu perencanaan jembatan, maka akan memberikan kerangka acuan kerja yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat dan stakeholder yang terlibat untuk mengambil suatu keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya pembangunan yang diinginkan. Penyusunan proposal usulan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan key informant, Tujuan dari pembuatan proposal usulan kegiatan ini yaitu sebagai petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan, dan untuk memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan P2KP.

Dalam musyawarah pembuatan proposal usulan kegiatan, pihak yang terlibat musyawarah adalah ketua BKM, fasilitator kelurahan, kepala desa beserta perangkatnya, dan masyarakat. Dalam musyawarah, seluruh anggota masyarakat yang datang, mengisi daftar hadir dengan menulis nama dan tanda tangan, kemudian duduk, diskusi, dan bebas mengeluarkan pendapat. Hal tersebut, merupakan bentuk keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan jembatan yang akan dilakukan. Menurut Ban dan Hawkins (1999) partisipasi pihak-pihak yang terlibat dalam program pembangunan sering dipandang sebagai jalan meraih sukses.

Musyawarah pembuatan proposal usulan dilakukan oleh anggota masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat seperti BKM, fasilitator kelurahan, dan kepala desa. Musyawarah tersebut dilakukan di Balai Desa Tanjung Rejo. Untuk dapat memutuskan suatu tindakan yang akan dilakukan maka dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah semua anggota musyawarah diharapkan kehadirannya. Bagi setiap anggota musyawarah yang tidak hadir tidak diberikan sanksi, namun mereka akan diberi teguran untuk menghadiri musyawarah selanjutnya. Musyawarah diadakan wajibnya 1 x dalam seminggu. Berarti dalam satu bulan musyawarah dilakukan 4 kali, namun kadang-kadang musyawarah dalam satu minggu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Hal ini disebabkan minggu sebelumnya musyawarah tidak terlaksana karena jumlah anggota musyawarah tidak mencukupi untuk dilaksanakannya musyawarah.

Dalam musyawarah akan dibahas tentang pembuatan proposal usulan kegiatan yang meliputi ; teknis jembatan yang akan dibangun, pembuatan Rencana Anggaran

Biaya (RAB) kegiatan, penyusunan pengadaan bahan dan alat, penyusunan struktur organisasi, dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam membawa hasil-hasil pertanian mereka, serta sulitnya kendaraan melewati jembatan tersebut. Musyawarah dilakukan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Namun, jadwal pelaksanaan dapat berubah karena jumlah anggota musyawarah tidak mencukupi untuk pelaksanaan musyawarah. Maka, dilaksanakan atau tidaknya musyawarah tergantung pada persetujuan anggota musyawarah lainnya. Dalam musyawarah semua anggota diharapkan kehadirannya. Bagi setiap anggota yang tidak hadir tidak diberikan sanksi, namun mereka akan diberi teguran untuk menghadiri musyawarah selanjutnya. Untuk mengetahui lebih jelas frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat dalam musyawarah pembuatan proposal usulan pembangunan jembatan dapat dilihat pada Tabel 19 dibawah ini.

Tabel 19. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Dalam Musyawarah Pembuatan Proposal Usulan Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	3	5	8	16
2.	Tukang	3	1	2	6
3.	Guru	-	1	2	3
4.	Pegawai kelurahan	1	1	2	4
5.	Buruh tani	3	3	2	8
6.	ABRI	2	-	-	2
	Jumlah	12	11	16	39

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 19 di atas, dapat dilihat bahwa yang mengikuti musyawarah pembuatan proposal usulan kegiatan pada pembangunan jembatan menurut kategori selalu, kadang-kadang, tidak pernah serta jenis jenis pekerjaan yang paling banyak mengikuti yaitu Petani dengan jumlah 16 orang, dan Buruh tani sebanyak 8 orang. Selainnya Tukang, 6 orang, Guru, 3 orang, Pegawai kelurahan 4 orang, dan ABRI 2 orang.

Dari Tabel 19 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 12 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat rendah. Sedangkan frekuensi kehadiran

masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 11 orang dengan kategori rendah. Frekuensi kehadiran masyarakat yang tidak pernah sebanyak 16 orang dengan kategori sedang.

2. Terlibat Dalam Penyusunan Pengadaan Bahan dan Alat

Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari tahap-tahap penyusunan pengadaan bahan dan alat, seperti menentukan jenis bahan dan alat yang diperlukan, menentukan biaya pengadaan setiap jenis bahan dan sewa alat, menentukan nama dan alamat jelas dari toko yang direncanakan, dan menentukan jadwal pelaksanaan dari setiap item pengadaan bahan dan alat. Musyawarah penyusunan pengadaan bahan dan alat dilakukan oleh anggota masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat seperti BKM, fasilitator kelurahan, dan kepala desa. Musyawarah tersebut dilakukan di Balai Desa Tanjung Rejo. Untuk dapat memutuskan suatu tindakan yang akan dilakukan maka dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah semua anggota musyawarah diharapkan kehadirannya. Bagi setiap anggota musyawarah yang tidak hadir tidak diberikan sanksi, namun mereka akan diberi teguran untuk menghadiri musyawarah selanjutnya. Musyawarah diadakan wajibnya 1 x dalam seminggu. Berarti dalam satu bulan musyawarah dilakukan 4 kali, namun kadang-kadang musyawarah dalam satu minggu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Hal ini disebabkan minggu sebelumnya musyawarah tidak terlaksana karena jumlah anggota musyawarah tidak mencukupi untuk dilaksanakannya musyawarah.

Untuk mengetahui lebih jelas frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat dalam musyawarah pembuatan proposal usulan pada kegiatan pembangunan jembatan dapat dilihat pada Tabel 20 dibawah ini.

Tabel 20. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Dalam Musyawarah Penyusunan Pengadaan Bahan dan Alat Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	3	8	6	17
2.	Tukang	2	4	-	6
3.	Guru	-	3	-	3
4.	Pegawai kelurahan	1	2	1	4
5.	Buruh tani	3	2	2	7
6.	ABRI	-	1	1	2
	Jumlah	9	20	9	39

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 20 di atas, dapat dilihat bahwa yang mengikuti musyawarah penyusunan pengadaan bahan dan alat pada pembangunan jembatan menurut kategori selalu, kadang-kadang, tidak pernah serta jenis jenis pekerjaan yang paling banyak mengikuti yaitu Petani dengan jumlah 17 orang, dan Buruh tani sebanyak 7 orang. Selainnya Tukang, 6 orang, Guru, 3 orang, Pegawai kelurahan 4 orang, dan ABRI 2 orang.

Dari Tabel 20 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 9 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat rendah. Sedangkan frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 20 orang dengan kategori sedang. Frekuensi kehadiran masyarakat yang tidak pernah sebanyak 9 orang dengan kategori rendah.

3. Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan

Musyawarah dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh anggota masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat seperti BKM, fasilitator kelurahan, dan kepala desa. musyawarah tersebut dilakukan di Balai Desa Tanjung Rejo. Keputusan merupakan suatu keputusan yang diambil bedasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah yang dilakukan masyarakat. Untuk dapat memutuskan suatu tindakan atau keputusan akhir yang akan diambil maka dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah semua anggota musyawarah diharapkan kehadirannya. Bagi setiap anggota musyawarah yang tidak hadir tidak diberikan sanksi, namun mereka akan diberi teguran untuk

menghadiri musyawarah selanjutnya. Musyawarah diadakan wajibnya 1 x dalam seminggu. Berarti dalam satu bulan musyawarah dilakukan 4 kali, namun kadang-kadang musyawarah dalam satu minggu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Hal ini disebabkan minggu sebelumnya musyawarah tidak terlaksana karena jumlah anggota musyawarah tidak mencukupi untuk dilaksanakannya musyawarah.

Dalam musyawarah akan dibahas tentang hasil survey yang dilakukan sebelumnya, selanjutnya disepakati bersama melalui musyawarah dimana Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, setiap anggota harus memiliki pendapat dan ide masing-masing. Jika dalam musyawarah telah sepakat sesuai dengan suara terbanyak, maka akan dijalankan sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan bersama.

Dalam musyawarah dihadiri oleh seluruh masyarakat selaku penerima manfaat kegiatan dengan tujuan untuk menyepakati rencana yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan, sekaligus mensosialisasikan-nya kepada semua masyarakat. Selain tujuan tersebut, melalui musyawarah ini juga diharapkan dapat mendorong terbangunnya komitmen awal masyarakat yang lebih kuat dan transparansi dalam melakukan kegiatan tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat dalam musyawarah pengambilan keputusan pada kegiatan pembangunan jembatan dapat dilihat pada Tabel 21 dibawah ini.

Tabel 21. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	2	12	3	17
2.	Tukang	1	4	-	5
3.	Guru	-	3	-	3
4.	Pegawai kelurahan	-	2	1	3
5.	Buruh tani	3	5	1	9
6.	ABRI	1	-	1	2
	Jumlah	7	26	6	39

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 21 di atas, dapat dilihat bahwa yang mengikuti musyawarah pengambilan keputusan pada pembangunan jembatan menurut kategori selalu, kadang-kadang, tidak pernah serta jenis jenis pekerjaan yang paling banyak mengikuti yaitu Petani dengan jumlah 17 orang, dan Buruh tani sebanyak 9 orang. Selainnya Tukang, 5 orang, Guru, 3 orang, Pegawai kelurahan 3 orang, dan ABRI 2 orang.

Dari Tabel 21 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 7 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat rendah. Sedangkan frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 26 orang dengan kategori sedang. Frekuensi kehadiran masyarakat yang tidak pernah sebanyak 6 orang dengan kategori rendah.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan - kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan jembatan sebagai berikut :

1. Terlibat Dalam Kegiatan Pengorekan Pondasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan, tahap awal yang dilakukan masyarakat terlebih dahulu yaitu mengukur panjang, dan lebar jembatan yang akan dibangun, dan mengorek pondasi, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan, jadwal kerja dilakukan setiap hari secara bergantian, dimana setiap anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan pengorekan pondasi, setidaknya 1x dalam seminggu. Namun kadang-kadang pelaksanaan kegiatan pengorekan pondasi diadakan diluar rencana atau jadwal, hal ini dikarenakan adanya kesibukan dari masyarakat yang terdiri dari Petani, Tukang, Guru, Pegawai kelurahan, Buruh tani, dan ABRI, sehingga mereka ikut dalam pelaksanaan kegiatan ketika mereka memiliki waktu luang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* dilapangan, masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengorekan pondasi dan pengecoran pondasi berjumlah 39 orang. Dari 39 orang tersebut mereka memiliki kriteria yang ditetapkan oleh BKM sendiri yaitu bersedia membantu dengan suka rela, dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

pelaksanaan kegiatan pengorekan pondasi diadakan diluar rencana atau jadwal, hal ini dikarenakan masyarakat yang datang tidak tepat waktu. Untuk mengetahui frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengorekan pondasi pada kegiatan pembangunan jembatan dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengorekan Pondasi

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	4	8	5	17
2.	Tukang	2	3	-	5
3.	Guru	-	3	-	3
4.	Pegawai kelurahan	2	-	1	3
5.	Buruh tani	4	4	1	9
6.	ABRI	1	-	1	2
	Jumlah	13	18	8	39

Sumber : Data Olahan

Dilihat dari Tabel 22, frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat kegiatan pengorekan pondasi berdasarkan kategori selalu, kadang-kadang, tidak pernah, dan jenis pekerjaan terlihat pada Petani sebanyak 17 orang dan Buruh tani 9 orang, Tukang 5 orang, Guru 3 orang, Pegawai kelurahan 3 orang, dan ABRI juga sebanyak 2 orang.

Dari Tabel 22 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 13 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat rendah. Sedangkan frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 18 orang dengan kategori sedang. Frekuensi kehadiran masyarakat yang tidak pernah sebanyak 8 orang dengan kategori rendah.

2. Terlibat Dalam Kegiatan Pengecoran Pondasi

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan jembatan yaitu pengecoran pondasi. Tahap awal yang harus dilakukan masyarakat setelah pengorekan pondasi, yaitu membuat pondasi jembatan dengan kayu

(broti), papan, tepas, dan besi. Setelah itu, pondasi diberi pasir , semen, dan batu. yang sudah diaduk terlebih dahulu sampai rata. Jadwal kerja dilakukan masyarakat setiap hari selama 1 minggu. Untuk mengetahui frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengecoran pondasi pada kegiatan pembangunan jembatan dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengecoran Pondasi

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	6	7	4	17
2.	Tukang	3	2	1	6
3.	Guru	2	1	-	3
4.	Pegawai kelurahan	2	-	1	3
5.	Buruh tani	5	3	-	8
6.	ABRI	1	-	1	2
	Jumlah	19	13	7	39

Sumber : Data Olahan

Dilihat dari Tabel 23, frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat kegiatan pengecoran pondasi berdasarkan kategori selalu, kadang-kadang, tidak pernah, dan jenis pekerjaan terlihat pada Petani sebanyak 17 orang dan Buruh tani 8 orang, Tukang 6 orang, Guru 3 orang, Pegawai kelurahan 3 orang, dan ABRI juga sama seperti kegiatan pengorekan pondasi yaitu sebanyak 2 orang.

Dari Tabel 23 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 19 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat sedang. Sedangkan frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 13 orang dengan kategori rendah. Frekuensi kehadiran masyarakat yang tidak pernah sebanyak 7 orang dengan kategori rendah.

Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat pada kegiatan pembangunan jembatan dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Hasil Skor Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan

No.	Kegiatan	Jumlah Responden	Nilai skor	Nilai yang diperoleh
1	Pembangunan Jembatan			
	A. Tahap Perencanaan:			
	a. Terlibat dalam rapat pembuatan proposal usulan kegiatan			
	- Selalu mengikuti (3-4x dalam sebulan)	12	2	24
	- Kadang-kadang (1-2x dalam sebulan)	11	1	11
	- Tidak pernah terlibat	16	0	0
	b. Terlibat dalam musyawarah penyusunan pengadaan bahan dan alat			
	- Selalu mengikuti (3-4x dalam sebulan)	9	2	18
	- Kadang-kadang (1-2x dalam sebulan)	20	1	20
	- Tidak pernah terlibat	10	0	0
	c. Terlibat dalam pengambilan keputusan			
	- Selalu mengikuti (3-4x) dalam sebulan	7	2	14
	- Kadang-kadang (1-2x dalam sebulan)	25	1	25
	- Tidak pernah terlibat	7	0	0
2	B. Pelaksanaan Pembangunan Jembatan			

	a. Terlibat dalam kegiatan pengorekan pondasi			
	- Selalu mengikuti (4 – 6 kali)	13	2	26
	- Kadang-kadang (1 – 3 kali)	17	1	17
	- Tidak pernah terlibat	9	0	0
	b. Terlibat dalam pengecoran pondasi			
	- Selalu mengikuti (4 – 6 kali)	19	2	38
	- Kadang-kadang (1 – 3 kali)	13	1	13
	- Tidak pernah terlibat	7	0	0
	Jumlah skor			206
	Jumlah skor yang diharapkan			390
	Persentase skor			52,82 %

Dari Tabel 24, dapat dilihat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan jembatan, yaitu meliputi kegiatan pembuatan proposal usulan, musyawarah penyusunan pengadaan bahan dan alat, pengambilan keputusan. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi pengorekan pondasi, dan pengecoran pondasi. Jadi dapat disimpulkan dari hasil skor bahwa keterlibatan masyarakat Desa Tanjung Rejo dalam pelaksanaan pembangunan jembatan termasuk sedang yaitu sebesar (52,82 %). Hal ini disebabkan karena jumlah masyarakat yang terlibat cukup banyak dibandingkan jumlah masyarakat yang tidak terlibat.

4.7 Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Drainase

a. Tahap Perencanaan

Kegiatan - kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan drainase sebagai berikut :

1. Terlibat Dalam Pembuatan Proposal Usulan

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki (Mardikanto, 2009).

Dengan adanya suatu perencanaan kegiatan pembangunan drainase, maka akan memberikan kerangka acuan kerja yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat dan stakeholder yang terlibat untuk mengambil suatu keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya pembangunan yang diinginkan. Penyusunan proposal usulan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan drainase. Berdasarkan hasil wawancara dengan key informant tujuan dari pembuatan proposal usulan kegiatan ini yaitu sebagai petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan, dan untuk memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan P2KP.

Dalam musyawarah pembuatan proposal usulan kegiatan, pihak yang terlibat adalah ketua BKM, fasilitator kelurahan, kepala desa, dan masyarakat. Dalam musyawarah, seluruh anggota masyarakat yang hadir, mereka masuk, mengisi daftar hadir dengan menulis nama dan tanda tangan, kemudian duduk, diskusi, dan bebas mengeluarkan pendapat. Hal tersebut, merupakan bentuk keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan drainase yang akan dilakukan. Menurut Ban dan Hawkins (1999) partisipasi pihak-pihak yang terlibat dalam program pembangunan sering dipandang sebagai jalan meraih sukses.

Musyawarah pembuatan proposal usulan dilakukan oleh anggota masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat seperti BKM, fasilitator kelurahan, dan kepala desa. Musyawarah tersebut dilakukan di Balai Desa Tanjung Rejo. Untuk dapat memutuskan suatu tindakan yang akan dilakukan maka dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah semua anggota musyawarah diharapkan kehadirannya. Bagi setiap anggota musyawarah yang tidak hadir tidak diberikan sanksi, namun mereka akan diberi teguran untuk menghadiri musyawarah selanjutnya. Musyawarah diadakan wajibnya 1 x dalam seminggu. Berarti dalam

satu bulan musyawarah dilakukan 4 kali, namun kadang-kadang musyawarah dalam satu minggu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Hal ini disebabkan minggu sebelumnya musyawarah tidak terlaksana karena jumlah anggota musyawarah tidak mencukupi untuk dilaksanakannya musyawarah.

Dalam musyawarah akan dibahas tentang pembuatan proposal usulan kegiatan yang meliputi : teknis drainase yang akan dibangun, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, menyusun rencana pengadaan bahan dan alat, penyusunan struktur organisasi, dan kendala yang dihadapi masyarakat yaitu saluran air yang tidak lancar, sehingga apabila turun hujan sawah dan rumah masyarakat banjir dan digenangi air hujan. Musyawarah dilakukan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Untuk mengetahui lebih jelas frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat dalam musyawarah pembuatan proposal usulan pada kegiatan pembangunan drainase dapat dilihat pada Tabel 25 dibawah ini.

Tabel 25. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Dalam Musyawarah Pembuatan Proposal Usulan Pada Kegiatan Pembangunan Drainase Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	3	1	-	4
2.	Tukang	2	-	-	2
3.	Guru	1	-	-	1
4.	Pegawai kelurahan	1	2	-	3
5.	Buruh tani	1	-	-	1
6.	ABRI	1	-	-	1
	Jumlah	9	3	-	12

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 25 di atas, dapat dilihat bahwa yang mengikuti musyawarah pembuatan proposal usulan kegiatan pada pembangunan drainase menurut kategori selalu, kadang-kadang, tidak pernah serta jenis jenis pekerjaan yang paling banyak mengikuti yaitu Petani sebanyak 4 orang, Tukang 2 orang, Guru 1 orang, Pegawai kelurahan 3 orang, Buruh tani 1 orang, dan ABRI juga sama yaitu hanya 1 orang.

Dari Tabel 25 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 9 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat tinggi. Sedangkan frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 3 orang dengan kategori rendah.

2. Terlibat Dalam Penyusunan Pengadaan Bahan dan Alat

Pengadaan yang dimaksudkan disini adalah Pembelian bahan bangunan atau sewa peralatan konstruksi untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan drainase, termasuk juga tenaga kerja bila diperlukan. Sedangkan tujuan penyusunan rencana pengadaan bahan dan alat ini adalah untuk mendorong adanya proses transparansi dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan yang terkait dengan pengadaan bahan dan alat.

Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari tahap-tahap penyusunan pengadaan bahan dan alat, seperti menentukan jenis bahan dan alat yang diperlukan, menentukan biaya pengadaan setiap jenis bahan dan sewa alat, menentukan nama dan alamat jelas dari toko yang direncanakan, dan menentukan jadwal pelaksanaan dari setiap item pengadaan bahan dan alat. Musyawarah penyusunan pengadaan bahan dan alat dilakukan oleh anggota masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat seperti BKM, fasilitator kelurahan, dan kepala desa. Musyawarah tersebut dilakukan di Balai Desa Tanjung Rejo. Untuk dapat memutuskan suatu tindakan yang akan dilakukan maka dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah semua anggota musyawarah diharapkan kehadirannya. Bagi setiap anggota musyawarah yang tidak hadir tidak diberikan sanksi, namun mereka akan diberi teguran untuk menghadiri musyawarah selanjutnya. Musyawarah diadakan wajibnya 1 x dalam seminggu. Berarti dalam satu bulan musyawarah dilakukan 4 kali, namun kadang-kadang musyawarah dalam satu minggu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Hal ini disebabkan minggu sebelumnya musyawarah tidak terlaksana karena jumlah anggota musyawarah tidak mencukupi untuk dilaksanakannya musyawarah.

Dalam musyawarah semua anggota diharapkan kehadirannya. Bagi setiap anggota yang tidak hadir tidak diberikan sanksi, namun mereka akan diberi teguran untuk menghadiri selanjutnya. Untuk mengetahui lebih jelas frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat dalam musyawarah penyusunan

pengadaan bahan dan alat pada kegiatan pembangunan drainase dapat dilihat pada Tabel 26 dibawah ini.

Tabel 26. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Dalam Musyawarah Penyusunan Pengadaan Bahan dan Alat Pada Kegiatan Pembangunan Drainase Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	3	-	1	4
2.	Tukang	1	1	-	2
3.	Guru	-	1	-	1
4.	Pegawai kelurahan	1	-	2	3
5.	Buruh tani	1	-	-	1
6.	ABRI	-	1	-	1
	Jumlah	6	3	3	12

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 26 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah msayarakat yang mengikuti musyawarah penyusunan pengadaan bahan dan alat pada pembangunan drainase menurut kategori selalu, kadang-kadang, tidak pernah serta jenis pekerjaan sama, yaitu Petani sebanyak 4 orang, Tukang 2 orang, Guru 1 orang, Pegawai kelurahan 3 orang, Buruh tani 1 orang, dan ABRI 1 orang.

Dari Tabel 26 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 6 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat sedang. Sedangkan frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 3 orang dengan kategori rendah. Frekuensi kehadiran masyarakat yang tidak pernah sebanyak 3 orang dengan kategori rendah.

3. Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan

Musyawarah dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh anggota masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat seperti BKM, fasilitator kelurahan, dan kepala desa. Musyawarah tersebut dilakukan di Balai Desa Tanjung Rejo. Keputusan merupakan suatu keputusan yang diambil bedasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah yang dilakukan masyarakat. Untuk dapat memutuskan suatu tindakan atau keputusan akhir yang akan diambil maka dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah semua anggota

musyawarah diharapkan kehadirannya. Bagi setiap anggota musyawarah yang tidak hadir tidak diberikan sanksi, namun mereka akan diberi teguran untuk menghadiri musyawarah selanjutnya. Musyawarah diadakan wajibnya 1 x dalam seminggu. Berarti dalam satu bulan musyawarah dilakukan 4 kali, namun kadang-kadang musyawarah dalam satu minggu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Hal ini disebabkan minggu sebelumnya musyawarah tidak terlaksana karena jumlah anggota musyawarah tidak mencukupi untuk dilaksanakannya musyawarah.

Dalam musyawarah akan dibahas tentang hasil survey yang dilakukan sebelumnya, selanjutnya disepakati bersama melalui musyawarah dimana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dimana setiap anggota harus memiliki pendapat dan ide masing-masing. Jika dalam musyawarah telah sepakat sesuai dengan suara terbanyak, maka akan dijalankan sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan bersama.

Dalam musyawarah dihadiri oleh seluruh masyarakat selaku penerima manfaat kegiatan dengan tujuan untuk menyepakati rencana yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase, sekaligus men-sosialisasikannya kepada semua masyarakat. Selain tujuan tersebut, melalui musyawarah ini juga diharapkan dapat mendorong terbangunnya komitmen awal masyarakat yang lebih kuat dan transparansi dalam melakukan kegiatan tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat dalam musyawarah pengambilan keputusan pada kegiatan pembangunan drainase dapat dilihat pada Tabel 27 dibawah ini.

Tabel 27. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pembangunan Drainase Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	2	2	-	4
2.	Tukang	1	1	-	2
3.	Guru	1	-	-	1
4.	Pegawai kelurahan	2	1	-	3
5.	Buruh tani	1	-	-	1
6.	ABRI	1	-	-	1
	Jumlah	8	4	-	12

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel 27 di atas, dapat dilihat bahwa yang mengikuti musyawarah pengambilan keputusan pada pembangunan drainase menurut kategori selalu, kadang-kadang, tidak pernah serta jenis pekerjaan memiliki kesamaan dengan masyarakat yang mengikuti musyawarah penyusunan pengadaan bahan dan alat, seperti Petani yaitu 4 orang, Tukang 2 orang, Pegawai kelurahan. Sedangkan untuk Guru, Buruh tani, dan ABRI hanya 1 orang.

Dari Tabel 27 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 8 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat sedang. Sedangkan frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 4 orang dengan kategori rendah.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan - kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan drainase sebagai berikut :

1. Terlibat Dalam Kegiatan Penggalan Tanah

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase, tahap awal yang dilakukan masyarakat terlebih dahulu yaitu penggalian tanah/parit-parit kecil yang akan dikorek, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase, jadwal kerja dilakukan setiap hari secara bergantian, dimana setiap anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan penggalian tanah/parit-parit kecil, yaitu 1x dalam seminggu. Namun kadang-kadang pelaksanaan kegiatan diadakan diluar rencana atau jadwal, hal ini dikarenakan adanya kesibukan dari masyarakat yang terdiri dari Petani, Tukang, Guru, Pegawai kelurahan, Buruh tani, dan ABRI, sehingga mereka ikut dalam pelaksanaan kegiatan ketika mereka memiliki waktu luang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* dilapangan, masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembersihan jalan berjumlah 12 orang. Dari 12 orang tersebut mereka memiliki kriteria yang ditetapkan oleh BKM sendiri yaitu bersedia membantu dengan suka rela, dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk mengetahui kehadiran masyarakat yang terlibat pada tahap pelaksanaan kegiatan penggalian tanah dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penggalian Tanah

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	4	1	-	5
2.	Tukang	2	-	-	2
3.	Guru	1	-	-	1
4.	Pegawai kelurahan	1	1	-	2
5.	Buruh tani	1	-	-	1
6.	ABRI	1	-	-	1
	Jumlah	10	2	-	12

Sumber : Data Olahan

Dilihat dari Tabel 28, frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat kegiatan penggalian tanah berdasarkan kategori selalu, kadang-kadang, tidak pernah, dan jenis pekerjaan terlihat pada Petani sebanyak 5 orang, tukang dan pegawai kelurahan sebanyak 2 orang, sedangkan yang lainnya hanya 1 orang seperti Guru, buruh tani, dan ABRI.

Dari Tabel 28 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 10 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat tinggi. Sedangkan frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 2 orang dengan kategori rendah.

2. Terlibat Dalam Kegiatan Pemasangan Batu Bata

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan drainase yaitu pemasangan batu bata, artinya setelah dilakukan penggalian tanah / pari-parit kecil, maka dilakukan pemasangan batu bata. Bahan yang digunakan adalah pasir, semen, dan batu bata. Jadwal kerja yang dilakukan yaitu 1 x dalam seminggu. Kedala yang dihadapi masyarakat yaitu terkadang kegiatan tersebut diadakan diluar rencana atau jadwal, dikarenakan masyarakat yang datang tidak tepat waktu. Untuk mengetahui kehadiran masyarakat yang terlibat pada tahap pelaksanaan kegiatan pemasangan batu batadapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemasangan Batu bata

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	4	-	1	5
2.	Tukang	2	-	-	2
3.	Guru	1	-	-	1
4.	Pegawai kelurahan	1	1	-	2
5.	Buruh tani	1	-	-	1
6.	ABRI	-	-	1	1
	Jumlah	9	1	2	12

Sumber : Data Olahan

Dilihat dari Tabel 29, frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat kegiatan pemasangan Batu-bata berdasarkan kategori selalu, kadang-kadang, tidak pernah, dan jenis pekerjaan terlihat pada total memiliki kesamaan seperti terlihat pada Petani sebanyak 5 orang, tukang dan pegawai kelurahan sebanyak 2 orang, sedangkan yang lainnya hanya 1 orang seperti Guru, buruh tani, dan ABRI.

Dari Tabel 29 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 9 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat tinggi. Sedangkan frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 1 orang dengan kategori rendah. Frekuensi kehadiran masyarakat yang tidak pernah sebanyak 2 orang dengan kategori rendah.

3. Terlibat Dalam Kegiatan Pelesteran

Setelah dilakukan kegiatan pemasangan batu bata, tanah yang sudah digali atau dikorek, dan di pasang batu bata, selanjutnya diplester. Dalam kegiatan plesteran ini jadwal kerja yang dilakukan masyarakat yaitu 1 minggu. Namun kendala yang dihadapi hampir sama dengan kegiatan yang lainnya, yaitu kegiatan tersebut diadakan diluar rencana atau jadwal, karena masyarakat yang datang tidak tepat waktu. Untuk mengetahui kehadiran masyarakat yang terlibat pada tahap pelaksanaan kegiatan pelestiran dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Frekuensi Kehadiran Masyarakat Yang Ikut Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelesteran

No.	Pekerjaan	Frekuensi Kehadiran Masyarakat			
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah	Total
1.	Petani	1	1	2	4
2.	Tukang	2	-	-	2
3.	Guru	-	1	-	1
4.	Pegawai kelurahan	1	-	2	3
5.	Buruh tani	1	-	-	1
6.	ABRI	1	-	-	1
	Jumlah	6	2	4	12

Sumber : Data Olahan

Dilihat dari Tabel 30, frekuensi kehadiran masyarakat yang ikut terlibat kegiatan penggalian tanah berdasarkan kategori selalu, kadang-kadang, tidak pernah, dan jenis pekerjaan terlihat bahwa pada Petani sebanyak 4 orang, Tukang 2 orang, Pegawai kelurahan sebanyak 3 orang, sedangkan yang lainnya hanya 1 orang seperti Guru, buruh tani, dan ABRI.

Dari Tabel 30 dapat dilihat jumlah keterlibatan masyarakat berdasarkan frekuensi kehadiran yang selalu hadir sebanyak 6 orang. Hal ini dapat dikategorikan keterlibatan masyarakat sedang. Sedangkan frekuensi kehadiran masyarakat yang kadang-kadang sebanyak 2 orang dengan kategori rendah. Frekuensi kehadiran masyarakat yang tidak pernah sebanyak 4 orang dengan kategori rendah.

Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat pada kegiatan pembangunan drainase dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Hasil Skor Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Drainase.

No.	Kegiatan	Jumlah Responden	Nilai skor	Nilai yang diperoleh
1.	Tahap perencanaan kegiatan pembangunan drainase: a. Terlibat dalam rapat pembuatan proposal usulan kegiatan - Selalu	8	2	16

	<p>mengikuti (3-4x dalam sebulan)</p> <p>- Kadang-kadang (1-2x dalam sebulan)</p> <p>- Tidak pernah terlibat</p> <p>b. Terlibat dalam musyawarah penyusunan pengadaan bahan dan alat</p> <p>- Selalu mengikuti (3-4x dalam sebulan)</p> <p>- Kadang-kadang (1-2x dalam sebulan)</p> <p>- Tidak pernah terlibat</p> <p>c. Terlibat dalam pengambilan keputusan</p> <p>- Selalu mengikuti (3-4x dalam sebulan)</p> <p>- Kadang-kadang (1-2x kali sebulan)</p> <p>- Tidak pernah terlibat</p>	<p>4</p> <p>-</p> <p>6</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>8</p> <p>4</p> <p>-</p>	<p>1</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>	<p>4</p> <p>-</p> <p>12</p> <p>3</p> <p>0</p> <p>16</p> <p>4</p> <p>0</p>
2.	<p>Tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase:</p> <p>a. Terlibat dalam kegiatan penggalian tanah</p> <p>- Slalu mengikuti (4 – 6 kali)</p> <p>- Kadang-kadang (1 – 3 kali)</p> <p>- Tidak pernah terlibat</p> <p>b. Terlibat dalam kegiatan pemasangan batu bata</p> <p>- Selalu</p>	<p>10</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>9</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>2</p>	<p>20</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>18</p>

	mengikuti (4 – 6 kali)			
	- Kadang-kadang (1 – 3 kali)	1	1	1
	- Tidak pernah terlibat	2	0	0
c.	Terlibat dalam kegiatan plesteran			
	- Selalu mengikuti (4 – 6 kali)	6	2	12
	- Kadang-kadang (1 – 3 kali)	2	1	2
	- Tidak pernah terlibat	4	0	0
	Jumlah skor			110
	Jumlah skor yang diharapkan			144
	Persentase skor			76,38 %

Dari Tabel 31, dapat dilihat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan peningkatan kualitas jalan, yang meliputi kegiatan pembuatan proposal usulan, musyawarah penyusunan pengadaan bahan dan alat, pengambilan keputusan. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi penggalian tanah, pemasangan batu bata, dan plesteran. Jadi dapat disimpulkan dari hasil skor bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase termasuk tinggi yaitu sebesar (76,38 %). Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang terlibat lebih banyak, karena masyarakat merasa pembangunan tersebut harus lebih diutamakan supaya sawah dan rumah masyarakat tidak terjadi banjir lagi seperti yang dirasakan masyarakat selama ini apabila turun hujan.

4.8 Manfaat yang Dirasakan Masyarakat Setelah Terjadinya Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian di Desa Tanjung Rejo

1. Manfaat Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan :

a. Mempermudah Mengangkut Hasil Pertanian

Jalan yaitu berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan atau ke lokasi pemasaran, atau berfungsi sebagai penghubung dari rumah satu kerumah yang lainnya, serta juga berfungsi sebagai penghubung desa ke pusat kegiatan.

Jalan dibangun atau ditingkatkan untuk memberikan manfaat-manfaat bagi masyarakat, seperti : a) Membuka isolasi; b) Mempermudah pengiriman sarana produksi; c) Mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa maupun yang diluar, dan d) Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan dan penyuluhan.

Kegiatan peningkatan kualitas jalan merupakan suatu proses pembangunan ekonomi pedesaan dimana terdapat beberapa dampak positif yang akan didapat dari proses kegiatan peningkatan kualitas jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden sebelum dilakukan kegiatan peningkatan kualitas jalan, kondisi jalan di desa ini rusak seperti kondisi jalan berlubang, tidak rata, belum di sirtu, dan licin. Dengan kondisi tersebut menyebabkan masyarakat dalam mengangkut hasil pertaniannya sulit melewati jalan ini. Sedangkan setelah adanya peningkatan kualitas jalan masyarakat menjadi lebih mudah untuk membawa dan memasarkan hasil pertaniannya ke pasar dikarenakan sudah adanya kendaraan umum yang melewati jalan tersebut.

b. Peningkatan Sarana Transportasi di Desa Tanjung Rejo

Sarana transportasi merupakan suatu sarana yang dapat mendukung segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat. Transportasi merupakan alat yang dapat membantu seseorang untuk mendorong menyelesaikan segala kegiatan yang akan dilakukan. Menurut responden yang ditemui di lapangan, sebelum terjadinya kegiatan peningkatan kualitas jalan, sarana transportasi umum di desa tersebut kurang memadai dikarenakan kondisi jalan yang rusak, sehingga angkutan umum di Desa Tanjung Rejo tidak mau masuk. Kemudian masyarakat juga harus berjalan kaki membawa hasil pertaniannya keluar lahan pertanian mereka. Dan tidak hanya itu, untuk memasarkan hasil pertaniannya ke pasar, pada umumnya masyarakat juga harus mengendarai sepeda dari rumah mereka, kemudian memakai jasa angkutan umum untuk sampai ke pasar, karena pada dasarnya kendaraan sehari-hari yang dipakai masyarakat untuk keluar masuk desa dan mengangkut hasil pertaniannya seperti padi, tebu, kayu, dan lain-lain yaitu dengan memakai sepeda. Berdasarkan hasil penelitian setelah adanya kegiatan peningkatan kualitas jalan dengan sirtu, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kemajuan di Desa Tanjung Rejo, yaitu masuknya angkutan umum ke desa,

sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengangkut hasil- hasil pertanian mereka.

c. Percepatan Waktu

Kegiatan peningkatan kualitas jalan di Desa Tanjung Rejo tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat untuk membawa hasil pertaniannya tetapi juga memberikan manfaat terhadap peningkatan sarana transportasi masyarakat di desa tersebut. Menurut responden yang ditemui dilapangan, sebelum terjadinya kegiatan peningkatan kualitas jalan, waktu yang ditempuh masyarakat untuk melakukan segala aktivitas-aktivitas mereka seperti memasarkan hasil-hasil pertanian mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu yang biasa ditempuh masyarakat untuk memasarkan hasil pertaniannya ke pasar adalah 60 menit. Sedangkan setelah adanya kegiatan peningkatan kualitas jalan, waktu yang ditempuh masyarakat untuk memasarkan hasil pertaniannya adalah 30 menit. Dengan demikian, kondisi tersebut jelas menyatakan, bahwa terjadinya perubahan waktu yang ditempuh masyarakat Desa Tanjung Rejo untuk membawa dan memasarkan hasil pertaniannya.

2. Manfaat Kegiatan Pembangunan Jembatan :

a. Sebagai Penghubung Jalan

Jembatan merupakan sebagai alat untuk menghubungkan jalan satu dengan jalan yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden kegiatan pembangunan jembatan yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo dikarenakan kondisi jembatan tersebut kurang layak untuk dilalui. Selama ini jembatan yang dibuat masyarakat hanya seadanya saja, seperti kondisi jembatan terbuat dari kayu, rusak, berlubang, kecil, dan kondisi kayunya yang lapuk (mudah patah), sehingga tidak bisa dilalui oleh mobil atau truk. Dengan kondisi tersebut masyarakat harus membawa hasil pertaniannya keluar lahan pertanian dengan memikul di kepala dan di pundak mereka.

Sedangkan setelah terjadinya pembangunan jembatan masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengangkut hasil pertanian mereka keluar lahan pertanian. Kemudian masyarakat tidak lagi membawa hasil pertanian mereka dengan memikulnya di kepala dan di pundak mereka. Hal tersebut dikarenakan, kondisi

jembatan yang baik maksudnya, kondisi jembatan sudah dibangun dengan memakai pondasi besi, dan disemen supaya jembatan tersebut kuat dan bisa dilalui mobil atau truk.

b. Mempermudah Transportasi Masuk ke Lahan Pertanian

Kegiatan pembangunan jembatan yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo, tidak hanya bermanfaat sebagai penghubung jalan antara jalan satu dengan jalan lainnya, tetapi juga memberikan manfaat terhadap sarana transportasi. Berdasarkan wawancara dengan responden, bahwa sebelum terjadinya pembangunan jembatan, kendaraan seperti mobil atau truk sulit untuk masuk ke lahan pertanian dikarenakan, kondisi jembatan yang kurang layak untuk dilalui. Dengan kondisi tersebut masyarakat harus membawa dan memikul hasil pertaniannya di kepala atau di pundak mereka. Sedangkan setelah terjadinya pembangunan jembatan, masyarakat menjadi lebih mudah untuk membawa dan memasarkan hasil pertaniannya, sedangkan kendaraan umum sudah bisa melewati jembatan tersebut.

c. Percepatan Waktu

Kegiatan pembangunan jembatan di Desa Tanjung Rejo, memberikan manfaat terhadap percepatan waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden waktu yang biasanya lama dibutuhkan masyarakat untuk membawa dan memasarkan hasil pertanian mereka tetapi, setelah adanya pembangunan jembatan, waktu yang dilalui menjadi lebih cepat. Hal ini dikarenakan kondisi jembatan yang sudah baik karena sudah dibangun dengan memakai pondasi yang kuat dan disemen. Kemudian, kendaraan umum sudah mudah masuk ke lahan pertanian mereka.

3. Manfaat Kegiatan Pembangunan Drainase

a. Mencegah Terjadinya Banjir

Pembangunan drainase dilakukan masyarakat Desa Tanjung Rejo, dikarenakan adanya keluhan dari masyarakat yang menyatakan kondisi lahan pertanian mereka yang banjir. Menurut wawancara dengan responden, sebelum dilakukan pembangunan drainase di Desa Tanjung Rejo, kondisi drainase di desa

tersebut tidak baik, maksudnya kondisi drainase yang kecil, dan dangkal sehingga membuat saluran airnya menjadi tersumbat, hal ini juga dikarenakan adanya sampah yang masuk dan menumpuk didalam drainase. Sedangkan, setelah terjadinya pembangunan drainase, saluran air menjadi lancar dikarenakan, sampah yang menyumbat didalam drainase sudah diambil dan dikorek, ukuran drainase juga lebih besar. Dengan demikian, hal tersebut dapat mencegah terjadinya banjir.

b. Memperlancar Saluran Air

Pembangunan drainase sangat bermanfaat bagi masyarakat terhadap lahan pertaniannya. Berdasarkan wawancara dengan responden, Sebelum kegiatan pembangunan drainase ini dilakukan, air yang berada didalam drainase tidak lancar. Kondisi tersebut dikarenakan, apabila turun hujan lahan pertanian masyarakat digenangi air, sehingga lahan pertanian masyarakat menjadi banjir. Sedangkan setelah terjadinya pembangunan drainase lahan pertanian masyarakat Desa Tanjung Rejo tidak lagi banjir digenangi air hujan, dan ini dikarenakan kondisi drainase yang sudah lebih besar karena sudah dikorek, sehingga dapat memperlancar saluran air pada drainase.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) (Kasus : di Desa Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan prasarana pendukung pertanian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Rejo. Pembangunan prasarana pendukung pertanian tersebut terdiri dari 3 jenis kegiatan yaitu ; 1) Kegiatan pembangunan peningkatan kualitas jalan, 2) Pembangunan jembatan, 3) Dan pembangunan drainase. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian ini belum seluruhnya berjalan lancar sebagaimana mestinya. Bila dilihat dari segi prosesnya dalam melakukan musyawarah pada setiap jenis kegiatan sudah berjalan dengan baik. Bila dilihat dari stakeholder tidak semua yang diharapkan ikut terlibat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Dan bila dilihat dari segi waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat dari hasil musyawarah. Sedangkan pada proses pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan yang dilakukan termasuk dalam pembuatan proposal usulan dan laporan pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan yang diharapkan.
2. Mengukur dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian yaitu :
Pada pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian ini dapat diketahui keterlibatan masyarakat pada setiap jenis kegiatan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pada kegiatan peningkatan kualitas jalan dan kegiatan pembangunan jembatan termasuk kategori sedang yaitu dengan persentase 63,12% dan 52,82%. Hal ini disebabkan karena kurangnya respon dari masyarakat yang menganggap program tersebut dari pemerintah dan pemerintah juga yang melakukan kegiatan tersebut, dan masyarakat hanya menerima dan memanfaatkannya. Pada kegiatan

pembangunan drainase keterlibatan masyarakat termasuk kategori tinggi dengan persentase 76,38%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang terlibat lebih banyak, karena masyarakat merasa pembangunan tersebut harus lebih diutamakan supaya sawah dan rumah masyarakat tidak terjadi banjir lagi seperti yang dirasakan masyarakat selama ini apabila turun hujan.

3. Manfaat yang dirasakan masyarakat setelah terjadinya pembangunan prasarana pendukung pertanian seperti :
 - a) Peningkatan kualitas jalan yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membawa dan memasarkan hasil pertaniannya kepasar dikarenakan sudah adanya kendaraan umum yang melewati jalan tersebut, terjadinya kemajuan dengan masuknya angkutan umum ke desa, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengangkut hasil- hasil pertanian mereka, dan terjadinya perubahan waktu yang ditempuh masyarakat lebih cepat untuk membawa dan memasarkan hasil pertanian mereka.
 - b) Pembangunan jembatan yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai penghubung antara jalan satu dengan jalan lainnya, sehingga waktu yang ditempuh masyarakat menjadi lebih cepat untuk membawa dan memasarkan hasil pertaniannya.
 - c) Pembangunan drainase yaitu saluran air menjadi lancar dikarenakan, sampah yang menyumbat didalam drainase sudah diambil dan dikorek, ukuran drainase menjadi lebih besar. Dengan demikian, hal tersebut dapat mencegah terjadinya banjir pada rumah dan lahan pertanian masyarakat.

5.2 Saran

1. Dengan terlaksananya program pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian tersebut dengan baik, maka diharapkan agar P2KP dapat melanjutkan program tersebut dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang fokus pada kegiatan pembangunan fisik.
2. Disarankan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya termasuk melayani keluhan masyarakat seperti keluhan mereka terhadap akses

jalan, jembatan, dan drainase yang kurang baik, sehingga menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengangkut dan memasarkan hasil pertanian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. *Profil Deli Serdang*.
[http://: www. Deliserdang.go.id](http://www.Deliserdang.go.id). [2009/11/27]
- Anita, D. 2005. *Peran Serta Masyarakat Melalui Sistem BPLM Dalam Pengembangan Agribisnis Dipedesaan Provinsi Bengkulu*. Skripsi Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang.
- Ban, A.W. Van Den dan H.S. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta.
- Chambers,Robert. 1982. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. LP3ES. Jakarta
- Daniel, Moehar dkk. 2006. *PRA (Participatory Rural Appraisal): Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluh Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*. Bumi Aksara. Yogyakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2005. *Pedoman Umum P2KP*. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta
- Departemen Pekerjaan Umum. 2005. *Modul Petunjuk Teknis Perencanaan*. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.
- Dillon, H.S. 2004. *Pertanian Mandiri : Pertanian Membangun Bangsa*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Kartasasmita. G. 1996. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*.
<http://www.ginanjari.com>. [21 februari 2008].
- Mardikanto, Totok. 2009. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Mosher, AT. 1987. *Menggerakkan Dan Membangun Pertanian*. C.V. Yasaguna. Jakarta.
- Mubyarto. 1989, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Penerbit Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Jakarta.
- Nazir, Muhammad. 2003. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nugroho, Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

- Osesi, S. Rini. 2007. *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Melalui Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) Dengan Penyelenggaraan Sekolah Lapang (SL) di Kec. Koto Tangah Kota Padang*. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. 2007. *Profil Desa / Kelurahan, Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang*. Sumatera Utara
- Purwantini, Bastuti. Tri, dan Rivai, Sunarja. Rudi, 2008. *Dampak pembangunan prasarana Transportasi terhadap kesejahteraan Masyarakat pedesaan Kasus Kabupaten Bulu Kumba Sulawesi Selatan*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian. http://www.pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/MS_A4.pdf. {14 Maret 2010}.
- Karsidi, Ravik. 2001. *Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Pambudy dan A.K. Adhy (ed.): Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*, Penerbit Pustaka Wirausaha Muda. Bogor
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soetrisno, Loekman. 2003. *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian: Sebuah Tinjauan Sosiologis*. Kanisius. Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Supadi. 2007. *Dinamika Partisipasi Petani Padi Sawah Peserta Program Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) di Jawa*. Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor [http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/MS_A4.pdf]
- _____. 2008. *Menggalang Partisipasi Petani untuk Meningkatkan Produksi Kedelai Menuju Swasembada*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor [<http://pse.litbang.deptan.go.id>]
- Suparjan. 2003. *Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Syahrial. 2008. *Efektifitas Modal Dana Bergulir Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang.
- Yudhoyono, S. Bambang, 2006, *Pembangunan Pertanian Indonesia dari Revolusi Hijau ke Pertanian Berkelanjutan*, Orasi Ilmiah di Universitas Andalas Padang Tanggal 21 September 2006 <http://www.indonesia.go.id> { 14 April 2008}.

Lampiran 1. Matriks Data Set Penelitian

No.	Tujuan Penelitian	Variabel yang diamati	Jenis/sumber data	Metoda Pengambilan data	Analisa data
1.	Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pendukung pertanian dalam P2KP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis kegiatan yang dilaksanakan 2. Stakeholder yang ikut melaksanakan kegiatan 3. Waktu pelaksanaan kegiatan 4. Lokasi pelaksanaan kegiatan 5. Proses pelaksanaan kegiatan 	Primer dan sekunder/ sampel dan informan kunci	Wawancara, Daftar pertanyaan	Deskriptif kualitatif
2.	Mengukur dan mengetahui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana pendukung pertanian dalam P2KP	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas jalan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan proposal usulan b. Musyawarah menyusun rencana pengadaan bahan dan alat c. Pengambilan keputusan 2. Kegiatan pembangunan jembatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan proposal usulan b. Musyawarah menyusun rencana pengadaan bahan dan alat c. Pengambilan keputusan 3. Kegiatan pembangunan drainase: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan proposal usulan b. Musyawarah menyusun 	Primer dan sekunder/ sampel dan informan kunci	Wawancara, Daftar pertanyaan	Deskriptif kuantitatif

		rencana pengadaan bahan dan alat c. Pengambilan keputusan • Pelaksanaan kegiatan: 1. Kegiatan peningkatan kualitas jalan: a. Pembersihan jalan b. Pengerasan jalan dengan sirtu 2. Kegiatan pembangunan jembatan: a. Pengorekan pondasi b. Pengecoran pondasi 3. Kegiatan pembangunan drainase: a. Penggalian tanah b. Pemasangan batu bata c. Pelesteran	Primer dan sekunder/ sampel dan informan kunci	Wawancara, Daftar pertanyaan	Deskriptif kuantitatif
3.	Mengetahui manfaat apa yang dirasakan masyarakat setelah terjadinya pembangunan prasarana pendukung pertanian tersebut	Manfaat yang dirasakan masyarakat setelah terjadinya: 1. Kegiatan pembangunan jalan: a. Mempermudah mengangkut hasil pertanian b. Peningkatan sarana transportasi c. Percepatan waktu 2. Kegiatan pembangunan jembatan: a. Menjadi penghubung jalan	Primer dan sekunder/ sampel dan informan kunci	Wawancara	Deskriptif kualitatif

		<ul style="list-style-type: none"> b. Mempermudah transportasi masuk ke lahan pertanian c. Percepatan waktu <p>3. Kegiatan pembangunan drainase:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah terjadinya banjir b. Memperlancar saluran air 			
--	--	---	--	--	--

Lampiran 2. Alokasi Dana BLM Di Kecamatan Percut Sei Tuan

No.	Nama Desa	Jumlah	
		Penduduk Jiwa	Dana BLM
1.	Cinta Damai	4864	Rp 300.000.000.-
2.	Tanjung Rejo	7584	Rp 500.000.000.-

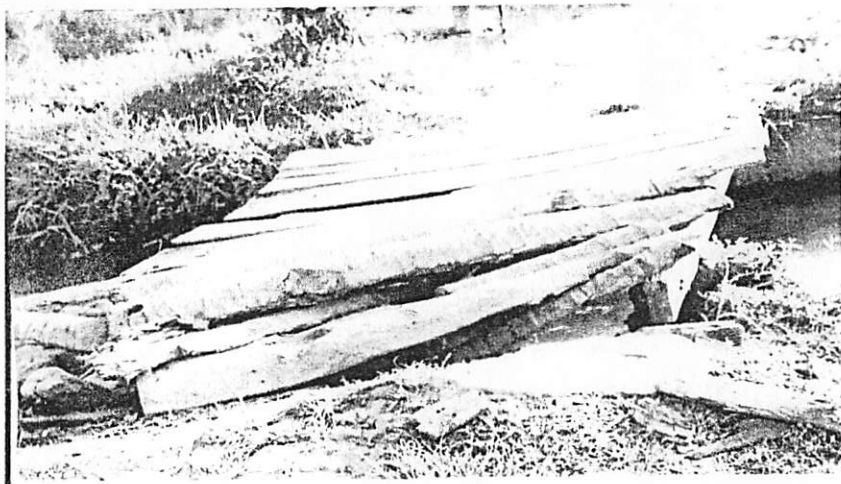
Sumber : Pedum P2KP-3, (2005)

Lampiran 3. Jumlah KK Miskin di Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2008

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk			
		Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah laki-laki dan perempuan (Orang)	Jumlah KK Miskin (Orang)
1.	Amplas	3580	3316	6896	473
2.	Kenangan	13129	13796	26925	138
3.	Tembung	19526	18925	38451	476
4.	Saentis	10206	9180	19386	313
5.	Sei Rotan	10301	10634	20935	371
6.	Bandar Klippa	14897	14067	28964	525
7.	Bandar Khalippah	15704	15024	30733	518
8.	M. Estate	5212	4667	9885	438
9.	Laut Dendang	7036	6456	13992	391
10.	Sampali	11856	12979	24835	371
11.	Bandar Setia	8724	8393	17117	435
12.	Kolam	7468	7096	14564	381
13.	Sintis	7527	7424	14951	506
14.	Cinta Rakyat	6132	6286	12418	517
15.	Cnta Damai	2643	2336	4979	400
16.	P. Lalang	1675	1832	3507	265
17.	Percut	4867	4420	9287	685
18.	Tanjung Rejo	6177	6529	12706	1.957
19.	Tanjung Selamat	3253	3336	6589	241
20.	Kampung Baru	12895	13706	26598	305
	Jumlah	172.819	170.899	343.718	9.706

Sumber : Laporan Kependudukan Kecamatan Percut Sei Tuan, 2008.

Lampiran 4. Gambar Kegiatan Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian



Gambar 2. Jembatan Sebelum dibangun



Gambar 3. Pembangunan Jembatan tahap I



Gambar 4. Pembangunan Jembatan tahap II



Gambar 5. Pembangunan Jembatan tahap III



Gambar 6. Jembatan setelah dibangun

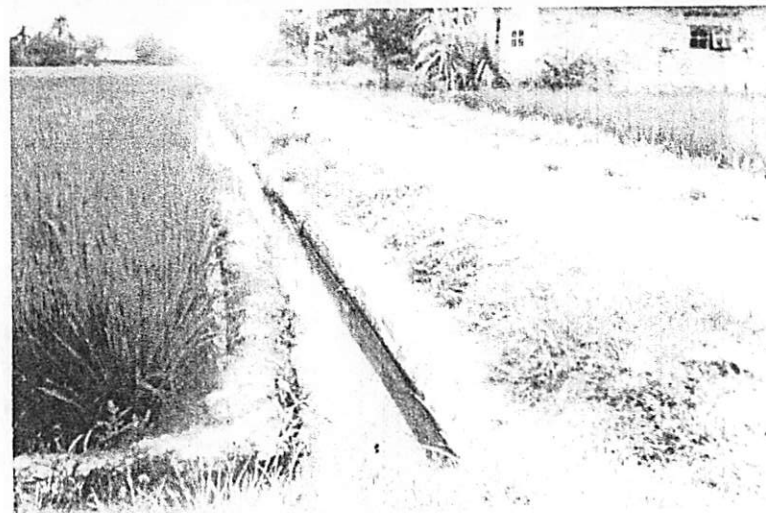


Gambar 8. Gotong Royong Pembangunan Drainase tahap II

Sumber : BKM Bina Sejahtera, 2007.



Gambar 7. Gotong Royong Pembangunan Drainase tahap I



Gambar 9. Drainase setelah dibangun

**Lampiran 5. Daftar Nama Masyarakat Yang Terlibat Dalam Kegiatan
Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan**

No.	Nama	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin
1.	Adi	30	Buruh tani	Laki-laki
2.	Budi	25	Tukang	Laki-laki
3.	Erni	39	Guru	Perempuan
4.	Firman	28	Pegawai kelurahan	Laki-laki
5.	Heri	27	Tukang	Laki-laki
6.	Herman	36	Buruh tani	Laki-laki
7.	Paidi	52	Tukang	Laki-laki
8.	Paimin	45	Buruh tani	Laki-laki
9.	Riswanto	38	Petani	Laki-laki
10.	Selamet	40	Petani	Laki-laki
11.	Supardi	39	Buruh tani	Laki-laki
12.	Sutar	50	Petani	Laki-laki
13.	Tarmo	42	ABRI	Laki-laki
14.	Teguh	54	Petani	Laki-laki
15.	Tika	43	Pegawai kelurahan	Perempuan
16.	Tukiman	35	Petani	Laki-laki

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 6. Daftar Nama Masyarakat yang Terlibat Dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan

No.	Nama	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin
1.	Afif	28	Buruh tani	Laki-laki
2.	Amat	29	Pegawai kelurahan	Laki-laki
3.	Andi	27	Tukang	Laki-laki
4.	Andri	40	Petani	Laki-laki
5.	Anga	49	Petani	Laki-laki
6.	Anto	51	Petani	Laki-laki
7.	Anwar	37	Buruh tani	Laki-laki
8.	Arfan	30	Buruh tani	Laki-laki
9.	Budi	25	Tukang	Laki-laki
10.	Dedek	28	Pegawai kelurahan	Laki-laki
11.	Dedi	39	Pegawai kelurahan	Laki-laki
12.	Didik	39	Buruh tani	Laki-laki
13.	Faisal	32	Tukang	Laki-laki
14.	Fikri	35	ABRI	Laki-laki
15.	Handoko	45	Petani	Laki-laki
16.	Hanum	46	Guru	Perempuan
17.	Hasbi	53	Petani	Laki-laki
18.	Herman	35	Petani	Laki-laki
19.	Heri	27	Tukang	Laki-laki
20.	Herwanto	48	Buruh tani	Laki-laki
21.	Ibnu	30	Guru	Laki-laki
22.	Jafar	50	Petani	Laki-laki
23.	Joko	30	Guru	Laki-laki
24.	Junaidi	44	Petani	Laki-laki
25.	Mariono	41	Petani	Laki-laki
26.	Paidi	52	Tukang	Laki-laki
27.	Paino	54	Petani	Laki-laki
28.	Ragil	25	Tukang	Laki-laki
29.	Rasyid	52	Petani	Laki-laki
30.	Salim	48	Buruh tani	Laki-laki
31.	Samsul	32	Petani	Laki-laki
32.	Selamat	40	Petani	Laki-laki
33.	Sugiono	48	Petani	Laki-laki
34.	Sugianto	43	Petani	Laki-laki
35.	Tarmo	42	ABRI	Laki-laki
36.	Teguh	54	Petani	Laki-laki
37.	Tini	38	Pegawai kelurahan	Perempuan
38.	Toni	42	Petani	laki-laki
39.	yudi	28	Buruh tani	laki-laki

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 7. Daftar Nama Masyarakat yang Terlibat Dalam Kegiatan Pembangunan Drainase

No.	Nama	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin
1.	Amat	29	Pegawai kelurahan	Laki-laki
2.	Anwar	37	Buruh tani	Laki-laki
3.	Dasman	54	Petani	Laki-laki
4.	Deri	26	Tukang	Laki-laki
5.	Fuad	49	Tukang	Laki-laki
6.	hamzah	40	ABRI	Laki-laki
7.	Handoko	45	Petani	Laki-laki
8.	Meisaroh	43	Guru	Perempuan
9.	Paino	54	Petani	Laki-laki
10.	Sabar	38	Pegawai kelurahan	Laki-laki
11.	Samsul	32	Petani	Laki-laki
12.	Siska	30	Pegawai kelurahan	Perempuan

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 8. Daftar Nama BKM Bina Sejahtera

No.	Nama	Umur	Jabatan	Jenis kelamin
1.	Arif budiman	45	Koordinator BKM	Laki-laki
2.	Sunardi	28	Sekretaris	Laki-laki
3.	Sugianto	34	Unit Pelaksana Lingkungan (UPL)	Laki-laki
4.	Mizwardie	45	Unit Pelaksana Sosial (UPS)	Laki-laki
5.	Ahmadsyah	38	Unit Pelaksana Keuangan (UPK)	Laki-laki
6.	Irwansyah	30	Anggota	Laki-laki
7.	Budi	28	Anggota	Laki-laki
8.	Nurilawati	28	Anggota	Perempuan
9.	Ika	27	Anggota	Perempuan

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 9. Sarana Pertanian di Desa Tanjung Rejo, Tahun 2007.

No.	Jenis	Jumlah
1.	Gilingan padi	6
2.	Traktor	24
3.	Hand Sprayer	60
4.	Perontok Gabah	15

Sumber : Profil Kelurahan/Desa Tanjung Rejo, 2007.

**Lampiran 10. Tingkat Kehadiran Masyarakat Dalam Musyawarah
Pembuatan Proposal Usulan Kegiatan Peningkatan Kualitas
Jalan**

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Adi	30	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
2.	Budi	25	Tukang	Laki-laki	Selalu
3.	Erni	39	Guru	Perempuan	Selalu
4.	Firman	28	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
5.	Herman	36	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
6.	Paidi	52	Tukang	Laki-laki	Selalu
7.	Tarmo	42	ABRI	Laki-laki	Selalu
8.	Paimin	45	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
9.	Selamet	40	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
10.	Supardi	39	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
11.	Teguh	54	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
12.	Tika	43	Pegawai kelurahan	Perempuan	Kadang-kadang
13.	Heri	27	Tukang	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
14.	Riswanto	38	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
15.	Sutar	50	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
16.	Tukiman	35	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 11. Tingkat Kehadiran Masyarakat Dalam Rapat Penyusunan Pengadaan Bahan dan Alat Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Adi	30	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
2.	Budi	25	Tukang	Laki-laki	Selalu
3.	Erni	39	Guru	Perempuan	Selalu
4.	Firman	28	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
5.	Sutar	50	Petani	Laki-laki	Selalu
6.	Tukiman	35	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
7.	Heri	27	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
8.	Riswanto	38	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
9.	Tarmo	42	ABRI	Laki-laki	Kadang-kadang
10.	Herman	36	Buruh tani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
11.	Paidi	52	Tukang	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
12.	Teguh	54	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
13.	Paimin	45	Buruh tani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
14.	Selamet	40	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
15.	Supardi	39	Buruh tani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
16.	Tika	43	Pegawai kelurahan	Perempuan	Tidak pernah terlibat

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran12. Tingkat Kehadiran Masyarakat Dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Adi	30	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
2.	Budi	25	Tukang	Laki-laki	Selalu
3.	Erni	39	Guru	Perempuan	Selalu
4.	Firman	28	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
5.	Sutar	50	Petani	Laki-laki	Selalu
6.	Tukiman	35	Petani	Laki-laki	Selalu
7.	Heri	27	Tukang	Laki-laki	Selalu
8.	Riswanto	38	Petani	Laki-laki	Selalu
9.	Tarmo	42	ABRI	Laki-laki	Selalu
10.	Herman	36	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
11.	Paidi	52	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
12.	Teguh	54	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
13.	Selamet	40	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
14.	Supardi	40	Buruh tani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
15.	Paimin	45	Buruh tani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
16.	Tika	43	Pegawai kelurahan	Perempuan	Tidak pernah terlibat

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 13. Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Kegiatan Pembersihan Jalan Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Adi	30	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
2.	Budi	25	Tukang	Laki-laki	Selalu
3.	Erni	39	Guru	Perempuan	Selalu
4.	Firman	28	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
5.	Heri	27	Tukang	Laki-laki	Selalu
6.	Herman	36	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
7.	Paidi	52	Tukang	Laki-laki	Selalu
8.	Paimin	45	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
9.	Riswanto	38	Petani	Laki-laki	Selalu
10.	Selamet	40	Petani	Laki-laki	Selalu
11.	Supardi	39	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
12.	Sutar	50	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
13.	Tarmo	42	ABRI	Laki-laki	Kadang-kadang
14.	Teguh	54	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
15.	Tika	43	Pegawai kelurahan	Perempuan	Tidak pernah terlibat
16.	Tukiman	35	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 14. Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Kegiatan Pengerasan Jalan Dengan Sirtu Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Budi	25	Tukang	Laki-laki	Selalu
2.	Erni	39	Guru	Laki-laki	Selalu
3.	Heri	27	Tukang	Laki-laki	Selalu
4.	Herman	36	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
5.	Paidi	52	Tukang	Laki-laki	Selalu
6.	Paimin	45	Petani	Laki-laki	Selalu
7.	Riswanto	38	Petani	Laki-laki	Selalu
8.	Selamet	40	Petani	Laki-laki	Selalu
9.	Supardi	39	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
10.	Sutar	50	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
11.	Tarmo	42	ABRI	Laki-laki	Kadang-kadang
12.	Teguh	54	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
13.	Tika	43	Pegawai kelurahan	Perempuan	Kadang-kadang
14.	Tukiman	35	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
15.	Adi	30	Buruh tani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
16.	Firman	28	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Tidak pernah terlibat

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 15. Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Kegiatan Pembuatan Proposal Usulan Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Amat	29	Pegawai Kelurahan	Laki-laki	Selalu
2.	Heri	27	Tukang	Laki-laki	Selalu
3.	Toni	42	Petani	Laki-laki	Selalu
4.	Handoko	45	Petani	Laki-laki	Selalu
5.	Paidi	52	Tukang	Laki-laki	Selalu
6.	Fikri	35	Abri	Laki-laki	Selalu
7.	Jafar	50	Petani	Laki-laki	Selalu
8.	Salim	48	Buruh Tani	Laki-laki	Selalu
9.	Herwanto	48	Buruh Tani	Laki-laki	Selalu
10.	Ragil	25	Tukang	Laki-laki	Selalu
11.	Herman	35	Buruh Tani	Laki-laki	Selalu
12.	Tarmo	42	Abri	Laki-laki	Selalu
13.	Dedi	39	Pegawai Kelurahan	Laki-laki	Kadang-kadang
14.	Joko	30	Guru	Laki-laki	Kadang-kadang
15.	Afif	28	Buruh Tani	Laki-laki	Kadang-kadang
16.	Arfan	30	Buruh Tani	Laki-laki	Kadang-kadang
17.	Samsul	32	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
18.	Faisal	32	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
19.	Junaidi	44	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
20.	Hasbi	53	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
21.	Yudi	28	Buruh Tani	Laki-laki	Kadang-kadang
22.	Teguh	54	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
23.	Anto	51	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
24.	Budi	25	Tukang	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
25.	Rasyid	52	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
26.	Selamet	40	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
27.	Andi	27	Tukang	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
28.	Didik	39	Buruh Tani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
29.	Paino	54	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
30.	Dedek	28	Pegawai Kelurahan	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
31.	Ibnu	38	Guru	Laki-laki	Tidak pernah terlibat

32.	Mariono	41	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
33.	Tini	38	Pegawai Kelurahan	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
34.	Hanum	46	Guru	Perempuan	Tidak pernah terlibat
35.	Andri	40	Petani	Perempuan	Tidak pernah terlibat
36.	Sugianto	43	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
37.	Sugiono	48	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
38.	Angga	49	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
39.	Anwar	37	Buruh tani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

**Lampiran 16. Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam
Penyusunan Pengadaan Bahan dan Alat Pada Kegiatan
Pembangunan Jembatan**

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Afif	28	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
2.	Amat	29	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
3.	Andi	27	Tukang	Laki-laki	Selalu
4.	Andri	40	Petani	Laki-laki	Selalu
5.	Angga	49	Petani	Laki-laki	Selalu
6.	Anto	51	Petani	Laki-laki	Selalu
7.	Anwar	37	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
8.	Arfan	30	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
9.	Budi	25	Tukang	Laki-laki	Selalu
10.	Dedek	28	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Kadang-kadang
11.	Dedi	39	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Kadang-kadang
12.	Didik	39	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
13.	Faisal	32	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
14.	Fikri	35	ABRI	Laki-laki	Kadang-kadang
15.	Handoko	45	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
16.	Hanum	46	Guru	Laki-laki	Kadang-kadang
17.	Hasbi	53	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
18.	Herman	35	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
19.	Heri	27	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
20.	Herwanto	48	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
21.	Ibnu	30	Guru	Laki-laki	Kadang-kadang
22.	Jafar	50	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
23.	Joko	30	Guru	Laki-laki	Kadang-kadang
24.	Junaidi	44	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
25.	Mariono	41	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
26.	Paidi	52	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
27.	Paino	54	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
28.	Ragil	25	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
29.	Rasyid	52	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
30.	Salim	48	Buruh tani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
31.	Samsul	32	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
32.	Selamet	40	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
33.	Sugiono	48	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
34.	Sugianto	43	Petani	Laki-laki	Tidak pernah

35.	Tarmo	42	ABRI	Laki-laki	terlibat Tidak pernah
36.	Teguh	54	Petani	Laki-laki	terlibat Tidak pernah
37.	Tini	38	Pegawai kelurahan	Perempuan	terlibat Tidak pernah
38.	Toni	42	Petani	Laki-laki	terlibat Tidak pernah
39.	Yudi	28	Buruh tani	Laki-laki	terlibat Tidak pernah

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 17. Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Afif	28	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
2.	Fikri	35	ABRI	Laki-laki	Selalu
3.	Andi	27	Tukang	Laki-laki	Selalu
4.	Samsul	32	Petani	Laki-laki	Selalu
5.	Angga	49	Petani	Laki-laki	Selalu
6.	Herman	35	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
7.	Budi	25	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
8.	Arfan	30	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
9.	Anwar	37	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
10.	Dedek	28	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Kadang-kadang
11.	Dedi	39	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Kadang-kadang
12.	Didik	39	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
13.	Faisal	32	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
14.	Anto	51	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
15.	Handoko	45	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
16.	Hanum	46	Guru	Laki-laki	Kadang-kadang
17.	Hasbi	53	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
18.	Andri	40	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
19.	Heri	27	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
20.	Herwanto	48	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
21.	Ibnu	30	Guru	Laki-laki	Kadang-kadang
22.	Jafar	50	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
23.	Joko	30	Guru	Laki-laki	Kadang-kadang
24.	Junaidi	44	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
25.	Mariono	41	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
26.	Paidi	52	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
27.	Paino	54	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
28.	Ragil	25	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
29.	Rasyid	52	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
30.	Salim	48	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
31.	Samsul	32	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
32.	Selamet	40	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
33.	Sugiono	48	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
34.	Sugianto	43	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
35.	Tarmo	42	ABRI	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
36.	Teguh	54	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat

37.	Tini	38	Pegawai kelurahan	Perempuan	Tidak pernah terlibat
38.	Toni	42	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
39.	Yudi	28	Buruh tani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 18. Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Kegiatan Pengorekan Pondasi Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Handoko	45	Petani	Laki-laki	Selalu
2.	Dedek	28	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
3.	Andi	27	Tukang	Laki-laki	Selalu
4.	Samsul	32	Petani	Laki-laki	Selalu
5.	Angga	49	Petani	Laki-laki	Selalu
6.	Herman	35	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
7.	Budi	25	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
8.	Anto	51	Petani	Laki-laki	Selalu
9.	Anwar	37	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
10.	Fikri	35	ABRI	Laki-laki	Selalu
11.	Dedi	39	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
12.	Didik	39	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
13.	Faisal	32	Tukang	Laki-laki	Selalu
14.	Arfan	30	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
15.	Afif	28	Buruh tani	Perempuan	Kadang-kadang
16.	Hanum	46	Guru	Laki-laki	Kadang-kadang
17.	Hasbi	53	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
18.	Andri	40	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
19.	Joko	30	Guru	Laki-laki	Kadang-kadang
20.	Herwanto	48	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
21.	Ibnu	30	Guru	Laki-laki	Kadang-kadang
22.	Jafar	50	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
23.	Heri	27	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
24.	Junaidi	44	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
25.	Mariono	41	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
26.	Salim	48	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
27.	Paino	54	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
28.	Ragil	25	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
29.	Rasyid	52	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
30.	Paidi	52	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
31.	Samsul	32	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
32.	Selamet	40	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
33.	Yudi	28	Buruh tani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
34.	Sugianto	43	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
35.	Tarmo	42	ABRI	Laki-laki	Tidak pernah terlibat

36.	Teguh	54	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
37.	Tini	38	Pegawai kelurahan	Perempuan	Tidak pernah terlibat
38.	Toni	42	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
39.	Sugiono	48	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 19. Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Kegiatan Pengecoran Pondasi Pada Kegiatan Pembangunan Jembatan

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Junaidi	44	Petani	Laki-laki	Selalu
2.	Joko	30	Guru	Laki-laki	Selalu
3.	Andi	27	Tukang	Laki-laki	Selalu
4.	Faisal	32	Tukang	Laki-laki	Selalu
5.	Angga	49	Petani	Laki-laki	Selalu
6.	Herman	35	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
7.	Budi	25	Tukang	Laki-laki	Selalu
8.	Anto	51	Petani	Laki-laki	Selalu
9.	Anwar	37	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
10.	Fikri	35	ABRI	Laki-laki	Selalu
11.	Dedi	39	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
12.	Didik	39	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
13.	Samsul	32	Petani	Laki-laki	Selalu
14.	Arfan	30	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
15.	Afif	28	Buruh tani	Perempuan	Selalu
16.	Hanum	46	Guru	Laki-laki	Selalu
17.	Hasbi	53	Petani	Laki-laki	Selalu
18.	Andri	40	Petani	Laki-laki	Selalu
19.	Dedek	28	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
20.	Herwanto	48	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
21.	Ibnu	30	Guru	Laki-laki	Kadang-kadang
22.	Paidi	52	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
23.	Heri	27	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
24.	Handoko	45	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
25.	Mariono	41	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
26.	Salim	48	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
27.	Paino	54	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
28.	Yudi	28	Buruh tani	Laki-laki	Kadang-kadang
29.	Rasyid	52	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
30.	Jafar	50	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
31.	Samsul	32	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
32.	Selamet	40	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
33.	Ragil	25	Tukang	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
34.	Sugianto	43	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
35.	Tarmo	42	ABRI	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
36.	Teguh	54	Petani	Laki-laki	Tidak pernah

37.	Tini	38	Pegawai kelurahan	Perempuan	terlibat Tidak pernah
38.	Toni	42	Petani	Laki-laki	terlibat Tidak pernah
39.	Sugiono	48	Petani	Laki-laki	terlibat Tidak pernah

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 20. Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam musyawarah Pembuatan Proposal Usulan Pada Kegiatan Pembangunan Drainase

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Amat	29	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
2.	Handoko	45	Petani	Laki-laki	Selalu
3.	Anwar	37	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
4.	Dasman	54	Petani	Laki-laki	Selalu
5.	Deri	26	Tukang	Laki-laki	Selalu
6.	Fuad	49	Tukang	Laki-laki	Selalu
7.	Hamzah	40	ABRI	Laki-laki	Selalu
8.	Paino	54	Petani	Laki-laki	Selalu
9.	Meisaroh	43	Guru	Perempuan	Kadang-kadang
10.	Sabar	38	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Kadang-kadang
11.	Samsul	32	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
12.	Siska	30	Pegawai kelurahan	Perempuan	Kadang-kadang

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 21. Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Musyawarah Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pembangunan Drainase

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Sabar	38	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
2.	Paino	54	Petani	Laki-laki	Selalu
3.	Amat	29	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
4.	Hamzah	40	ABRI	Laki-laki	Selalu
5.	Anwar	37	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
6.	Dasman	54	Petani	Laki-laki	Selalu
7.	Meisaroh	43	Guru	Perempuan	Selalu
8.	Fuad	49	Tukang	Laki-laki	Selalu
9.	Deri	26	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
10.	Handoko	45	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
11.	Siska	30	Pegawai kelurahan	Perempuan	Kadang-kadang
12.	Samsul	32	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007

Lampiran 22. Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Musyawarah penyusunan pengadaan bahan dan alat Pada Kegiatan Pembangunan Drainase

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Paino	54	Petani	Laki-laki	Selalu
2.	Anwar	37	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
3.	Samsul	32	Petani	Laki-laki	Selalu
4.	Handoko	45	Petani	Laki-laki	Selalu
5.	Deri	26	Tukang	Laki-laki	Selalu
6.	Sabar	38	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
7.	Hamzah	40	ABRI	Laki-laki	Kadang-kadang
8.	Fuad	49	Tukang	Laki-laki	Kadang-kadang
9.	Meisaroh	43	Guru	Perempuan	Kadang-kadang
10.	Siska	30	Pegawai kelurahan	Perempuan	Tidak pernah terlibat
11.	Dasman	54	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
12.	Amat	29	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Tidak pernah terlibat

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 23. Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Kegiatan Penggalan Tanah

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Sabar	38	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
2.	Paino	54	Petani	Laki-laki	Selalu
3.	Dasman	54	Petani	Laki-laki	Selalu
4.	Hamzah	40	ABRI	Laki-laki	Selalu
5.	Anwar	37	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
6.	Dasman	54	Petani	Laki-laki	Selalu
7.	Meisaroh	43	Guru	Perempuan	Selalu
8.	Fuad	49	Tukang	Laki-laki	Selalu
9.	Deri	26	Tukang	Laki-laki	Selalu
10.	Handoko	45	Petani	Laki-laki	Selalu
11.	Siska	30	Pegawai kelurahan	Perempuan	Kadang-kadang
12.	Samsul	32	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 24. Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Kegiatan Pemasangan Batu Bata

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Sabar	38	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
2.	Paino	54	Petani	Laki-laki	Selalu
3.	Dasman	54	Petani	Laki-laki	Selalu
4.	Samsul	32	Petani	Laki-laki	Selalu
5.	Anwar	37	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
6.	Dasman	54	Petani	Laki-laki	Selalu
7.	Meisaroh	43	Guru	Perempuan	Selalu
8.	Fuad	49	Tukang	Laki-laki	Selalu
9.	Deri	26	Tukang	Laki-laki	Selalu
10.	Siska	30	Pegawai kelurahan	Perempuan	Kadang-kadang
11.	Hamzah	40	ABRI	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
12.	Handoko	45	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat

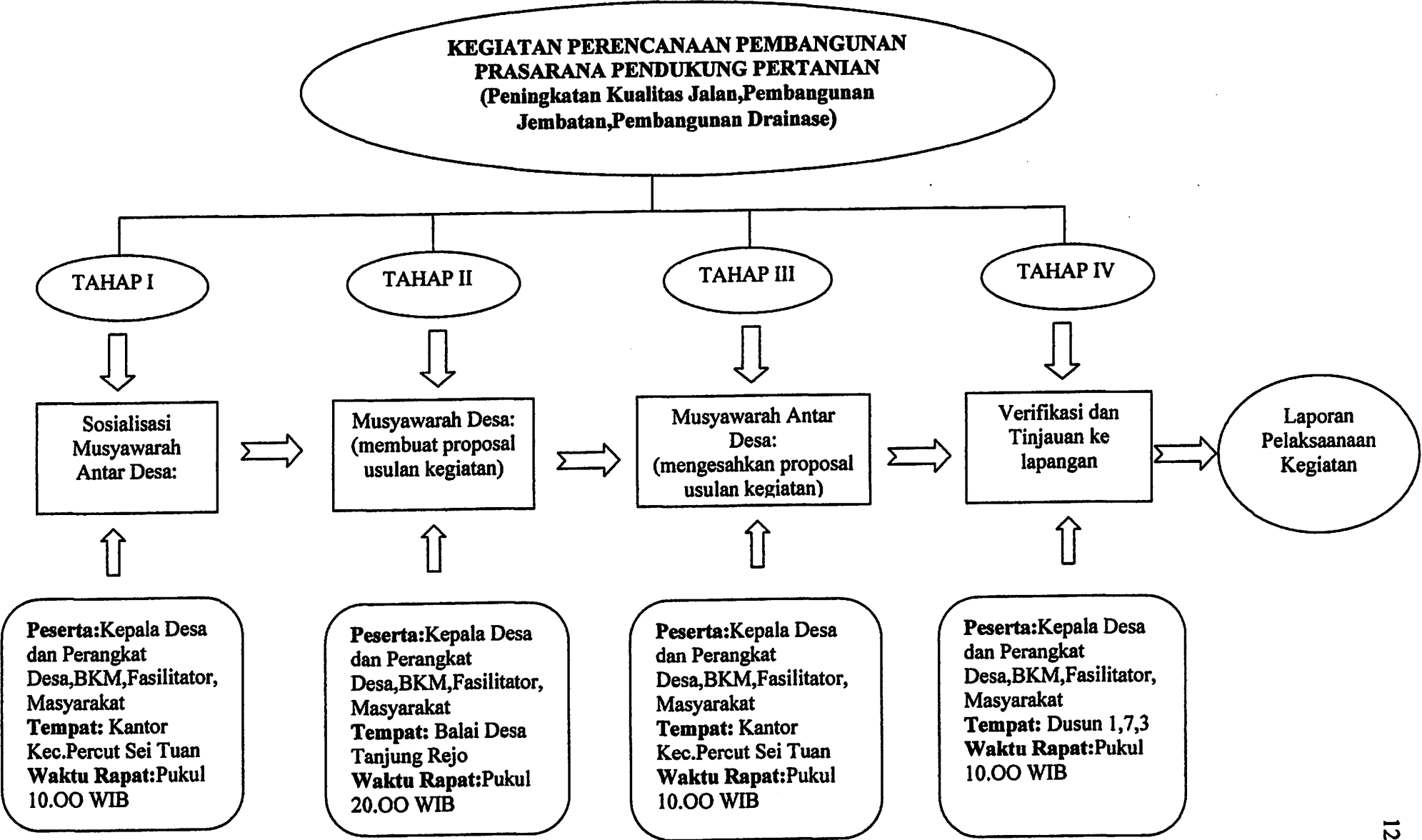
Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

Lampiran 25. Tingkat Kehadiran Masyarakat yang Ikut Terlibat Dalam Kegiatan Pelesteran

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Jenis kelamin	Frekuensi mengikuti musyawarah
1.	Amat	29	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Selalu
2.	Anwar	37	Buruh tani	Laki-laki	Selalu
3.	Dasman	54	Petani	Laki-laki	Selalu
4.	Deri	26	Tukang	Laki-laki	Selalu
5.	Fuad	49	Tukang	Laki-laki	Selalu
6.	Hamzah	40	ABRI	Laki-laki	Selalu
7.	Handoko	45	Petani	Laki-laki	Kadang-kadang
8.	Meisaroh	43	Guru	Perempuan	Kadang-kadang
9.	Paino	54	Petani	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
10.	Sabar	38	Pegawai kelurahan	Laki-laki	Tidak pernah terlibat
11.	Samsul	32	Petani	Perempuan	Tidak pernah terlibat
12.	Siska	30	Pegawai kelurahan	Perempuan	Tidak pernah terlibat

Sumber : BKM Desa Tanjung Rejo, 2007.

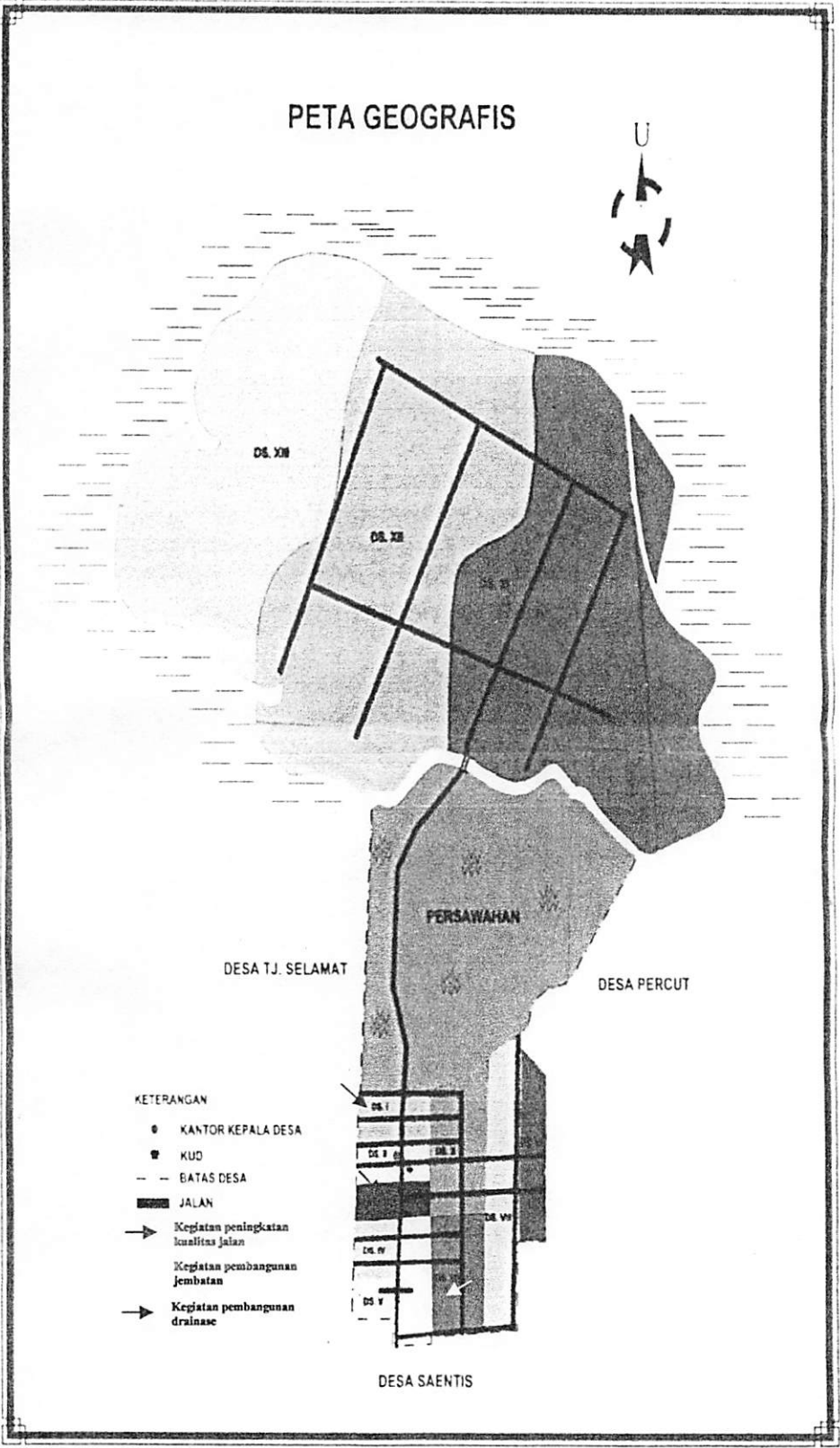
Lampiran 26. BAGAN ALIR KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN



Lampiran 27. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan	Kesimpulan		Hasil penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	Desi Anita (2005) dengan judul "Peran Serta Masyarakat Melalui Sistem BPLM Dalam Pembangunan Agribisnis Pedesaan"	Untuk melihat pelaksanaan program BPLM dan melihat peran serta anggota kelompok penerima BPLM terhadap dana BPLM	Penelitian pada program pembangunan pertanian yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat	Tujuan penelitian	Pelaksanaan program BPLM di Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun untuk penyalurandana ke kelompok masyarakat sedikit terlambat dari waktu yang telah ditentukan karena adanya administrasi yang memerlukan waktu untuk penyelesaiannya sebelum diajukan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Peran serta anggota kelompok tani penerima dana BPLM terhadap program BPLM termasuk kategori tinggi dengan persentase 89,75%, dimana sebanyak 80 orang anggota kelompok berperan sangat tinggi terhadap program. Hal ini disebabkan sosialisasi, kegiatan seleksi serta penyaluran dana dan pencairan dana dilaksanakan oleh tim teknis dan dinas terkait sehingga anggota kelompok menerima apa yang sudah menjadi ketentuan dalam kegiatan tersebut.
2.	Syahrial (2008) dengan judul "Efektifitas Modal Dana Bergulir Dalam Program Penanggulangan	Untuk melihat efektifitas pinjaman modal	Penelitian pada program pembangunan	Tujuan penelitian	Pelaksanaan kegiatan P2KP dalam pemberian modal dana bergulir dan sistem pengelolaannya dalam

	Kemiskinan di Kota Padang”	dana bergulir dan sistem pengelolaannya dalam mengatasi persoalan kemiskinan pada dua kelurahan di Kota Padang	pertanian yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat		mengatasi persoalan kemiskinan sudah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Namun efektifitas pinjaman modal dana secara bergulir belum mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin di dua kelurahan yang diteliti. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pinjaman modal dana bergulir tidak sesuai dengan usulan atau kebutuhan anggota kelompok, karena sangat terkesan pinjaman modal dana bergulir hanya mengejar banyak KK miskin yang meminjam. Penyebaran dan penyeragaman jumlah pinjaman, yakni Rp 500.000.- per KK yang digunakan sebagai tambahan modal usaha.
--	----------------------------	--	--	--	---



Gambar 10. Peta Geografis Desa Tanjung Rejo.
Sumber : Kantor Lurah Desa Tanjung Rejo, 2010.

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
(PKKP)
TAHUN ANGGARAN 2007

OUTLINE PROPOSAL
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Program
Penanggulangan
Kemiskinan
di Perkotaan

PKKP

Jenis Kegiatan : 1. PENYIIRTUAN Lrg. SENTOSA TIMUR
2.

Nama KSM	: KARYA SENTOSA (DENI)
Kelurahan/Desa	: D. REDO
Kecamatan	: PERCUT SEITUAN
Kabupaten	: DELI SERDANG

A. USULAN KEGIATAN

Kota/Kabupaten	DELI SERDANG
Kecamatan	P. SEI TUAN
Kelurahan/Desa	DE. REJO
Nama BKM	BINA SEJAHTERA
Nama KSM/Panitia	KARYA SENTOSA
Kegiatan	Lingkungan / DSN I. / I. SENTOSA TIMUR

Nama Pekerjaan	Jalan Telford / Rabat / Telasol / ... PEMBERASAN SERID.
----------------	---

Volume Pekerjaan Km
------------------	----------

Alasan Pembangunan Prasarana	<p>1. Transportasi masyarakat masih sulit, bahkan banyak masyarakat yang terpaksa harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki karena jalan masih susah diawasi dengan kendaraan;</p> <p>2. Hasil bumi banyak (seperti padi, tebu, kayu, dll) tetapi harga jualnya masih murah karena transportasinya yang sulit.</p> <p>3. Angkutan mahal dan sulit karena hanya bisa diangkut oleh tenaga manusia (dipikul)</p> <p>4. Usaha produksi masyarakat (seperti mebel, kain tenun, dll) tidak meningkat bahkan beberapa diantaranya sudah tutup. Hal ini banyak disebabkan karena ongkos transportasi penjualan produk tersebut sangat mahal sehingga harga jualnya pun terpaksa menjadi tinggi.</p> <p>5. Masyarakat sangat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak adanya petugas kesehatan yang ada mau tinggal di desa. Kebanyakan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan harus pergi berjalan kaki ke desa lain</p>
------------------------------	---

Lokasi Pekerjaan	Dusun/RT/RW ... I - Kelurahan/Desa ... DE. REJO
------------------	---

Jumlah Penerima Manfaat	Langsung L = 35 orang P = 25 orang	Tidak Langsung L = 100 orang P = 100 orang	Orang miskin 25 orang
	Total (C) = 60 Org	Total (C) = 200 Org	RI (9.5) %

Metode Konstruksi	<input checked="" type="checkbox"/> Golong Royong <input type="checkbox"/> Semi Golong Royong <input type="checkbox"/> Dikontrakan
-------------------	--

Status Tanah	Dihibahkan
--------------	------------

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

Kelurahan/Desa DR. REJO Kec...P.S. TUANKab.....D. SERDANG.

Di

T o m p a t

Bersama ini kami sampaikan proposal usulan pelaksanaan kegiatan KSM : KARYA SENTOSA Kel./Desa DR. REJO, sesuai dengan hasil tembug/musyawarah, tanggal : 6 - Maret 2007, yang telah menolapkan usulan pelaksanaan kegiatan, yaitu :

No.	Nama Usulan Kegiatan	Volume	Total Biaya (Rp)		Lokasi
			Swada	BLM/P2KP	
1	<u>PENGERTAHAN JERTU</u>	<u>3 x 250 m²</u>	<u>Rp 300.000,-</u>	<u>Rp 1.800.000,-</u>	<u>Arg. SENTOSA Timur</u>
Dit.					

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, atas kerjasama dan dukungannya disampaikan banyak terima kasih.

DR. REJO, 06-03-2007.KSM : KARYA SENTOSA.

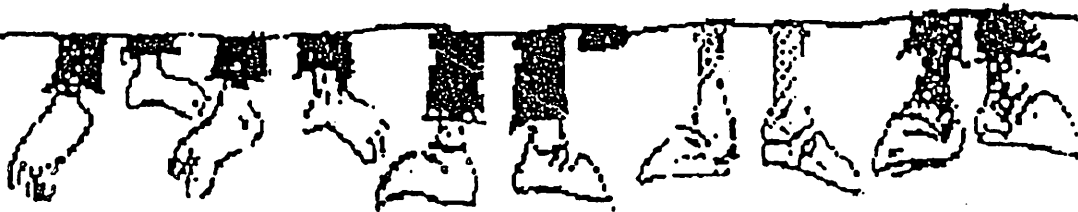

SOFYAN
Ketua

PROPOSAL USULAN KEGIATAN KSM
 BIDANG KEGIATAN LINGKUNGAN
 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
 P2KP - 3



PROPOSAL KSM

Nama KSM : SERCA
 Nomor Induk : 008
 Alamat : LR PERHIMPUNAN
 Jenis Kegiatan : PEMBANGUNAN JEMBATAN X
 :
 Jumlah Anggota : 7 orang, (L = 5, P = 2)



BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
 " BINA SEJAHTERA "

DESA / KELURAHAN : TANJUNG REJO
 KECAMATAN : PERCUT SEI TUAN
 KAB. / KOTA : DELI SERDANG

A. USULAN KEGIATAN

FORM - 2

Kota/Kabupaten	:	Deli Serdang
Kecamatan	:	PERCUT SEI TUAN
Kelurahan/Desa	:	TANJUNG PEJO
Nama BKM	:	BINA SEJAHTERA
Nama KSM/Panitia	:	SEROJA
Kegiatan	:	Lingkungan X

Nama Pekerjaan	:	Jalan Telford / Rabat / Telasih / ...PEMBANGUNAN JEMBATAN...
----------------	---	--

Volume Pekerjaan	:	1. Panjang = 28 m, Lebar = 4 m, Tebal = 0.25 m, Vol = ... 7 M3 2. 1 = Unit
------------------	---	--

Alasan Pembangunan Prasarana	:	<p>a. Transportasi masyarakat masih sulit, bahkan banyak masyarakat yang terpaksa harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki karena jalan masih susah di;ewati dengan kendaraan;</p> <p>b. Hasil bumi banyak (seperti padi, tebu, kayu, dll) tetapi harga jualnya masih murah karena transportasinya yang sulit.</p> <p>c. Angkutan mahal dan sulit karena hanya bisa diangkut oleh tenaga manusia (dipikul)</p> <p>d. Usaha produksi masyarakat (seperti mebel, kain tenun, dll) tidak meningkat bahkan beberapa diantaranya sudah tutup. Hal ini banyak disebabkan karena ongkos transportasi penjualan produk tersebut sangat mahal sehingga harga jualnya pun terpaksa menjadi tinggi.</p> <p>e. Masyarakat sangat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak adanya petugas kesehatan yang ada mau tinggal didesa. Kebanyakan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan harus pergi berjalan kaki ke desa lain</p> <p>f. Jembatan rusak jadi susah di;lewati</p>
------------------------------	---	---

Lokasi Pekerjaan	:	Dusun/RT/RW X - Kelurahan/Desa ...TANJUNG PEJO
------------------	---	--

Jumlah Penerima Manfaat	:	<table><tr><th>Langsung</th><th>Tidak langsung</th><th>Orang miskin</th></tr><tr><td>L = 80 orang</td><td>L = 170 orang</td><td>R = 100 orang</td></tr><tr><td>P = 60 orang</td><td>P = 100 orang</td><td></td></tr><tr><td>Total (C) = 140 Org</td><td>Total (Z) = 270 Org</td><td>R/(C+Z) = 25,64%</td></tr></table>	Langsung	Tidak langsung	Orang miskin	L = 80 orang	L = 170 orang	R = 100 orang	P = 60 orang	P = 100 orang		Total (C) = 140 Org	Total (Z) = 270 Org	R/(C+Z) = 25,64%
	Langsung	Tidak langsung	Orang miskin											
	L = 80 orang	L = 170 orang	R = 100 orang											
	P = 60 orang	P = 100 orang												
Total (C) = 140 Org	Total (Z) = 270 Org	R/(C+Z) = 25,64%												

Metode Konstruksi	<input checked="" type="checkbox"/> Gotong Royong	<input type="checkbox"/> Semi Gotong Royong	<input type="checkbox"/> Dikontrakan
-------------------	---	---	--------------------------------------

Status Tanah	Dihibahkan
--------------	------------

SURAT PENGANTAR

FORM - 1

ada Yth. : BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
Kelurahan/Desa Tj. Rejo.... Kec. PERCUT SEITUMA
Kab. Deli Serdang

Di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan proposal usulan pelaksanaan kegiatan KSM :
PERAJA..... Kel./Desa TANJUNG RED....., sesuai dengan hasil rembug/musyawarah, tanggal
20 JUNI..... 2007.. yang telah menetapkan usulan pelaksanaan kegiatan, yaitu :

Nama Usulan Kegiatan	Vol	Total Biaya (Rp)		Lokasi
		Swadaya	BLM/P2KP	
Jembatan	3 M	1000.000	4025000.	LR SENTOSA

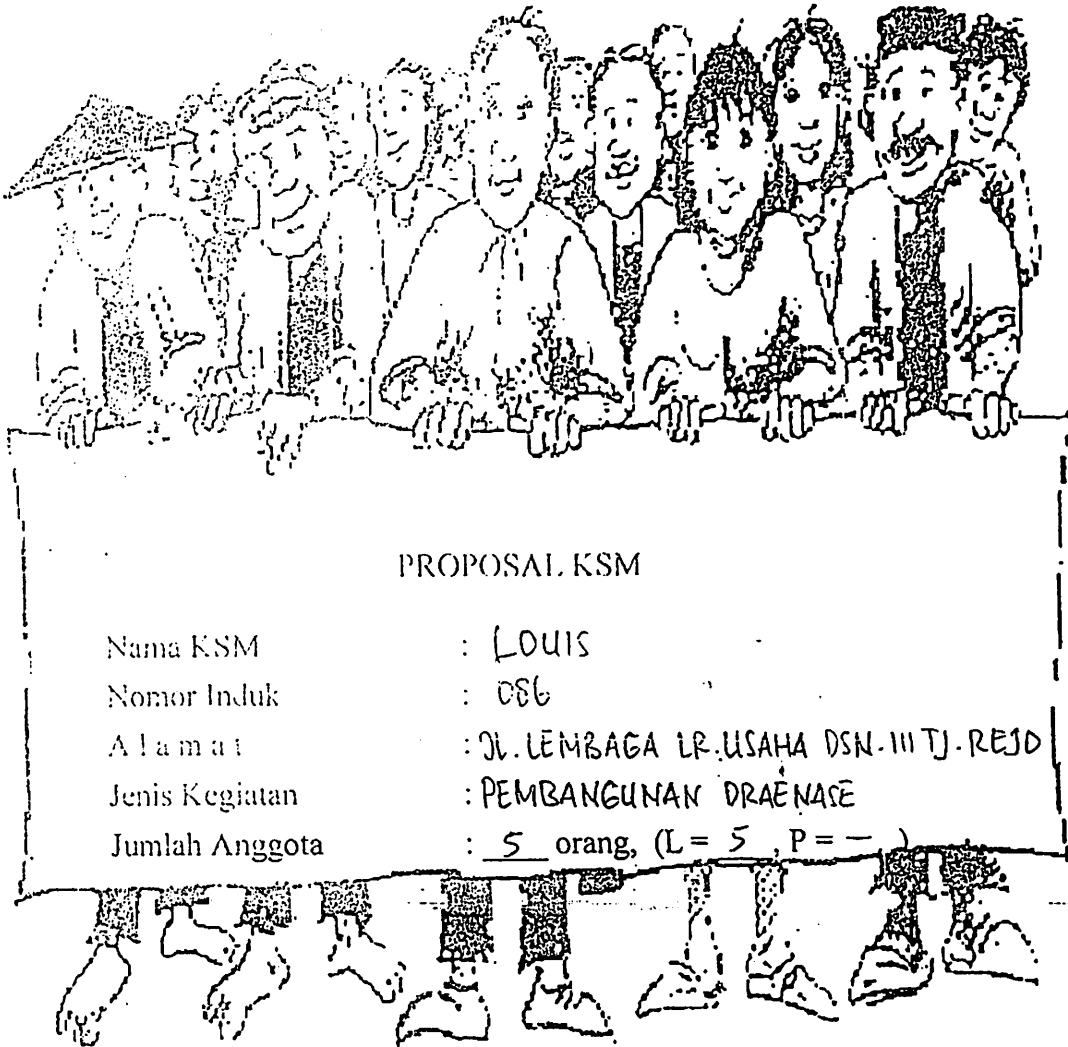
Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, atas kerjasama dan
ingannya disampaikan banyak terima kasih.

TANJUNG RED, 20 JUNI 2007..
KSM PERAJA.....

SUWANTATIF
Ketua

DOKUMEN KSM

PROPOSAL USULAN KEGIATAN KSM
BIDANG KEGIATAN LINGKUNGAN
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
P2KP 3 Tahap 2



PROPOSAL KSM

Nama KSM : LOUIS
Nomor Induk : 086
Alamat : JL. LEMBAGA LR. USAHA DSN. III TJ. REJO
Jenis Kegiatan : PEMBANGUNAN DRAENASE
Jumlah Anggota : 5 orang, (L = 5, P = -)

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

“ BINA SEJAHTERA ”

DESA / KEL TANJUK REJO

KECAMATAN PERAIT SEI TUAN

KAB. DELI SERDANG - SUMATERA-UTARA

A. USULAN KEGIATAN

Kota/Kabupaten	:	Deli Serdang
Kecamatan	:	PERCUT SEI TUAN
Kelurahan/Desa	:	TANJUNG REJO
Nama BKM	:	BINA SEJAHTERA
Nama KSM/Panitia	:	LOUIS
Kegiatan	:	Lingkungan III LR-USAHA BARAT

Nama Pekerjaan	:	Jalan Telford / Rabat / Telasah / PEMB. DRAENASE
----------------	---	--

Volume Pekerjaan	:	P = 150 m L = 0.5 m T = 0.5 m ; Unit
------------------	---	---

Alasan Pembangunan Prasarana	:	<p>a. Transportasi masyarakat masih sulit, bahkan banyak masyarakat yang terpaksa harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki karena jalan masih susah dijewati dengan kendaraan;</p> <p>b. Hasil bumi banyak (seperti padi, tebu, kayu, dll) tetapi harga jualnya masih murah karena transportasinya yang sulit.</p> <p>c. Angkutan mahal dan sulit karena hanya bisa diangkut oleh tenaga manusia (dipikul)</p> <p>d. Usaha produksi masyarakat (seperti mebel, kain tenun, dll) tidak meningkat bahkan beberapa diantaranya sudah tutup. Hal ini banyak disebabkan karena ongkos transportasi penjualan produk tersebut sangat mahal sehingga harga jualnya pun terpaksa menjadi tinggi.</p> <p>e. Masyarakat sangat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak adanya petugas kesehatan yang ada mau tinggal didesa. Kebanyakan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan harus pergi berjalan kaki ke desa lain</p> <p>① BILA TURUN HUJAN SELALU TERDAPAT BANDIR</p>
------------------------------	---	--

Lokasi Pekerjaan	:	Dusun/RT/RW III - Kelurahan/Desa TANJUNG REJO
------------------	---	---

Jumlah Penerima Manfaat	:	<table><tr><th>Langsung</th><th>Tidak langsung</th><th>Orang miskin</th></tr><tr><td>L = 20 orang</td><td>L = 20 orang</td><td>R = 40 orang</td></tr><tr><td>P = 20 orang</td><td>P = 20 orang</td><td></td></tr><tr><td>Total (C) = 40 Org</td><td>Total (Z) = 40 Org</td><td>R/(C+Z) % = 50.....%</td></tr></table>	Langsung	Tidak langsung	Orang miskin	L = 20 orang	L = 20 orang	R = 40 orang	P = 20 orang	P = 20 orang		Total (C) = 40 Org	Total (Z) = 40 Org	R/(C+Z) % = 50.....%
	Langsung	Tidak langsung	Orang miskin											
	L = 20 orang	L = 20 orang	R = 40 orang											
	P = 20 orang	P = 20 orang												
Total (C) = 40 Org	Total (Z) = 40 Org	R/(C+Z) % = 50.....%												

Metode Konstruksi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Gotong Royong <input type="checkbox"/> Semi Gotong Royong <input type="checkbox"/> Dikontrakan
-------------------	---	--

Status Tanah	:	Dihibahkan
--------------	---	------------

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. : BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT
Kelurahan/Desa TJ. REJO..... Kec. PERCUT SEI TUAN
Kab. DELI SERDANG


Di
T e m p a t

Bersama ini kami sampaikan proposal usulan pelaksanaan kegiatan KSM : LOUIS..... Kel./Desa TANJUNG REJO....., sesuai dengan hasil rembug/musyawarah, tanggal : 26 Juli..... 2007, yang telah menetapkan usulan pelaksanaan kegiatan, yaitu :

No.	Nama Usulan Kegiatan	Volume	Total Biaya (Rp)		Lokasi
			Swadaya	BLM/P2KP	
1.	PEMB. DRAENASE	150 m	1.345.000	7.700.000	LR. USARA
Dst.					

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, atas kerjasama dan dukungannya disampaikan banyak terima kasih.

TANJUNG REJO, 26 JULI 2007
KSM LOUIS.....


K. TUNIP
Ketua